

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**DAMPAK SISTEM TANAM PAKSA
BAGI MASYARAKAT JAWA TAHUN 1830-1870**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Silvester Desna Ria Ambara.

NIM : 061314007

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**DAMPAK SISTEM TANAM PAKSA
BAGI MASYARAKAT JAWA TAHUN 1830-1870**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Silvester Desna Ria Ambara.

NIM : 061314007

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

**DAMPAK SISTEM TANAM PAKSA
BAGI MASYARAKAT JAWA TAHUN 1830-1870**

Oleh

Silvester Desna Ria Ambara

NIM : 061314007

Telah Disetujui Oleh

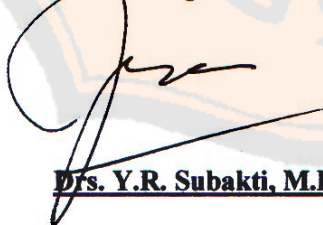
Pembimbing I



Dr. Anton Haryono, M.Hum.

Tanggal, 13 September 2011

Pembimbing II



Drs. Y.R. Subakti, M.Pd.

Tanggal, 13 September 2011

SKRIPSI

**DAMPAK SISTEM TANAM PAKSA
BAGI MASYARAKAT JAWA TAHUN 1830-1870**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

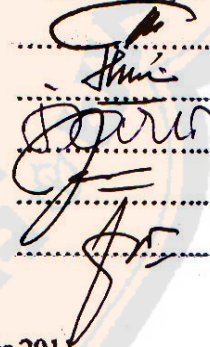
Silvester Desna Ria Ambara
NIM: 061314007

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 06 Oktober 2011
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap
Ketua	Indra Darmawan, S.E., M.Si.
Sekretaris	Dra. Th. Sumini, M.Pd.
Anggota	Dr. Anton Haryono, M.Hum.
Anggota	Drs. Y.R. Subakti, M.Pd.
Anggota	Drs. B. Musidi, M.Pd.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 06 Oktober 2011

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma


Dekan,

Rohandi, Ph.D.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan Penuh Rasa Hormat Dan Kerendahan Hati
Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:*

- *Tuhanku Yesus Kristus yang selalu memberikan rahmat dan perlindunganNya.*
- *Bapak dan ibu yang selalu menjaga, membimbing dan merawat sampai sebesar ini.*
- *(Alm) Mbak Ririk yang selalu melindungi dan memberikan doanya di surga.*
- *(Alm) Mbah Kakung dan Mbah Putri yang selalu memperhatikanku di atas sana.*
- *Kekasihku Dhian yang selalu memberikan doa dan motivasi.*
- *Adikku Dede Priska dan Deo serta seluruh keluarga yang aku sayangi.*
- *Semua sahabat dan orang-orang yang telah mengenal aku.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, dari pada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makan (Amsal : 12 : 9)

Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa (Amsal : 12 :24)

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. - Bung Karno

Keramahtamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, keramahtamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian, keramahtamahan dalam memberi menciptakan kasih. - Lao Tse

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. - Abu Bakar Sibli

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. - Thomas Alva Edison

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 28 Juli 2011

Penulis



Silvester Desna Ria Ambara



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Silvester Desna Ria Ambara

Nomor Mahasiswa : 061314007

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

DAMPAK SISTEM TANAM PAKSA

BAGI MASYARAKAT JAWA TAHUN 1830-1870

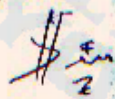
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 06 Oktober 2011

Yang menyatakan



Silvester Desna Ria Ambara

ABSTRAK

**DAMPAK SISTEM TANAM PAKSA
BAGI MASYARAKAT JAWA TAHUN 1830-1870**

**Silvester Desna Ria Ambara
Universitas Sanata Dharma
2011**

Skripsi ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak Sistem Tanam Paksa bagi masyarakat Jawa dalam bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang sosial-budaya.

Skripsi ini disusun berdasarkan metode penelitian sejarah yang mencakup empat tahapan yaitu, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologis, politik, psikologis, dan ekonomi. Sedangkan model penulisannya bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Tanam Paksa menimbulkan dampak bagi masyarakat Jawa, baik berupa dampak negatif maupun positif. Dampak positif dari Sistem Tanam Paksa dalam bidang ekonomi, yaitu mengenai pengenalan dan perkembangan ekonomi uang, pertumbuhan kemakmuran masyarakat Jawa, dan perkembangan alat pengangkutan. Sedangkan untuk dampak negatifnya, yaitu mengenai tergesernya tanaman pangan dan akibatnya serta mengenai pungutan sewa tanah dan pajak tanah. Sedangkan dampak negatif dari Sistem Tanam Paksa dalam bidang politik, yaitu mengenai perubahan kedudukan golongan elit pribumi (bupati), peran bupati serta birokrasi pemerintahan. Dampak negatif dari Sistem Tanam Paksa dalam bidang sosial-budaya, yaitu mengenai pengalihan tanah, pengerahan tenaga kerja, pertumbuhan dan penurunan jumlah penduduk Jawa, perubahan sosial di masyarakat Jawa, dan perubahan kebudayaan masyarakat Jawa. Sedangkan untuk dampak positifnya, yaitu dengan munculnya pendidikan Barat.

ABSTRACT

**THE IMPACT OF PLANTING SYSTEM FORCE
FOR JAVANESE SOCIETY 1830-1870**

**Silvester Desna Ria Ambara
Sanata Dharma University
2011**

This thesis aims to describe and analyze the impact of the Cultivation System for the Javanese society in the economic, political, and societal-cultural fields.

The thesis is written based on the method of history research which includes four stages : heuristics, verification, interpretation, and historiography. The approach that is used is the sociological, political, psychological and economical approaches, while the type of process of writing is analytical description.

The results showed that the implementation of the Cultivation System for the Javanese society had impacts, either positive or negative. The positive impacts of the Cultivation System in the field of economics were the introduction and development of money economy namely the growth of the Javanese society prosperity, and development of means of transportation, for negative impacts namely the displacement of crops and consequently as well as levies on land rent and land tax. While the negative impact of the Cultivation System in the field of politics namely the change in the position of indigenous elites (regent), the role of regent and government bureaucracy. The negative impact of the Cultivation System in the societal and cultural field namely regarding the transfer of land, manpower deployment, growth and declination in the population of Java, the social cultural changes in the Javanese society. Whereas for its positive impact namely the emerge of Western Education.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dampak Sistem Tanam Paksa Bagi Masyarakat Jawa Tahun 1830-1870”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Anton Haryono, M.Hum., dan Drs. Y.R Subakti, M.Pd., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, membantu, dan memberikan banyak pengarahan, saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Y.R Subakti, M.Pd., selaku dosen pembimbing akademik angkatan 2006 yang telah membimbing, membantu, dan memberikan banyak pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Sanata Dharma.
6. Seluruh dosen dan pihak sekretariat Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
7. Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan pelayanan dan membantu penulis dalam memperoleh sumber penulisan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Kedua orangtua penulis yang telah memberikan dorongan spiritual dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma, kepada (Alm) Mba Ririk yang telah memberikan doanya di surga, Mas Wahyu yang telah membantu memperbaiki laptop, adikku Dede Priska, Agnes dan Deo, tak lupa bagi Mbahku tersayang yang telah memberikan rumahnya untuk ditempati, kekasihku Dhian yang telah setia memberikan doa dan motivasi serta seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan doanya.
9. Teman-teman: Sr. Vina, Sr. Desi, Merita, Dwi (Cui), Fery Fitanto, Wivina Rahayu, Heni, Bruder Theo, Adven, Krispina Desi, serta seluruh teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2006, 2007 dan adik kelas yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR SKEMA.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Landasan Teori.....	17
F. Metodologi Penelitian.....	30
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II DAMPAK SISTEM TANAM PAKSA BAGI MASYARAKAT	
JAWA PADA SEKTOR EKONOMI.....	36
A. Kesejahteraan Rakyat.....	36
1. Sewa Tanah dan Pajak Tanah Tetap Dipungut.....	37
2. Pertumbuhan Kemakmuran Masyarakat Jawa.....	42

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Tergesernya Tanaman Pangan oleh Tanaman Ekspor dan Akibatnya.....	49
C. Pengenalan dan Perkembangan Ekonomi Uang di Masyarakat Jawa.....	53
1. Perkembangan Uang Bagi Rakyat Pedesaan.....	53
2. Perkembangan Uang Bagi Golongan Elit Pribumi (Bupati).....	56
D. Perkembangan Alat Pengangkutan.....	57
BAB III DAMPAK SISTEM TANAM PAKSA BAGI MASYARAKAT	
JAWA PADA SEKTOR POLITIK.....	62
A. Perubahan Kedudukan (Jabatan) Bupati.....	62
B. Peran Bupati.....	64
C. Birokrasi Pemerintahan.....	68
BAB IV DAMPAK SISTEM TANAM PAKSA BAGI MASYARAKAT	
JAWA PADA SEKTOR SOSIAL-BUDAYA.....	76
A. Pengalihan Tanah.....	76
1. Tanah Rakyat Dijadikan Lahan Tanaman Ekspor.....	76
2. Pola Kepemilikan Tanah.....	81
B. Pengerahan Tenaga Kerja.....	85
C. Pertumbuhan dan Penurunan Jumlah Penduduk Jawa.....	90
1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Jawa.....	90
2. Penurunan Jumlah Penduduk Jawa.....	94
D. Perubahan Sosial di Jawa.....	98
E. Munculnya Model Pendidikan Barat.....	100
F. Perubahan Kebudayaan Masyarakat Jawa karena Sistem Tanam Paksa.....	102
BAB V KESIMPULAN.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	108
SUPLEMEN.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Hubungan antara Jumlah Pajak Bumi dengan Jumlah Bayaran Hasil Tanaman Tebu 1837-1851.....	38
Tabel 2.2 : Hubungan antara Jumlah Pajak Bumi dengan Jumlah Bayaran Hasil Tanaman Nila 1837-1851.....	39
Tabel 2.3 : Luas Tanaman Tebu dalam Tahun 1833, 1860 dan 1910 Dinyatakan Dalam Bau (0,71 HA).....	49
Tabel 2.4 : Upah Indigo (nila) Tahun 1840 dalam Gulden.....	53
Tabel 2.5 : Pembayaran Upah Tanaman Tebu Pada 1850.....	54
Tabel 4.1 : Luas Tanaman Tebu dalam Tahun 1833, 1860 dan 1910 Dinyatakan dalam Bau (0,71 HA).....	76
Tabel 4.2 : Bentuk-Bentuk Pemilikan Tanah Sawah pada tahun 1868.....	81
Tabel 4.3 : Keterlibatan Keluarga dalam Sistem Tanam Paksa.....	85
Tabel 4.4 : Keterlibatan Penduduk Pedesaan dalam Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa Periode 1837-1845.....	87
Tabel 4.5 : Tingkat Perkawinan (Per Seribu) dalam Tahun-Tahun Selektif di Jawa Tengah (1840-1870).....	90
Tabel 4.6 : Tingkat Perkawinan, Rasio Jenis Kelamin, Persentase Anak dan Ukuran Keluarga 1820-1880.....	91
Tabel 4.7 : Tingkat Kelahiran dan Kematian Kasar dan Persentase Peningkatan Alamiah, 1820-1850 dan 1850-1880, yang didasarkan pada Model “ Barat ‘ Tingkat Mortalitas	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Usia 3 dan 5 Tahun.....	91
Tabel 4.8 : Pertumbuhan Penduduk Asing di Hindia Belanda, Tahun 1860-1930.....	92
Tabel 4.9 : Arah dari Pengaruh Sejumlah Faktor pada Tingkat Kematian, Menurut Periode.....	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Rakyat yang Kelaparan dan Koruptor Dipaksa Untuk Bekerja Selama 75 Hari.....	51
Gambar 2.2 : Contoh Pembangunan Rel Kereta Api dari Pedalaman Menuju Kota Pelabuhan di Wilayah Banyuwangi.....	59
Gambar 2.3 : Stasiun Tugu Pertama di Semarang (Jawa Tengah) Diperkirakan Sekitar Tahun 1860-an atau Awal 1870-an.....	60
Gambar 4.1 : Letak Penanaman Tanaman Tebu.....	77
Gambar 4.2 : Letak Penanaman Tanaman Kopi.....	78
Gambar 4.3 : Proses Penanaman Tanaman Nila.....	79

DAFTAR SKEMA

Skema 3.1 : Struktur Birokrasi Lokal Pada Masa Sistem Tanam Paksa.....	69
Skema 4.1 : Piramid Kehidupan Masyarakat Jawa Sejak Sistem Tanam Paksa.....	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegagalan sistem sewa tanah terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal van der Capellen dan Du Bus de Gisignies, sehingga mendorong penggantinya untuk menerapkan sistem baru yang lebih bijaksana. Pada tahun 1830 Johannes van den Bosch dikirim ke Indonesia. Ia mendapat tugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor guna menanggulangi keadaan keuangan negeri Belanda yang sangat parah.¹ Pada waktu itu negeri Belanda sedang mengalami perang di Eropa maupun perang di Indonesia² dan mempunyai utang yang sangat besar, maka untuk mencari pemecahannya dicari di negara jajahan yaitu Indonesia. Selain itu, pertentangan antara golongan liberal dengan golongan konservatif mengenai tanah jajahan mulai mengemuka. Golongan konservatif memandang politik eksploitasi dengan penyerahan-paksa model VOC sangat cocok untuk mengelola Indonesia sebagai daerah “*wingewest*“, atau daerah yang menguntungkan negeri induk. Sistem penyerahan paksa itu dapat diterapkan dalam usaha eksploitasi produksi pertanian tanah jajahan yang langsung ditangani oleh pemerintah kolonial.³

¹ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, Yogyakarta, Aditya Media, 1994, hlm. 53.

² Perang Jawa adalah perang yang dipimpin oleh P. Diponegoro selama kurun waktu 5 tahun (1825-1830).

³ *ibid*, hlm. 79.

Pada tahun 1830 Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mulai menerapkan sistem baru yang sangat keras, yaitu *Cultuurstelsel* atau yang kemudian lazim disebut Sistem Tanam Paksa. *Cultuurstelsel* merupakan suatu sistem pembudidayaan tanaman ekspor yang dilaksanakan di Jawa. Orang liberal Belanda menterjemahkan *Cultuurstelsel* sebagai Tanam Paksa (*Dwangstelsel*). Tujuan dari Sistem Tanam Paksa tidak lain adalah untuk mendapatkan hasil bumi secara murah dan mudah yang dapat dijual dengan laba yang berlipat ganda di pasar dunia. Laba yang dihasilkan dari Sistem Tanam Paksa akan digunakan untuk membayar utang negeri Belanda.⁴

Sistem Tanam Paksa pada dasarnya merupakan penggabungan antara sistem penyerahan wajib dan sistem tanah. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat bukan dalam bentuk uang (pajak uang), tetapi berupa hasil tanaman pertanian.⁵ Menurut pikiran van den Bosch pajak "*in natura*" ini dianggap lebih sesuai dengan sifat rumah tangga desa daripada dalam bentuk uang. Dengan demikian, rakyat pedesaan ingin dipertahankan sebagai rumah tangga produksi dan dicegah agar tidak dipaksa untuk menjalankan rumah tangga uang.⁶

Produksi tanaman ekspor yang berhasil dikumpulkan melalui Sistem Tanam Paksa, diharapkan dapat dikirim ke negeri Belanda, yang kemudian akan dipasarkan di pasaran dunia secara luas, baik di Eropa maupun di Amerika.⁷

⁴ Sutjipto Wiryosuparto, *Dari Lima Pendjadjahan menudju Zaman Kemerdekaan*, Indira, 1956, hlm. 95.

⁵ Mubyarto, dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan : Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta, Aditya Media, 1993, hlm. 20.

⁶ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo *op.cit*, hlm. 55.

⁷ *ibid*, hlm. 54.

Negeri Belanda mengharapkan hasil dari produksi tanaman ekspor akan mendatangkan keuntungan baginya, sehingga utang negara dapat dilunasi.

Jenis-jenis tanaman yang terkena Sistem Tanam Paksa yang paling utama adalah kopi, tebu dan nila (indigo/bahan pewarna). Sedangkan tanaman yang tidak termasuk kategori ekspor yang paling banyak dibutuhkan hanya ditanam dalam skala kecil, antara lain tembakau, lada, teh, dan kayu manis. Komoditi tersebut ditanam pada 1/5 bagian tanah penduduk, kecuali kopi yang ditanam di tanah-tanah yang belum digarap.⁸

Sesuai dengan Lembaran Negara (*Staatsblad*) tahun 1834, No. 22, Sistem Tanam Paksa dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melalui persetujuan, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa.
2. Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi.
4. Bagian tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
5. Hasil tanaman perdagangan yang berasal dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda; apabila nilai hasil

⁸ Mubyarto, dkk. *loc.cit*, hlm, 20.

tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.

6. Kegagalan panen tanaman perdagangan harus dibebankan kepada pemerintah, terutama apabila kegagalannya bukan disebabkan oleh kelalaian penduduk.
7. Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala mereka, dan pegawai-pegawai Eropa membatasi pengawasannya pada segi-segi teknis dan ketepatan waktu dalam pembajakan tanah, panen dan pengangkutan.⁹

Dalam pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, van den Bosch menghendaki peningkatan campur tangan orang-orang Eropa dalam proses produksi. Selama pelaksanaan Sistem Tanam Paksa para pejabat Eropa (pejabat pemerintahan Hindia Belanda) hanya bertugas sebagai pengawas (kontroler). Bila, dalam sistem sewa tanah terdapat pemisahan antara pemerintah dan kehidupan perusahaan, maka van den Bosch menghendaki adanya penyatuan kembali antara pemerintah dan kehidupan perusahaan dalam menangani produksi tanaman ekspor. Pemerintah yang mengorganisir proses penanaman melalui alat birokrasinya, sedangkan para pengusaha Barat ditugaskan untuk menangani pengolahan produksi di pabrik-pabrik pengolahan.

Dalam penyelenggaraan Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*), pihak Belanda berusaha agar sedapat mungkin tidak berhubungan langsung dengan

⁹ G. Gonggrijp, 1939; Schets eener Economische Geschiedenis Van Nederlandsch- Indie, Haarlem: Bohn, hlm. 107-125; Sartono dkk, 1977, Sejarah Nasional Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka. Jilid IV, hlm. 76-77 dalam Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, Yogyakarta, Aditya Media, 1994, *op.cit*, hlm. 55

petani. Oleh sebab itu penyelenggaraannya diserahkan kepada para bupati dan para kepala desa. Kepentingan pemerintah hanya pada hasilnya, yang dihitung dalam *pikol*¹⁰ yang diterima oleh gudang-gudang pemerintah¹¹, misal di daerah Jawa Tengah, yaitu Bagelen dan Banyumas yang menghasilkan 51% indigo bagi pemerintah.

Pemerintah kolonial menetapkan 75 hari dalam setahun adalah hari untuk rakyat bekerja di perkebunan, namun dalam prakteknya kadang-kadang melebihi sekitar 75 hari. Tanah-tanah yang harus dikerjakan oleh rakyat sekitar 1/5 sampai 1/3 atau 1/2 luas tanah yang harus digarap, akan tetapi kadang-kadang rakyat harus mengerjakan seluruh tanah desa. Tanah-tanah yang mereka kerjakan adalah tanah-tanah *para sikep*¹² yang telah diambil alih oleh pemerintah desa dan dibagikan kepada *para numpang*¹³ atau *bujang*¹⁴ dan mewajibkan *para bujang* dan *numpang* untuk membuka areal baru di desa setempat. Sedangkan, rakyat yang tidak mempunyai tanah harus bekerja sebagai buruh/kuli perkebunan.

Para petani ini mengerjakan wilayah desa yang ditentukan sebagai wilayah untuk tanam paksa (*tanah lanyah* (tanah becek atau berlumpur)/*tanah kongsen*) dengan kerja wajib bergilir dan bersama-sama. Selain itu, penduduk desa juga tetap diwajibkan mengerjakan tanah-tanah gaji para priyayi bupati (kepala daerah yang meliputi wilayah kabupaten) dan pejabat *wedana*¹⁵ atau kepala desa dengan

¹⁰ (1 *pikol* (Hindia Belanda = 61,76 kg = 0,06 ton (Britania)

¹¹ R.Z. Leirissa dkk, *Sejarah Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996, hlm. 55-56.

¹² *Sikep* adalah pemilik tanah garapan; pemilik tanah komunal; bersama-sama ialah petani yang berada.

¹³ *Numpang* adalah petani pemilik rumah di pekarangan orang lain.

¹⁴ *Bujang* adalah buruh tani, tani hamba.

¹⁵ *Wedana* adalah kepala golongan priyayi atau kepala distrik.

imbalan makan, dan kewajiban kerja bakti membangun gedung, jalan, rel kereta, irigasi dan menjaganya secara bergiliran tanpa digaji. Kesemuanya menjadi tanggung jawab lurah untuk melakukan koordinasi.¹⁶ Selain itu, petani menanggung kegagalan panen atas hasil produksi perkebunan.

Jarak yang ditempuh petani menuju perkebunan cukup jauh, mengakibatkan rakyat sering dipindahkan ke tempat yang jauh dari desanya. Sebagai contoh, penanaman kopi harus dirawat setiap hari untuk menghasilkan produksi yang berkualitas dengan jarak tempuh sekitar 28 mil¹⁷ (44,8 km) dari tempat tinggalnya (desanya). Menurut D.H Burger, orang-orang harus bekerja sampai 15 atau 30 pal (1 pal = 1½ km) untuk penanaman tebu dengan mengabaikan tanah-tanah pertanian mereka sendiri. Itu membuktikan jarak yang harus ditempuh oleh para petani sangat berat sekali, demi penanaman dan pemeliharaan tanaman ekspor. Tak jarang petani harus meninggalkan desa untuk menetap sementara di tempat baru dan asing. Banyak diantara mereka yang harus meninggalkan istri, anak maupun sanak keluarganya hanya untuk bekerja pada Sistem Tanam Paksa. Jika mereka ini melalaikan pekerjaannya untuk kepentingan Tanam Paksa, *sinder-sinder*¹⁸ Belanda dan mandor-mandor *inlander*¹⁹ sudah siap untuk menghukum para petani dengan pukulan rotan yang amat ditakuti itu.²⁰ Perlakuan tersebut demi meningkatkan produksi perkebunan berkualitas tinggi.

¹⁶ (Prisma:1991) dalam <http://ppijkt.wordpress.com/2007/12/16/pola-penguasaan-tanah-era-tanam-paksa/> diakses pada hari kamis tanggal 10 Juni 2010 karangan Iwan Nurdin

¹⁷ 1 mil = 1,609344 kilometer = 1,6 km

¹⁸ Menurut W.J.S Poerwadarminta (1976: 949), *Sinder* adalah pengawas orang bekerja (di kebun tebu dll)

¹⁹ *Inlander* adalah orang-orang pribumi atau suku-suku pribumi Indonesia.

²⁰ HM. Nasruddin Anshoriy Ch, *Bangsa Gagal : Mencari Identitas Kebangsaan*. Yogyakarta, LkiS, 2008, hlm. 99.

Para petani bekerja keras agar tidak dipukuli oleh mandor-mandor *inlander* dan *sinder-sinder* Belanda.

Pemerintah kolonial Belanda menetapkan harga produksi perkebunan, dan rakyat tidak bisa menjual hasil produksi perkebunan kepada siapa saja. Petani harus menjualnya kepada pemerintah, sehingga petani sangat terbebani karena sebelum ditetapkannya harga produksi perkebunan oleh pemerintah kolonial Belanda, mereka telah terbiasa menjual hasil perkebunan kepada tengkulak-tengkulak (*pengepul*).

Sejak munculnya pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, telah terjadi pembatasan-pembatasan terhadap orang pribumi. Dengan diterapkannya Sistem Tanam Paksa rakyat jauh lebih terbebani. Mereka terbebani dengan kerja paksa. Menurut hasil laporan kaum liberal Belanda, selama diterapkannya Sistem Tanam Paksa telah terjadi berbagai macam penyimpangan tenaga maupun tanah (berbanding terbalik dengan Lembaran Negara/ *Staatsblad*). Contoh, penduduk di daerah Rembang dengan jumlah 34.000 keluarga misalnya, dipaksa untuk bekerja di lahan tanaman wajib dengan waktu yang telah ditentukan yaitu selama 8 bulan dalam satu tahun, dengan upah yang rendah yaitu tiga *duit* (5/6 sen) sehari. Seperti penduduk di Rembang, sejumlah penduduk desa di distrik Simpung (Priangan) pernah dikerahkan untuk penanaman nila selama 7 bulan, yang jaraknya jauh dari tempat tinggal mereka. Dari distrik yang sama, juga pernah dikerahkan 5.000 orang laki-laki dengan 3.000 ekor kerbau untuk mengerjakan tanah milik pabrik.²¹ Sering para pejabat pemerintahan kolonial Belanda dan

²¹ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *ibid*, hlm. 63-64.

pejabat pribumi seperti kepala desa dan bupati melakukan penyimpangan, seperti penyerahan tanah dan tenaga kerja paksa yang melebihi ketentuan.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas tampak bahwa selama pelaksanaan Sistem Tanam Paksa muncul penyimpangan-penyimpangan yang menyengsarakan rakyat (tidak sesuai dengan Lembaran Negara/ *Staatsblad*). Sistem Tanam Paksa merupakan salah satu kebijakan Belanda dalam mencari pendapatan bagi kas negara Belanda yang pada saat itu sedang mengalami krisis keuangan. Skripsi ini akan memfokuskan pada dampak Sistem Tanam Paksa bagi masyarakat Jawa, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, ialah:

1. Bagaimana dampak Sistem Tanam Paksa bagi masyarakat Jawa dalam bidang ekonomi?
2. Bagaimana dampak Sistem Tanam Paksa bagi masyarakat Jawa dalam bidang politik?
3. Bagaimana dampak Sistem Tanam Paksa bagi masyarakat Jawa dalam bidang sosial-budaya?

Dari permasalahan pertama akan dibahas mengenai dampak positif dan dampak negatif yang diakibatkan oleh pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Dampak pertama merupakan dampak positif, yaitu mengenai pengenalan dan perkembangan ekonomi uang pada tahun 1840-1860-an, pertumbuhan kemakmuran masyarakat Jawa pada tahun 1830-1870, dan perkembangan alat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengangkutan pada tahun 1830-1864 dengan munculnya kereta api. Sedangkan dampak kedua merupakan dampak negatif, yaitu mengenai tergesernya tanaman pangan dan akibatnya pada tahun 1830-1870 serta mengenai pungutan sewa tanah dan pajak tanah yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1830-1870.

Dari permasalahan kedua akan dibahas mengenai dampak negatif yang diakibatkan oleh pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Dampak negatif, yaitu mengenai perubahan kedudukan (jabatan) bupati dalam kehidupan masyarakat Jawa, peran bupati dalam kehidupan masyarakat Jawa serta birokrasi pemerintahan.

Dari permasalahan ketiga akan dibahas mengenai dampak negatif dan dampak positif yang diakibatkan oleh pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Dampak pertama merupakan dampak negatif yaitu, mengenai pengalihan tanah untuk perkebunan pada tahun 1830 sampai munculnya Undang-undang Agraria tahun 1870, pengerahan tenaga kerja untuk perkebunan pada tahun 1830-1850-an, pertumbuhan dan penurunan jumlah penduduk Jawa pada tahun 1830-1870, perubahan sosial di masyarakat Jawa, dan perubahan kebudayaan masyarakat Jawa pada tahun 1830-1870-an. Sedangkan dampak kedua merupakan dampak positif, yaitu munculnya pendidikan model Barat pada tahun 1848-1852 dengan dibukanya sekolah untuk anak-anak bangsawan pribumi. Selain itu, dengan adanya dampak yang ditimbulkan oleh Sistem Tanam Paksa baik yang berupa dampak positif maupun dampak negatif, ada sebagian pihak-pihak yang pro dan kontra, misal dari pihak pemimpin atau pembesar-pembesar tingkat rendahan

yang tidak mempunyai kedudukan penting, sedangkan rakyat bersikap acuh tak acuh karena merupakan sebagai beban dan kewajiban tradisional.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Penulisan ini secara umum diarahkan untuk menjawab berbagai masalah yang berkaitan tentang dampak Sistem Tanam Paksa bagi masyarakat Jawa tahun 1830-1870. Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak Sistem Tanam Paksa bagi masyarakat Jawa dalam bidang ekonomi.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak Sistem Tanam Paksa bagi masyarakat Jawa dalam bidang politik.
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak Sistem Tanam Paksa bagi masyarakat Jawa dalam bidang sosial-budaya.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan ini adalah :

- a. Bagi Universitas Sanata Dharma

Untuk melaksanakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian untuk Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan penulisan ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya khasanah pustaka.

- b. Bagi Prodi Pendidikan Sejarah

Untuk menambah kepustakaan prodi pendidikan sejarah dalam meningkatkan program belajar mengajar khususnya materi sejarah Indonesia madya dan sejarah ekonomi Indonesia.

c. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya sejarah Indonesia tentang dampak Sistem Tanam Paksa bagi masyarakat Jawa tahun 1830-1870.

d. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang dampak Sistem Tanam Paksa bagi masyarakat Jawa tahun 1830-1870.

D. Tinjauan Pustaka

Sumber merupakan unsur pokok dalam penulisan sejarah karena itu sumber sejarah dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ialah sumber yang keterangannya diperoleh secara langsung dari yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri.²² Louis Gottschalk juga menekankan bahwa sumber primer tidak perlu “asli”²³ tetapi sumber primer itu hanya harus “asli” dalam artian kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain melainkan berasal dari sumber pertama.²⁴ Dengan demikian sumber

²² Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, Jakarta, Yayasan Idayu, 1978, hlm. 37.

²³ Asli yang dimaksud di sini adalah bahwa dari sumber yang ada dalam peristiwa tersebut.

²⁴ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta, UI Pres, 1969, hlm. 36.

primer harus dihasilkan oleh seseorang yang sejamin dengan peristiwa yang dikisahkan.²⁵

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa sumber tertulis yang diperoleh melalui buku-buku. Buku-buku yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia. Buku ini disunting oleh Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1987. Data statistik yang terdapat dalam buku ini beberapa diantaranya berasal dari sumber primer, sehingga buku ini dapat menjelaskan berbagai perkembangan data statistik perekonomian Indonesia dari masa VOC, Hindia Belanda sampai tahun 1900-an. Selain itu, buku ini menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk Jawa pada masa Sistem Tanam Paksa. Perkembangan perekonomian Indonesia dilihat dengan munculnya perbankan di Indonesia yang berdampak pada meluasnya sistem ekonomi uang di masyarakat pedesaan.

Sistem Tanam Paksa Di Jawa, karya Robert van Niel, diterbitkan oleh LP3ES, Jakarta 2003. Buku ini bukan sumber primer akan tetapi data-data yang terdapat dalam buku ini merupakan sumber primer seperti memo dan laporan-laporan kerja. Dalam buku ini, diceritakan tentang pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa serta peraturan-peraturan yang berlaku pada masa Sistem Tanam Paksa.

Sejarah Perkebunan di Indonesia, karya Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, diterbitkan oleh Aditya Media, Yogyakarta 1994. Data-data yang terdapat

²⁵ *ibid*, hlm. 35.

dalam buku ini merupakan sumber primer, diantaranya memuat gambaran data pada sektor perkebunan dalam perspektif historis, dengan tekanan mengenai latar belakang, pertumbuhan dan perkembangan, serta perubahan yang mempengaruhi kehidupan di perkebunan dari masa VOC, masa pemerintahan kolonial, masa kemerdekaan, dan masa pasca kemerdekaan.

Anak Jajahan Belanda ; Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880, ditulis oleh Peter Boomgaard yang merupakan terjemahan, diterbitkan oleh Djambatan, 2004. Buku ini bukan sumber primer akan tetapi data-data yang terdapat dalam buku ini merupakan sumber primer diantaranya menceritakan tentang pertumbuhan penduduk yang pesat di Jawa selama abad kesembilan belas dengan perkembangan ekonomi dan sosial yang terjadi di Jawa selama kurun waktu 1795-1880.

Hindia Belanda : Studi tentang Ekonomi Majemuk, ditulis oleh J.S Furnivall, diterbitkan oleh Freedom Institute, Jakarta, 2009. Data-data yang terdapat dalam buku ini banyak yang diambil dari sumber primer diantaranya menyajikan tentang sejarah ekonomi dan politik yang terperinci tentang Hindia Belanda dari masa VOC sampai merdeka, khususnya tentang perubahan dalam kebijakan, administrasi dan politik di Hindia Belanda, di samping pemilikan tanah, pertanian, ekspor, impor, tingkat pendidikan, dari golongan pribumi Indonesia, tingkat pendapatan dari berbagai golongan masyarakat, kesempatan kerja, perburuhan dan keuangan, semuanya dijelaskan sangat terperinci dan analisis.

Sejarah Ekonomi Indonesia, ditulis oleh Anne Booth dkk, diterbitkan oleh LP3ES, Jakarta, 1988. Data-data yang terdapat dalam buku ini banyak yang berasal dari sumber primer diantaranya menyajikan berbagai tulisan dari beberapa sejarawan yang menjelaskan perekonomian Indonesia serta masalah-masalah semasa diberlakukannya Sistem Tanam Paksa. Pandangan para penulis mengenai Sistem Tanam Paksa bermacam-macam, diantaranya ada yang memberikan pendapat tentang Sistem Tanam Paksa membawa keuntungan bagi masyarakat Jawa dan pemerintah Belanda. Selain itu, ada yang menolak karena Sistem Tanam Paksa mendatangkan kesengsaraan bagi masyarakat Jawa.

Selain sumber primer di atas penulis menggunakan sumber sekunder. Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.²⁶ Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

Cilacap (1830-1942) : Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa, ditulis oleh Susanto Zuhdi, diterbitkan oleh KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta 2002. Buku ini menceritakan Cilacap sebagai pelabuhan baru dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*). Pelabuhan ini pernah menjadi salah satu pintu gerbang ekspor impor yang paling aktif pada zaman Hindia Belanda. Kejayaan itu meredup seiring dengan meluasnya pembangunan jalan raya di Jawa pada paruh pertama dekade 1920-an.

²⁶ *idem*, hlm. 35.

Pembangunan itu, yang mestinya membawa kemaslahatan²⁷ umum, ternyata justru mengucilkan Cilacap dari derap langkah perekonomian dunia.

Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan, kajian Sosial Ekonomi, ditulis oleh Mubyarto dkk, diterbitkan oleh Aditya Media, Yogyakarta 1993. Buku ini menjelaskan tentang masalah tenaga kerja perkebunan yang telah tampak embrionya sejak diperkenalkan sistem perkebunan yang bercorak liberal kapitalistik di tanah jajahan Hindia Belanda pada tahun 1870. Sejak masa itu tenaga kerja (buruh) benar-benar hanya dianggap salah satu faktor produksi yang meskipun peranannya penting namun dihargai jauh lebih rendah ketimbang sumber daya modal dan teknologi.

Jawa Bandit-bandit Pedesaan, studi Historis 1850-1942, ditulis oleh Suhartono W. Pranoto, diterbitkan oleh Graha Ilmu, Yogyakarta 2010. Buku ini menjelaskan tentang “bandit”, khususnya bandit sosial yang membela kepentingan dan nasib wong cilik. Namun dari kacamata kolonial jelas pelakunya bandit atau pengacau yang mengganggu keamanan. Perbanditan ini merupakan bentuk protes yang dilakukan oleh wong cilik yang tindakannya merupakan kekuatan aksi untuk menghentikan eksploitasi kolonial.

Sejarah Perekonomian Indonesia, ditulis oleh R.Z.Leirissa dkk, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta 1996. Buku yang menjelaskan perekonomian Indonesia dari masa Prasejarah sampai Orde Baru ini memberikan gambaran yang lengkap tentang perkembangan perekonomian Indonesia.

²⁷ Kemaslahatan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan)

Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, penyunting Soediono.M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wirada. Buku kumpulan karya tulis dari beberapa sejarawan, diterbitkan oleh Yayasan Obor, Jakarta, 2008, ini menjelaskan tentang tanah-tanah pribumi yang dikuasai oleh kolonial dari masa ke masa. Karangan yang saya gunakan dalam buku ini adalah karya Onghokham dan H. Kano. Karangan Onghokham menjelaskan tentang pola penguasaan tanah dan hubungan perpajakan, sedangkan karangan H. Kano menganalisis berbagai hak atas tanah (*title to land*) pada tanah sawah, tanah kering, dan pekarangan. Bentuk-bentuk penguasaan atas tanah yang bersifat individual atau komunal.

Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologi : Sampai Akhir Abad ke XIX, ditulis oleh D.H. Burger, yang merupakan terjemahan sekaligus dikarang dan disusun kembali sesuai pandangan nasional oleh Prajudi Atmosudirdjo, diterbitkan P.T Pradaya Paramita, Jakarta, 1957. Buku ini berisi tentang perkembangan ekonomi Indonesia ditinjau dari sosiologi masyarakat Indonesia yang menitikberatkan pada pandangan usaha ekonomi, perubahan struktur masyarakat, perkembangan pola ekonomi dan perubahan aturan-aturannya.

Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa, hasil terjemahan dari penulis D.H Burger, diterbitkan Bhratara Karya Aksara, Jakarta 1983. Buku ini menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat Jawa akibat kedatangan Belanda ke Jawa. Perubahan-perubahan yang terjadi yaitu dengan “penghapusan sistem feodal masyarakat dengan sistem yang lebih modern”.

Djawa Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Demografis, buku ini ditulis oleh J.C Breman yang merupakan hasil terjemahan Sugarda Purbakawatja, diterbitkan oleh Bhratara, Djakarta, 1971. Buku ini menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk Jawa dari masa VOC sampai tahun 1900-an.

Mitos Pribumi Malas : Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial, ditulis oleh S.H Alatas, diterbitkan LP3ES, Jakarta, 1988. Buku ini menceritakan tentang sifat dan kriteria masyarakat Jawa, Melayu dan Filipina semasa Kolonial.

E. Landasan Teori

Sebelum masuk dalam pembahasan skripsi yang berjudul “ *Dampak Sistem Tanam Paksa bagi Masyarakat Jawa tahun 1830-1870* “, akan dijelaskan beberapa konsep dalam penulisan ini. Konsep-konsep tersebut adalah sistem, sistem ekonomi negara, sistem ekonomi kolonial dan Sistem Tanam Paksa. Penjelasan ini sangat penting karena merupakan landasan berpikir dan pembatasan masalah dalam menjelaskan Sistem Tanam Paksa dan dampaknya bagi masyarakat Jawa.

Sistem merupakan istilah dari bahasa Yunani “*systema*” yang artinya adalah himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama.²⁸ Selain itu, sistem merupakan alat yang paling baik untuk memajukan ilmu politik, untuk menahan desakan sekelompok kecil kaum

²⁸<http://www.mail-archive.com/e-ketawa@yahoogroups.com/msg46282.html> diakses tanggal 22 september 2010 pada pukul 02.25 pm.

institusionalis tradisional yang tidak jelas arahnya.²⁹ Sedangkan van Niel menjelaskan sistem adalah suatu susunan pikiran dan objek yang tertata runtut serta logis di dalam keseluruhan yang rumit berdasarkan atas beberapa skema yang dijiwai oleh prinsip-prinsip dasar ekonomi dan sosial.³⁰ Dengan demikian, sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lainnya yang memiliki komponen-komponen tertentu.

David Easton dalam bukunya *A Framework for Political Analysis* mengikhtisarkan teori sistem itu demikian :

biasanya, analisa sistem.....beranjak dari pemikiran tentang kehidupan politik yang merupakan perangkat batas yang memelihara pelbagai interaksi yang telah berjalan dan yang dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang secara tetap mempengaruhi perwujudan....sistem yang terbuka (seperti sistem politik) yang memungkinkan orang bisa menanggulangi persoalan-persoalan yang timbul dari lingkungan sistem tersebut.³¹

Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian.³² Sistem ekonomi ditentukan oleh jaringan kelembagaan ekonomi dan hubungan kerjanya dalam ruang lingkup suatu negara, memecahkan masalah-masalah ekonomi untuk mencapai cita-cita bangsa.³³ Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai :

²⁹ Bertram Gross dalam tinjauan oleh D. Easton, *A Systems Analysis of Political Life* (New York: John Wiley, 1965), APSR, 1967, hlm 155-158 dalam Martin, Roderick, 1990, *Sosiologi Kekuasaan*, Jakarta, Rajawali, hlm. 1-2.

³⁰ Van Niel, Robert, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, Jakarta, LP3ES, 2003, hlm 155

³¹ D. Easton, *A Framework for Political Analysis* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1965) hlm 25 dalam Roderick Martin, 1990, *Sosiologi Kekuasaan*, Jakarta, Rajawali, hlm. 3.

³² http://www.e-dukasi.net/mapok/mp_full.php?id=157&fname=pengertian.html diakses pada tanggal 30 Oktober 2010

³³ Sri-Edi Swasono (Ed), *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1985, hlm. 59.

- a. Sarana pendorong untuk melakukan produksi.
- b. Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu.
- c. Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik.

Sistem ekonomi sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang terjadi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:³⁴

a. Sistem ekonomi tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama (demokratis), sesuai dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya. Dalam sistem ini segala barang dan jasa yang diperlukan, dipenuhi sendiri oleh masyarakat itu sendiri. Jadi sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang diterapkan masyarakat jaman dahulu dimana ketika itu belum adanya perkembangan teknologi dan manusia masih mengandalkan hidupnya pada sumber daya alam dan sumber daya manusia itu sendiri. Sistem ekonomi ini lebih mengutamakan kepentingan bersama, jadi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat saling membantu dengan menggunakan sistem barter.³⁵

b. Sistem ekonomi pasar (liberal/bebas)

Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini bersifat membebaskan individu

³⁴ <http://thinkquantum.wordpress.com/2009/12/08/pengertian-sistem-ekonomi/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2010

³⁵ <http://www.membuatblog.web.id/2010/08/sistem-ekonomi-tradisional.html> diakses pada tanggal 30 Oktober 2010

untuk bertindak sesuka hati sesuai kepentingan dirinya sendiri dan membiarkan semua individu untuk melakukan pekerjaan tanpa pembatasan yang nantinya dituntut untuk menghasilkan suatu hasil yang terbaik. Dengan kata lain, menyajikan suatu benda dengan batas minimum yang diminati dan disukai oleh masyarakat (konsumen).³⁶

c. Sistem ekonomi campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Ciri dari sistem ekonomi campuran adalah :

- 1) Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat.
- 2) Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
- 3) Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.
- 4) Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang.
- 5) Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando, dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.³⁷

d. Sistem ekonomi komando (terpusat)

Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Sistem ini

³⁶ http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/31001-5-7-0-5-6-3-9-0-38228.pdf diakses pada tanggal 30 Oktober 2010

³⁷ <http://thinkquantum.wordpress.com/2009/12/08/pengertian-sistem-ekonomi/> op.cit

pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi³⁸. Menurut Winardi sistem ekonomi komando adalah sistem-sistem ekonomi di mana pemerintah menyalurkan sumber-sumber daya untuk tujuan memutuskan apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi dan untuk siapa hasil produksi diperuntukkan.³⁹

Peran negara beserta aparatur ekonomi negara sangat penting, tetapi tidak dominan supaya tidak tumbuhnya sistem etatisme (serba negara).⁴⁰ Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam serta merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan “ hak menguasai “, perlu dijaga supaya sistem yang berkembang tidak menjurus ke arah etatisme. Oleh karena itu “ hak menguasai oleh negara “, harus dilihat dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban negara sebagai : pemilik, pengatur, perencana, pelaksana dan pengawas. Berdasarkan lima dasar ekonomi negara, negara menempatkan dalam kedudukannya untuk menguasai lingkungan alam, sehingga “ hak menguasai “, bisa dilakukan dengan memiliki sumber daya alam atau tanpa memiliki sumber daya alam, namun mewujudkan hak menguasai itu melalui jalur pengaturan, perencanaan dan pengawasan.⁴¹ Menurut Winardi peran negara (pemerintah)

³⁸ <http://thinkquantum.wordpress.com/2009/12/08/pengertian-sistem-ekonomi/> op.cit

³⁹ Winardi, *Kapitalisme versus Sosialisme; suatu analisis ekonomi teoritsi*, Bandung, Remadja Karya CV Bandung, 1986, hlm 49-50

⁴⁰ Sri-Edi Swasono *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁴¹ *ibid*, hlm. 61.

dapat dikatakan adalah esensial bagi eksistensi kapitalisme.⁴² Sedangkan Marx menjelaskan, peran negara (pemerintah) adalah:

“ tidak lain dari kekuasaan kolektif yang terorganisasi dari klas-klas yang memiliki harta kekayaan. Ia sebuah badan yang dikendalikan oleh kaum borjuis untuk memajukan kepentingan mereka sendiri, dan kekuasaannya kian bertambah sewaktu antagonisme klas di dalam negara semakin meruncing, maka negara merupakan alat penindasan”.⁴³

Ciri dari sistem ekonomi negara adalah :

- 1) Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah.
- 2) Hak milik perorangan tidak diakui.
- 3) Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian.
- 4) Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah.⁴⁴

Ekonomi negara merupakan ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah atau negara. Ekonomi ini tidak akan lepas dari yang namanya kekuasaan. Robbert Keohane menyatakan bahwa “ ketika dalam sebuah perekonomian, pelaku menerapkan kekuasaan pada pelaku lain, maka perekonomian itu bersifat politis”.⁴⁵ Menurut Pareto, kekuasaan selalu menimbulkan kemungkinan atau ancaman bahwa akan ada pihak tertentu yang akan dirugikan.⁴⁶ Jadi. kekuasaan merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan kita di dunia, artinya untuk mencapai tujuan maka orang harus melakukan sesuatu untuk mempengaruhi dan

⁴² Winardi, *ibid.*, hlm. 38.

⁴³ Winardi, *ibid.*, hlm. 191.

⁴⁴ <http://yanoe46.wordpress.com/2010/06/02/pengertian-sistem-ekonomi/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2010

⁴⁵ Caporaso, James A. & P. Levine, David, *Teori-Teori Ekonomi Politik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 390.

⁴⁶ Caporaso, James A. & P. Levine, David, *ibid*, hlm. 388.

mengubah di dunia sekitarnya.⁴⁷ Maka, kekuasaan mempunyai fungsi untuk mengesahkan atau melegitimasi hubungan kekuasaan atau dengan kata lain upaya untuk menciptakan struktur kewenangan politik yang selalu ditandai dengan adanya upaya untuk menciptakan kesediaan masyarakat luas untuk menerima pelaksanaan negara.⁴⁸

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (*relationship*), dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah (*the ruler and the ruled*) ; satu pihak yang memberi perintah, satu pihak yang mematuhi perintah. Tidak ada persamaan martabat, yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Perintah selalu ada unsur paksaan dalam hubungan kekuasaan.⁴⁹ Kekuasaan yang didasarkan atas pengendalian tingkah laku sosial melalui paksaan yang berfokus kepada negara adalah kekuasaan sosial.⁵⁰ Menurut pemikir psikologi, tingkah laku dapat dimasukkan ke dalam psikologi sosial. Psikologi sosial adalah psikologi yang khusus membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial.⁵¹

Berdasarkan pidato pembukaan sidang Volksraad Gubernur Jenderal Arthur Greenwwood yang berisi tentang peran negara atau pemerintah ialah :

“Kalau pemerintah semakin banyak mengadakan peraturan terhadap perekonomian, hal itu bukan menjatakan, bahwa pemerintah menjangka jang ia sanggup mengerdjakan sendiri segala urusan ekonomi. Sebaliknja, pemerintah insaf bahwa negara dan kekuasaan negara itu tidak memangku semuanya; ia tetap suka melihat inisiatif dari pihak masjarakat, melihat orang mendjalankan pikirannja dan

⁴⁷ *ibid* hlm. 391.

⁴⁸ *ibid* hlm. 392.

⁴⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia, 1982, hlm. 35-36.

⁵⁰ *ibid*, hlm. 37.

⁵¹ H. Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992, hlm 7-9

melakukan tindakannya. Ia menghargai usaha yang timbul dari pangkuan masyarakat sendiri dan ingin menghormati awaknya (persoonlijkheid) orang. Juga dalam hal yang perlu dijalankan menurut timbangan pemerintah sendiri, pemerintah lebih suka akan bekerja bersama-sama dengan golongan atau orang, yang bersangkutan atau yang ahli dalam hal itu.

Akan tetapi segala usaha ekonomi mestilah dilakukan menurut peraturan yang diadakan oleh pemerintah, untuk menjapai perhubungan yang baik dalam masyarakat serta keadilan sosial”.⁵²

Sebelum bangsa Indonesia merdeka, ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi penjajah (pemerintah Hindia Belanda), ekonomi ini merupakan ekonomi negara. Hubungan antara daerah jajahan dan negara (bangsa penjajah) bermula dari pencarian nafkah atau soal rejeki.⁵³ Struktur ekonomi kolonial adalah struktur ekonomi yang berorientasi terpusat atau “ mengabdikan ” pada kepentingan negeri induk atau negara penjajah. Menurut teori kolonial masa itu, orang Eropa memperoleh hak kedaulatan atas tanah dan rakyat jajahan melalui perjanjian dan penaklukan, mereka memanfaatkannya sesuai dengan keputusan yang dinilai baik.⁵⁴ Pusat ekonominya adalah kepentingan penduduk atau pemerintah negara induk. Bagi Belanda, Indonesia merupakan tempat untuk berdagang sekaligus mendapatkan rempah-rempah termasuk cengkeh, pala, kayu manis dan lada. Melihat keadaan bangsa Indonesia yang sifat berdagangnya lebih “terbelakang”, kemudian meluas menjadi menguasai, memerintah, mengajar, menolong dll, yang berdasarkan atas kepentingan mencari keuntungan.⁵⁵

⁵² Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan*, Djakarta, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1954, hlm. 25.

⁵³ Ir. Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, jilid I cet ke 3, 1964, hlm 51-55 dalam Soetrisno P. H, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta, Andi Offset, 1992, hlm. 139.

⁵⁴ Robert Van Niel, *ibid*, hlm. 156.

⁵⁵ Soetrisno P. H, *ibid.*, hlm. 140.

Orientasi ekonomi dari VOC ke Hindia Belanda tetap pada kepentingan bangsa induk (pemerintah Belanda). Daerah jajahan tetap sebagai tempat mengadu untung, tempat mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Fungsi daerah jajahan adalah tempat berdagang dan tempat investasi. Mereka berdagang dan menanamkan investasi sudah tentu dengan cara-cara mereka dalam artian melalui teknik dan cara yang lebih maju (lebih rasional dan lebih efisien), maka dapat dibandingkan dengan cara-cara dan teknik yang dipergunakan oleh orang-orang jajahan.⁵⁶ Pola ekonomi kolonialisme membedakan antara pemilik modal dan buruh, mempertajam strata sosial di desa. Masyarakat desa secara tajam dapat dibedakan antara petani yang mempunyai sawah dan pekarangan luas (kaya), dengan mereka yang tidak memiliki (miskin). Kelompok miskin ini bekerja sebagai buruh tani. Mereka mendapat kesempatan menanam tanaman, tetapi jenis tanaman sudah ditentukan.⁵⁷

Usaha Belanda memberikan manfaat terhadap daerah jajahan di samping juga menimbulkan kerugian dengan demikian orang tidak dapat menyangkalnya. Daerah jajahan menjadi tempat mendapatkan dan mengusahakan bahan mentah, hasil tambang, bahan galian dll. Selain itu daerah jajahan merupakan tempat pemasaran hasil produksi negara induk, kemudian membutuhkan tenaga penduduk daerah jajahan.⁵⁸ Konsekuensi negara induk terhadap daerah jajahan melaksanakan proses pendidikan (formal dan non formal), membuat saluran irigasi, bendungan, jalan, pelabuhan dan infrastruktur serta publik utilitas lain

⁵⁶ *ibid.*, 140-141,

⁵⁷ A. Nunuk P. Murniati, *Perempuan Indonesia dalam perspektif agama, budaya, dan keluarga*, cet 1, Magelang, Yayasan Indonesia Tera, 2004, hlm. 136-137.

⁵⁸ Soetrisno P. H, *op.cit.*, hlm. 141-142.

yang menguntungkan penduduk daerah jajahan. Secara ekonomi, daerah jajahan merupakan tempat mencari barang-barang dagangan, tempat investasi modal, tempat mendapatkan dan mengusahakan bahan-bahan mentah, hasil-hasil perkebunan bahan tambang dan galian, tempat mencari lapangan pekerjaan, dan tempat pemasaran produk hasil industri barang dan jasa.⁵⁹

Sistem ekonomi kolonial mewariskan struktur ekonomi yang sangat timpang. Struktur ekonomi terkait dengan kekuasaan dan kemampuan ekonomi-politik sehingga mereka yang masuk dalam kelompok atas meskipun jumlahnya sedikit namun menguasai dan menikmati banyak surplus perekonomian nasional. Hal yang berkebalikan menimpa kelompok ekonomi bawah yang jumlahnya mayoritas namun menguasai dan menikmati hasil produksi dalam taraf yang sangat minimal.⁶⁰ Gambaran riil perihal struktur ekonomi dapat diilustrasikan melalui hasil observasi Hatta yang memetakan struktur ekonomi Indonesia pada masa kolonial Belanda ke dalam tiga golongan besar:

- a. Golongan atas, yang terdiri dari bangsa Eropa (khususnya Belanda) yang menguasai dan menikmati hasil penjualan komoditi pertanian dan perkebunan di negeri jajahan mereka.
- b. Golongan menengah, yang 90% terdiri dari kaum perantara perdagangan, khususnya dari etnis Tionghoa (China), yang mendistribusikan hasil-hasil produksi masyarakat jajahan ke perusahaan besar dan ekonomi luaran. Dalam kelompok ini terdapat 10% bangsa

⁵⁹ *idem*.

⁶⁰ http://www.smecca.com/kajian/files/hslkajian/Kajian_Inovatif/1_Model/4_BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 1 November 2010

Indonesia yang mampu menguasai dan menikmati hasil perekonomian karena mempunyai kekuasaan (jabatan) tertentu (elit), itu pun berada di posisi paling bawah pada lapisan ini.

- c. Golongan bawah, yang terdiri dari massa rakyat pribumi yang bergerak pada perekonomian rakyat, yang tidak mampu menguasai dan menikmati hasil-hasil produksi mereka karena berada dalam sistem ekonomi kolonialis.⁶¹

Sistem Tanam Paksa adalah bagian dari ekonomi negara dan ekonomi kolonial sehingga merupakan kerja paksa yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial bagi rakyat Indonesia. Penyebutan *Cultuurstelsel* sering kali salah tafsir menjadi Sistem Tanam Paksa. *Cultuurstelsel* sebenarnya merupakan suatu sistem pembudidayaan tanaman ekspor. Sistem Tanam Paksa merupakan suatu pemungutan pajak yang tidak berbeda dengan sistem VOC. *Cultuurstelsel* merupakan langkah kebijakan politik van den Bosch untuk menanggulangi keadaan politik di Hindia Belanda yang mulai tidak stabil. Sistem ini dirancang untuk memberi keuntungan bagi pemerintah Belanda dengan jalan menggunakan birokrasi adat istiadat masyarakat pribumi seperti melibatkan para bupati dan kepala desa. Perbandingan pemikiran Raffles dengan van den Bosch terhadap tanah jajahan terletak pada hasil dan tenaga kerja, Raffles ingin rakyat membeli barang dari Inggris sedangkan van den Bosch ingin rakyat bekerja untuk Belanda.⁶²

⁶¹*idem*

⁶² J.S Furnivall, (Terj) *Hindia Belanda studi tentang Ekonomi Majemuk*, Jakarta, Freedom Institute, 2009, hlm. 149.

Sistem Tanam Paksa pada dasarnya merupakan penyatuan antara sistem penyerahan wajib dan sistem pajak tanah. Rakyat membayar pajak dengan kopi dan dibebaskan dari semua pajak lain kecuali kewajiban tradisional mereka terhadap bupati; rakyat lebih makmur, puas dan tertib daripada di tempat yang rakyatnya harus membayar pajak tanah dengan uang.⁶³

Teori Raffles bertumpu pada pajak tanah sedangkan van den Bosch menghendaki pajak tanah diganti dengan pajak hasil pertanian atau *in natura* sebesar 2/5 dari hasil tanamannya, akan tetapi 1/5 bagian dari tanahnya harus ditanami oleh tanaman yang ditetapkan oleh pemerintah seperti nila, kopi, tembakau, kemudian harus diserahkan kepada pemerintah.⁶⁴ Sistem ini didasarkan atas pendapat van den Bosch yaitu:

“bahwa produk pertanian dapat dihasilkan secara lebih murah dengan pengerahan tenaga kerja paksa daripada dengan menggunakan orang Jawa sebagai buruh bebas. Tenaga buruh tidak dapat dimobilisasikan, jika tidak ada unsur penderitaan dan paksaan. “....mengalihkan pranata-pranata liberal dari suatu zaman yang sudah berkesadaran kepada suatu penduduk yang tidak berpengetahuan dan tunakarya, sama mustahilnya seperti menyadarkan orang yang sangat fanatik akan makna toleransi agama.”⁶⁵

Sistem Tanam Paksa pada mulanya berlandaskan sukarela akan tetapi pada tahun 1834 berlandaskan pada pemaksaan, misal rakyat dipaksa untuk menanam tanaman ekspor yang diminta pemerintah di tanah mereka sendiri.⁶⁶ Tuntutan

⁶³ *ibid* hlm. 123.

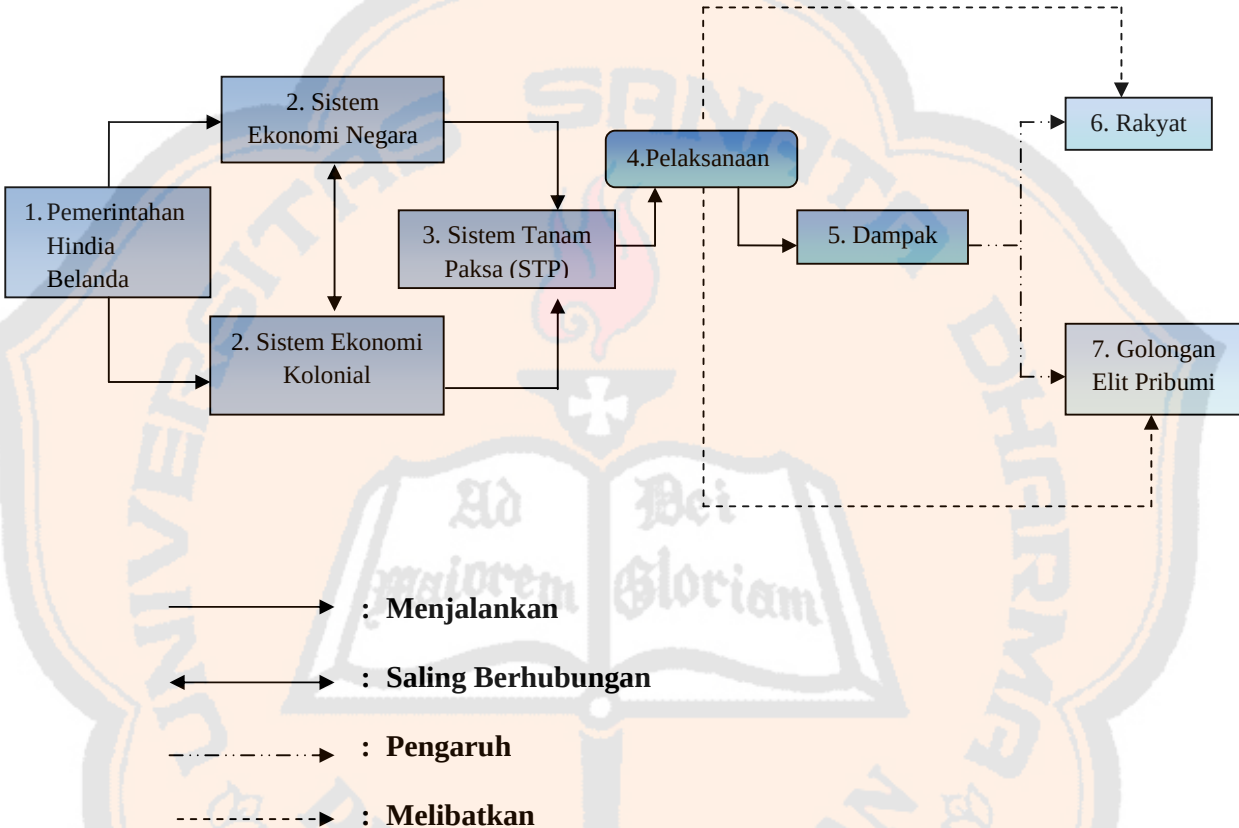
⁶⁴ Endang Suhendar dan Ifdhal Rasim, *Tanah Sebagai Komoditas, Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1966, hlm. 11.

⁶⁵ Van den Bosch dikutip Himawan, Ch, *The Foreign Investment Process....*, hlm. 152 dalam Ropke, Jochen, *Kebebasan Yang Terhambat, Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia, 1988, hlm. 171-172.

⁶⁶ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo *op.cit*, hlm. 55.

kerja paksa (rodi) atau pekerjaan tanam paksa diwajibkan hanya kopi. Penanaman kopi hampir semuanya dilakukan di tanah yang belum digarap.⁶⁷

Bagan landasan teori:



Keterangan Bagan:

1. Sejak awal kedatangan pemerintahan Hindia Belanda ke Indonesia, pemerintahan ini menjalankan sistem ekonomi yaitu, sistem ekonomi negara dan sistem ekonomi kolonial.
2. Sistem ekonomi negara dan sistem ekonomi kolonial saling berhubungan.

⁶⁷ *idem*

3. Hubungan sistem ekonomi negara dan sistem ekonomi kolonial menimbulkan sistem ekonomi baru, yaitu Sistem Tanam Paksa.
4. Awal pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, sistem ini membutuhkan berbagai unsur, diantaranya rakyat. Rakyat dijadikan sebagai pelaksana kegiatan ekonomi, sedangkan golongan elit pribumi dijadikan sebagai pendukung kegiatan ekonomi, sebab mereka adalah para penguasa di wilayahnya.
5. Sepanjang pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, sistem ini menimbulkan dampak.
6. Sistem Tanam Paksa berdampak terhadap rakyat.
7. Sistem Tanam Paksa berdampak terhadap golongan elit pribumi.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah, dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik yang dilakukan oleh penulis berdasarkan atas ketertarikan penulis terhadap Sistem Tanam Paksa yang diterapkan di Jawa dan berdasarkan kedekatan emosional serta kedekatan intelektual.

b. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah ialah heuristik atau pengumpulan sumber yang relevan untuk keperluan subyek yang diteliti. Sumber sejarah (disebut juga data sejarah) yang dikumpulkan harus

sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis.⁶⁸ Sumber data ini diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan maupun internet. Sumber data ini terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer (data primer) yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data statistik dari buku *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Sedangkan sumber sekunder diantaranya *Jawa Bandit-bandit Pedesaan, studi Historis 1850-1942, Sejarah Perekonomian Indonesia* dll.

c. Kritik Sumber (Verifikasi)

Tahap selanjutnya adalah verifikasi, yaitu kritik sumber atau pengujian terhadap data-data yang ada. Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah usaha mengetahui otentisitas sumber dengan melakukan penelitian fisik suatu sumber. Kritik ekstern mengarah pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber. Jenis-jenis fisik dari materi sumber, katakan dokumen atau arsip adalah kertas dengan jenis, ukuran, bahan, kualitas dll. Sedangkan kritik intern adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, artinya apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi, mengandung bias, dikecohkan dll.⁶⁹ Hasil dari kritik sumber adalah fakta-fakta yang merupakan unsur untuk melakukan rekonstruksi.

Contoh dari verifikasi dalam penulisan skripsi ini adalah ketika penulis menggunakan sumber dari *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan, kajian Sosial Ekonomi*, penulis membandingkan fakta-fakta data statistik yang terkandung

⁶⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Bentang Budaya, 2001, hlm. 96.

⁶⁹ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 36-37.

dalam buku tersebut dengan sumber lainnya. Misalnya dalam buku *Anak Jajahan Belanda, Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, untuk membuktikan kebenaran tentang penguasaan tanah dan tenaga kerja di perkebunan oleh Belanda.

d. Interpretasi

Langkah selanjutnya adalah interpretasi, tahap dimana penulis melakukan penafsiran atas fakta-fakta yang telah diuji dan analisis sumber untuk menghasilkan suatu rangkaian peristiwa yang telah teruji kebenarannya. Adapun tujuan interpretasi adalah untuk mengurangi unsur subyektivitas dalam penulisan sejarah, artinya unsur subyektivitas penulis sejarah diakui tetapi untuk dihindari.⁷⁰

Interpretasi terdiri dari dua macam yaitu analisis yang berarti menguraikan dan sintesis yang berarti menyatukan.⁷¹ Dengan kata lain interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya dengan cara menguraikan data-data atau fakta-fakta dan menyatukan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya.

Contoh interpretasi dalam penulisan skripsi ini terdapat pada bab II, dimana dalam bab ini penulis mencoba untuk menganalisis tentang perekonomian Indonesia semasa pemerintahan Hindia Belanda yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat Jawa dan golongan elit pribumi. Dalam mengkaji masalah ini penulis melakukan berbagai penafsiran terhadap sumber, sebab beberapa sumber yang digunakan penulis tidak memberikan penjelasan yang

⁷⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1995, hlm. 100.

⁷¹ *ibid*, hlm. 103.

lengkap dan terperinci. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis dengan menemukan hal-hal yang terkait antara masalah yang ada dengan teori-teori dan pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.

e. Penulisan (Historiografi)

Langkah terakhir dalam penelitian adalah penulisan sejarah (historiografi). Historiografi juga merupakan suatu proses penulisan sejarah untuk merekonstruksi masa lalu dengan memperhatikan aspek kronologis. Aspek kronologis sangat diperlukan untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah, agar lebih mudah memberi pengertian kapan peristiwa tersebut terjadi.

Metode penulisan dalam skripsi ini ialah metode deskriptif analitis. Metode sejarah deskriptif menekankan pada penemuan fakta-fakta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁷² Dalam skripsi ini penulis menyajikan model penulisan deskriptif analisis yaitu menggambarkan dampak dari situasi Sistem Tanam Paksa terhadap masyarakat Jawa (rakyat maupun golongan elit pribumi).

2. Pendekatan

Penelitian ini memakai pendekatan multidimensional, artinya pendekatan yang menggunakan berbagai jenis konsep yang dipakai untuk mencari dan mengatur data atau mengkaji masalah yang terjadi. Pendekatan yang dipakai

⁷² Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 63.

diantaranya pendekatan sosiologis, pendekatan politik, pendekatan ekonomi dan pendekatan psikologi.

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji segi-segi sosial dalam suatu peristiwa. Melalui pendekatan ini penulis akan menjelaskan tentang keadaan masyarakat Jawa mengenai hak-hak tanah selama pelaksanaan Sistem Tanam Paksa tahun 1830-1870 serta memunculkan perubahan sosial di dalam masyarakat Jawa.

Pendekatan politik merupakan pendekatan yang tidak dapat lepas dari konsep politik seperti kekuasaan. Melalui pendekatan ini penulis akan menjelaskan sejak diterapkannya Sistem Tanam Paksa terjadi pengambilan alih kekuasaan atas rakyat oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pendekatan ekonomi merupakan pendekatan yang tidak lepas dari konsep ekonomi. Konsep ekonomi seperti ekonomi negara dan ekonomi kolonial.⁷³ Melalui pendekatan ini penulis dapat menguraikan sejak diterapkannya Sistem Tanam Paksa dapat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi rakyat seperti pendapatan serta daya beli masyarakat Jawa.

Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang berorientasi pada tingkah laku manusia, baik di dalam maupun di luar. Tingkah laku manusia dapat dijelaskan dengan adanya tanggapan dari dalam diri manusia.⁷⁴ Melalui pendekatan ini penulis akan menguraikan tingkah laku masyarakat Jawa ataupun

⁷³ Suhartono W. Pranoto, *Idem*, hlm. 38

⁷⁴ Robert F. Berchover, *A Behavioural Approach to Historical Analysis*, New York, A Free Press Paperback, hlm. 7.

golongan elit pribumi selama pelaksanaan Sistem Tanam Paksa dari tahun 1830-1870, yang mana akan mempengaruhi proses kejiwaan mereka.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Dampak Sistem Tanam Paksa bagi Masyarakat Jawa Tahun 1830-1870” ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Berupa pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini menyajikan uraian tentang dampak Sistem Tanam Paksa bagi masyarakat Jawa dalam bidang ekonomi tahun 1830-1870.

Bab III : Bab ini menyajikan uraian mengenai dampak Sistem Tanam Paksa bagi masyarakat Jawa dalam bidang politik tahun 1830-1870.

Bab IV : Bab ini menyajikan uraian mengenai dampak Sistem Tanam Paksa bagi masyarakat Jawa dalam bidang sosial-budaya tahun 1830-1870.

Bab V : Bab ini berupa kesimpulan dari penulisan permasalahan yang diuraikan pada bab II, III dan IV

BAB II

DAMPAK SISTEM TANAM PAKSA

BAGI MASYARAKAT JAWA DALAM BIDANG EKONOMI

A. Kesejahteraan Rakyat

1. Sewa Tanah dan Pajak Tanah Tetap Dipungut

a. Pungutan Sewa Tanah

Selama pelaksanaan Sistem Tanam Paksa pada tahun 1830, para petani masih dituntut sewa tanah. Sebenarnya sewa tanah merupakan asumsi van den Bosch yang menyatakan bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah karena pemerintah telah mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut. Sedangkan rakyat dan desa adalah penyewa, maka dari itu desa-desa dan rakyat diwajibkan membayar sewa tanah kepada pemerintah dengan menyerahkan hasil bumi (*in natura*) dan akan dibebaskan dari sewa tanah.

Seperti pada Januari 1831 saat van den Bosch bermaksud menilai produksi hasil bumi atas sewa tanah dengan merinci perluasan tanaman nila, ia menyatakan bahwa harga nila di daerah-daerah yang sebelumnya tidak ditanami akan ditentukan oleh pemerintah sehingga harga yang disesuaikan ini akan sanggup menutup pembayaran sewa tanah sepanjang diperlukan dan sisanya dibayar tunai.⁷⁵ Pernyataan ini hampir sama dengan surat van den Bosch untuk residen Kedu, yang memerintahkan dan menjelaskan perluasan tanaman nila. Lewat penegasan ini, maka desa yang menanam nila di separuh luas tanahnya

⁷⁵ Robert Van Niel, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*, Jakarta, LP3ES, 2003, hlm. 24.

akan dibebaskan dari sewa tanah, bila tidak dilakukan maka desa itu harus membayar sewa tanah.⁷⁶

Sebenarnya pernyataan van den Bosch menimbulkan kekeliruan tentang desa yang menyisihkan satuperlima tanahnya akan dibebaskan dari sewa tanah jika tanahnya ditanami dengan tanaman ekspor. Seharusnya dia mengatakan jika orang Jawa menanam seperlima dari tanahnya dengan tanaman dagang yang diserahkan kepada pemerintah setelah tanaman ini dipanen, maka nilai dari hasil bumi ini (dihitung pada harga yang sudah memasukkan pengolahan dan distribusi hasil bumi dengan biaya yang dapat bersaing di pasar dunia) *harus* cukup untuk membayar sewa tanah-tanah desa sebesar sewa tanah yang biasanya dihitung dengan nilai satu kali panen padi.⁷⁷ Akan tetapi, dalam praktek Sistem Tanam Paksa, sewa tanah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena orang Jawa sering dipaksa untuk menanam dan menyerahkan tanaman dagang tertentu serta harus membayar sewa tanah.⁷⁸

Untuk kasus tertentu bagi daerah yang tidak sanggup mencukupi dengan menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah, maka daerah tersebut diharuskan membayar sewa tanah sepadan dengan jumlah sewa tanah yang dibayarkan, yaitu dengan membayar berupa uang atau barang. Dengan contoh terdapat di daerah Jawa bagian Timur dan Banten, sewa tanah terus dipungut dalam bentuk uang.⁷⁹ Pemerintah tetap mempertahankan sewa tanah sebagai pajak, karena untuk memenuhi kebutuhan keuangan negara Belanda.

⁷⁶ *ibid.*, hlm. 23.

⁷⁷ *ibid.*, hlm. 17-18.

⁷⁸ *ibid.*, hlm. 15.

⁷⁹ *ibid.*, hlm. 25.

Jadi, selama pelaksanaan Sistem Tanam Paksa sewa tanah bukan satu-satunya pajak, akan tetapi pajak yang berkaitan langsung dengan penanaman tanaman dagang.⁸⁰ Selama dituangkannya Sistem Tanam Paksa sewa tanah masih terus dipungut oleh sebagian orang yang disebut dengan pajak ganda.⁸¹ Pajak ganda artinya rakyat tetap dipungut sewa tanah serta rakyat diharuskan menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah.

b. Pungutan Pajak Tanah

Selama pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, selain sewa tanah, pajak tanah pun tetap dipungut (berbanding terbalik dengan aturan Lembaran Negara/*Staatsblad* pasal 4). Penghitungan jumlah pajak tanah suatu desa ditentukan dengan harga komoditas yang diwajibkan ditanam oleh pemerintah.⁸² Pungutan-pungutan pajak ini ditujukan untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda maupun bagi kepentingan penguasa lokal. Harga pajak ini adalah cara untuk meningkatkan produktivitas tanah wilayah tanam paksa tersebut.⁸³

Sejak Sistem Tanam Paksa harga pajak tanah diimbangi dengan sistem upah (dalam bentuk uang). Misalnya, ketika rakyat dipekerjakan di perkebunan, mereka dibayar sejumlah f 25 untuk setiap pikul (62 kg) kopi yang harus diserahkannya, namun dari jumlah itu oleh pemerintah dipotong lagi dua-perlima untuk pajak bumi dan f 3 lagi untuk menutup bidang administrasi.⁸⁴ Melalui penghitungan tersebut, mereka menerima uang sekitar f 13,2, (untuk upah dan

⁸⁰ *ibid.*, hlm .85.

⁸¹ *ibid.*, hlm. 2.

⁸² Rikardo Simarmata, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*, Yogyakarta, Insist Press, 2002, hlm. 5.

⁸³ *idem.*,

⁸⁴ Anne Booth dkk, (Peny.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta, LP3ES, 1988, hlm. 44.

pajak tanah tanaman tebu dan nila, terdapat dalam Tabel 2.1 dan 2.2). Penghitungan pajak ini, tak jarang lebih dari separuh tanah pertanian desa yang akhirnya digunakan sebagai *tanah kongsen*.⁸⁵

Tabel 2.1 :Hubungan antara jumlah pajak bumi dengan jumlah bayaran hasil tanaman tebu 1837-1851.

Tahun	Pajak bumi yang dipungut dari para penggarap ('000 gulden)	Pembayaran panen kepada penggarap ('000 gulden)	Jumlah karesidenan dengan pelaksanaan Tanam Paksa	Jumlah karesidenan dengan bayaran hasil Tanam Paksa	Jumlah rata-rata pajak bumi yang dipungut dari penggarap ('000 gulden)	Jumlah rata-rata bayaran hasil kepada setiap penggarap ('000 gulden)
1837	1,291	1,262	10	5	10.1	10.9
1838	1,465	1,391	12	6	11.9	11.2
1839	1,409	1,723	12	7	10.1	13.3
1840	1,732	1,990	13	11	11.8	13.5
1841	1,589	2,039	13	10	10.6	13.6
1842	1,734	2,336	13	10	11.0	14.7
1843	1,881	2,417	13	11	11.4	14.7
1844	1,967	2,645	13	11	11.8	15.9
1845	2,225	2,774	13	11	13.6	17.0
1846	2,033	2,816	13	10	13.2	18.2
1847	1,988	2,926	13	9	12.7	18.7
1848	1,938	2,911	12	10	12.7	18.1
1849	2,390	2,907	12	9	15.1	18.4
1850	2,434	3,344	12	10	16.0	22.0
1851	2,218	3,380	12	11	14.2	21.7

Sumber: Kultuur Verslagen, 1837-1851 dalam Anne Booth dkk, (Peny.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta, LP3ES, 1988, hlm. 61.

Pungutan pajak tanah yang dibebankan kepada petani (penggarap) selalu melebihi jumlah hasil bayarannya, misalnya ketika pembayaran tebu pada tahun 1837-1838, pungutan pajak tanah yang dibebankan kepada petani sekitar f 1,291 dan f 1,465, sedangkan upah yang diterima oleh penggarap sekitar f 1,262 dan f 1,391 (Tabel 2.1), maka pembayaran ini tidak sebanding dengan upah yang diterima petani, sehingga pajak tanah atas tanaman tebu merupakan beban berat

⁸⁵ *Tanah kongsen* adalah tanah persekutuan.

bagi petani. Akan tetapi, pajak tanah untuk tahun selanjutnya, yaitu sekitar tahun 1839-1851, pajak ini lebih ringan bahkan bisa dikatakan lebih rendah dari bayaran yang diterima oleh petani.

Tabel 2.2 : Hubungan antara jumlah pajak bumi dengan jumlah bayaran hasil tanaman nila 1837-1851.

Tahun	Pajak bumi yang dipungut dari penggarap ('000 gulden)	Bayaran hasil tanaman kepada penggarap ('000 gulden)	Jumlah karesidenan dengan bayaran hasil tanaman melebihi pajak bumi	Jumlah karesidenan dengan bayaran hasil tanaman melebihi pajak bumi	Jumlah rata-rata pajak bumi yang dipungut dari penggarap ('000 gulden)	Jumlah rata-rata bayaran hasil tanaman kepada masing-masing penggarap ('000 gulden)
1837	863	1,331	10	7	6.8	10.8
1838	905	1,243	10	6	6.9	9.9
1839	1,161	2,215	10	7	6.9	12.8
1840	1,437	2,605	10	6	6.1	12.7
1841	1,455	2,116	11	6	7.2	10.5
1842	1,619	1,738	10	6	8.5	9.0
1843	1,724	1,879	10	6	8.1	9.9
1844	1,190	1,765	9	6	6.2	9.2
1845	2,149	1,711	9	4	11.6	9.2
1846	1,444	1,972	9	7	8.7	11.3
1847	1,671	1,449	9	4	10.5	9.1
1848	1,340	1,331	9	6	10.1	11.0
1849	1,091	1,113	9	5	8.9	8.1
1850	940	732	8	4	8.8	6.9
1851	935	826	8	11	8.9	7.8

Sumber: Kultuur Verslagen, 1847-1851 dalam Anne Booth dkk, (Peny.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta, LP3ES, 1988, hlm. 63.

Pungutan pajak tanah yang dibebankan kepada petani (penggarap) untuk tanaman nila sekitar tahun 1837 lebih ringan daripada pungutan pajak tanah terhadap tanaman tebu (Tabel 2.1 dan Tabel 2.2), misalnya ketika rakyat dituntut pajak tanah untuk tanaman nila, yaitu sekitar f 863, sedangkan upah yang diterima penggarap sekitar f 1,331, maka beban pajak tanah untuk tanaman nila tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan tanaman tebu. Akan tetapi, sekitar tahun

1842, 1845, 1847, 1848, 1850 dan 1851, jumlah pajak yang dibebankan kepada petani cukup besar dibandingkan tahun 1837 (Tabel 2.2). Semua ini dikarenakan, tanaman nila kurang menguntungkan pemerintah, sehingga pajak ini dibebankan lebih besar kepada petani.

Selama pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, pajak tanah tidak hanya dibebankan kepada rakyat tetapi dibebankan kepada pemilik tanah. Contoh, pada tahun 1865 pemilik-pemilik tanah yang tanahnya ditanami tebu harus membayar pajak tanah rata-rata tiap bulan sebesar f.11,65, sedangkan mereka menerima upah tanah atau uang ganti rugi tanah sebesar f. 34 untuk satu periode tanam (2 tahun).⁸⁶ Sekalipun ada peraturan perundangan 1834 (N.I. Stbl. No.22), “pajak tanah tetap masih diberlakukan bagi penduduk bumiputra di bawah Sistem Tanam Paksa, sekurang-kurangnya dipakai sebagai standar bagi pembayaran mereka”.⁸⁷ Pembayaran ini merupakan cara pemerintah kolonial untuk meningkatkan pendapatan petani sejak Sistem Tanam Paksa, yaitu melalui tanaman wajib yang ditanam oleh rakyat. Akan tetapi, pembayaran ini malah memberikan beban kepada petani dan pemilik tanah, karena adanya pungutan pajak tanah. Jadi, selama dipraktikkannya Sistem Tanam Paksa di Jawa, pajak tanah tetap dipungut dan pekerjaan rodi untuk jembatan-jembatan, jalan-jalan dll, tetap dituntut.⁸⁸

⁸⁶ *ibid*, hlm. 44.

⁸⁷ Robert Van Niel, *op.cit.*, hlm 8.

⁸⁸ W.H.A Wesselink dan K.YFF, *Sejarah Ekonomi*, Djakarta, Noordhoff-Kolff N.V, 1956, hlm. 119.

2. Pertumbuhan Kemakmuran Masyarakat Jawa

a. Kemakmuran Bagi Rakyat Pedesaan

Sejak pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, sebagian orang mengatakan kalau sistem ini menimbulkan penindasan dan kemiskinan. Kondisi kemiskinan dan penindasan sejak Sistem Tanam Paksa, mendapat kritik dari para kaum humanis Belanda. Salah satunya seorang asisten residen dari Lebak, Banten, yaitu Eduard Douwes Dekker. Dia mengarang buku Max Havelaar (1860). Dalam bukunya, dia menggunakan nama samaran Multatuli. Di buku itu diceritakan kondisi masyarakat petani yang menderita akibat tekanan pejabat Hindia Belanda.⁸⁹

Penindasaan secara paksa mutlak menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan dan penindasan yang dimaksud oleh Eduard Douwes Dekker adalah kemiskinan dalam hal tidak memiliki lahan pertanian, serta maksud dari penindasan yaitu petani dipekerjakan secara paksa ketika mereka bekerja di perkebunan (menggarap tanaman paksa). Ketika tanah rakyat digunakan untuk lahan penanaman tanaman ekspor dan beralih fungsinya ke penanaman tanaman ekspor, maka mereka tidak dapat menggarap lahannya seperti dahulu, karena tanahnya digunakan untuk penanaman tanaman ekspor. Dengan pengalihan ini, mereka tidak memiliki penghasilan tetap seperti dahulu (dulu menggarap lahan untuk ditanami dengan tanaman padi) dan menjadikan mereka semakin miskin, misalnya terjadi di karesidenan Cirebon. Di mana daerah ini merupakan penghasil padi, akan tetapi sejak terlaksananya Sistem Tanam Paksa berubah menjadi penghasil kopi, gula, nila, teh dan kayu manis, sehingga terjadi kemiskinan dan kelaparan.

⁸⁹ <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=6672383> diakses pada tanggal 21 Februari 2011

Penindasan yang dialami oleh petani, yaitu ketika mereka dipekerjakan secara paksa di perkebunan dan mereka dibayar dengan rendah untuk upah kerja ataupun tidak digaji (tanpa dibayar sama sekali). Misalnya terjadi di karesidenan Pekalongan, yaitu pada tahun 1842 beberapa ratus orang penduduk dari beberapa desa berbondong-bondong pergi ke kota Pekalongan untuk mengadukan kepada yang berwajib (polisi), bahwa upah kerja di perkebunan-perkebunan tebu terlampau sedikit, dan selain itu, terjadi juga pada tahun 1847 yang berasal dari beberapa desa yang mewajibkan menanam tanaman nila.⁹⁰

Selain Eduard Douwes Dekker, masih terdapat pengkritik lainnya, misalnya, seperti W.R. Van Hoevell. Ia adalah seorang pendeta gereja yang diusir dari Hindia Belanda karena mengkritik pemerintahan yang menuntut keadilan dalam urusan pemerintahan dengan orang pribumi, selain dia, muncul juga P. Markus. Dia adalah seorang anggota *A Market Van Indie*. Ia mengatakan kalau Sistem Tanam Paksa menimbulkan penderitaan dan melanggar kebebasan rakyat.⁹¹ Rakyat menjadi kurban yang bersikap pasif di dalam suatu susunan yang berada di luar kekuasaan mereka, serta tidak memberikan manfaat kepada mereka.⁹² Seperti hasil keuntungan dari penanaman tanaman dagang pemerintah yang diterima oleh pihak lain, seperti pemilik pabrik penggilingan gula Eropa dan

⁹⁰ Arsip Nasional Republik Indonesia, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839-1848*, Jakarta, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.5, 1973, hlm. 63.

⁹¹ <http://shedhuwku.blogspot.com/2011/04/sistem-pemerintahan-hindia-belanda.html> diakses pada tanggal 2 April 2011.

⁹² Anne Booth dkk, (Peny.), *op.cit.*, hlm. 53-54.

Cina, para importir-eksportir dan tentu saja pemerintah sendiri, sedangkan masyarakat Jawa tidak menerima.⁹³

Namun, sejak berlangsungnya Sistem Tanam Paksa, sistem ini tidak hanya menimbulkan kemiskinan, penindasan dan ketidakadilan, akan tetapi secara tidak langsung pemerintah kolonial telah mengenalkan tanaman komersial, yaitu tanaman ekspor seperti tebu, nila dan kopi, serta cara penanamannya kepada petani. Penanaman tanaman ekspor seperti tebu, dapat mempertinggi pendapatan rakyat, dan sejak tahun 1863 tanaman ini umumnya menjadi menguntungkan rakyat.⁹⁴ Selain itu, sepanjang Sistem Tanam Paksa berlangsung, terjadi peningkatan pemasukan dari bea garam dan tol pasar serta peningkatan impor barang kapas yang mengesankan dari f. 3,8 juta pada tahun 1830 menjadi f. 13,1 juta dari Eropa ke Indonesia, walaupun pada tahun 1848 dua-pertiga pakaian masih ditenun di rumah dari kapas pribumi.⁹⁵

Bertambahnya impor kapas menandakan bahwa harga kapas impor lebih murah daripada kapas lokal, sehingga jumlah pemakaian kapas impor lebih besar daripada pemakaian kapas lokal. Semua ini dapat diterangkan dari mundurnya industri pertenunan di Jawa dan sebagian lagi sebagai akibat naiknya daya beli rakyat yang disebabkan oleh Sistem Tanam Paksa.⁹⁶ Daya beli rakyat ditandai dengan beredarnya uang dan sistem kerja upah yang diberikan pemerintah kepada petani.

⁹³ Robert Van Niel, *op.cit.*, hlm 101.

⁹⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *op.cit.*, hlm. 204.

⁹⁵ J.S Furnivall, (Terj) *Hindia Belanda studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta, Freedom Institute, 2009, hlm. 146.

⁹⁶ Prajudi Atmosudirdjo, *ibid.*, hlm.204.

Beredarnya uang di masyarakat sejak Sistem Tanam Paksa, berdampak terhadap kemakmuran di karesidenan-karesidenan yang menerapkan sistem itu. Karesidenan Pasuruan misalnya, mengalami peningkatan dalam perdagangan lokal, meningkatnya peredaran uang, laba besar diperoleh dari budi daya yang dipaksakan itu, meluasnya kesempatan kerja, penyempurnaan sarana perumahan dan sandang, masuknya uang pajak secara pesat dan sepenuhnya, dan beraneka tanda mengenai munculnya wiraswasta pribumi.⁹⁷ Semua ini menurut van Hoevell, “ tidak lain selain kemakmuran dan kesejahteraan, tidak lain selain kegiatan dan ketekunan kerja, dan tidak lain selain kepuasan dan kebahagiaan.”⁹⁸

Untuk daerah Besuki, segala catatan berulang kali menegaskan bahwa penduduk mengalami peningkatan kemakmuran, dan terdapat peredaran uang yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, semua ini diakibatkan oleh pembayaran tenaga kerja untuk penanaman tanaman pemerintah.⁹⁹

Di daerah Pekalongan juga terlihat adanya peningkatan “ taraf “ kesejahteraan yang dialami oleh kaum tani berkat kegiatan industri gula pemerintah.¹⁰⁰ Pada akhir tahun 1860-an residen melaporkan bahwa pajak bumi dapat ditagih dengan cepat dan hampir-hampir tanpa ada tunggakan dan bahkan ada penduduk yang membayar pajak sebelum jatuh tempo.¹⁰¹ Peningkatan kesejahteraan di karesidenan Pekalongan, lebih tepat ditafsirkan sebagai indikasi dari pertumbuhan orde ekonomi baru di wilayah pedesaan – sangat erat dengan

⁹⁷ Anne Booth dkk, (Peny.), *op.cit.*, hlm. 56.

⁹⁸ *ibid.*, hlm. 57.

⁹⁹ *ibid.*,

¹⁰⁰ *ibid.*, hlm. 58.

¹⁰¹ *ibid.*,

kebangkitan industri gula - daripada pertanda bahwa para petani umumnya lebih makmur.¹⁰² Buktinya yaitu perdagangan bahan pakaian dan lebih-lebih perdagangan beras yang kelihatannya semakin ramai, karena ini pertama-tama dianggap menandakan bahwa Sistem Tanam Paksa kaum tani lebih terarah dalam bidang pertanian – dan mengakibatkan bahwa barang-barang kerajinan tangan lokal semakin digeser oleh barang-barang konsumsi impor – dan kekurangan beras yang setidak-tidaknya sebagian disebabkan oleh jalur-jalur masuk industri gula.¹⁰³ Sedangkan untuk para petani yang mendapat penghasilan dari perkebunan tebu, mereka dapat memanfaatkan penghasilannya untuk membeli beras dari daerah lain.

Karesidenan Cirebon mengalami kemakmuran luar biasa selama akhir dasawarsa 1830-an dan awal dasawarsa 1840-an, walaupun di beberapa bagian mengalami kelaparan akan tetapi menjelang tahun 1860-an dapat dianggap cukup makmur.¹⁰⁴ Daerah Semarang dan Priangan, juga mengalami kemakmuran dan kesejahteraan yang cukup baik. Daerah Priangan mengalami pertambahan jumlah penduduk dan hewan ternak, semakin lajunya usaha pembukaan tanah, kenaikan produksi pangan secara merata dan bertambah larisnya penjualan garam.¹⁰⁵

Dengan melihat bukti dari beberapa keresidenan yang menerapkan Sistem Tanam Paksa, dapat diketahui bahwa rakyat di sejumlah karesidenan telah mengalami kemakmuran dan kesejahteraan. Selain memberikan kemakmuran, secara tidak langsung Sistem Tanam Paksa telah membuat Jawa diperkaya dengan

¹⁰² *ibid.*, hlm 90.

¹⁰³ *ibid.*,

¹⁰⁴ *ibid.*,

¹⁰⁵ *ibid.*, hlm 59.

perbaikan jaringan jalan dan pertanian secara besar-besaran. Kemudian memperkaya sebagian masyarakat Jawa dengan bentuk organisasi kontrak sederhana dan mempertinggi pendapatan bagi sebagian rakyat selain dari pendapatan pemerintah serta memungkinkan pula dengan melengkapi alat-alat lalu lintas modern serta membiayai dalam arti seluas-luasnya urusan ekonomi dan sosial pemerintah modern.¹⁰⁶

Jadi, selama berlakunya Sistem Tanam Paksa yang tidak begitu lama di Jawa, yaitu antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, telah membawa peningkatan produksi yang kemudian membawa kenaikan pendapatan bagi sebagian penduduk di Jawa.¹⁰⁷ Kenaikan tersebut dialami oleh para penguasa pribumi, seperti bupati dan lurah, selain daripada rakyat (petani) yang bekerja di perkebunan pemerintah. Misalnya, bupati Bandung (berada di karesidenan Priangan), yaitu raden Adipati Wiranatakusumah yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari f. 200.000 setiap tahun, bahkan bisa lebih dari itu.¹⁰⁸ Oleh karena itu, peningkatan pendapatan bagi sebagian penduduk Jawa, seperti bupati tidak lain disebabkan oleh proses penanaman tanaman ekspor, sehingga sepanjang berlangsungnya Sistem Tanam Paksa mereka semakin makmur.

b. Kemakmuran Bagi Golongan Elite Pribumi (Bupati)

Sistem Tanam Paksa tidak hanya memberikan kemakmuran bagi sebagian rakyat Jawa tetapi juga bagi golongan elit pribumi. Mereka dapat memperbesar pendapatannya dengan memanfaatkan sistem ini untuk menguasai tanah maupun

¹⁰⁶ D. H Burger, *Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta, Bhartara Karya Aksara, 1983, hlm 96.

¹⁰⁷ *ibid.*, hlm. 8.

¹⁰⁸ Arsip Nasional Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 60.

tenaga penduduk. Mereka memanfaatkan perluasan tanaman tebu sebagai cara untuk meningkatkan perluasan tanah yang dikuasai. Seperti laporan karesidenan Pekalongan bahwa “

....karena berada dalam posisi demikian...para kepala pribumi dapat memperkaya diri dengan jalan menyewakan tanah garapan mereka kepada desa-desa yang berpenduduk lebih padat. Mereka lalu bebas dari pikiran susah tentang pekerjaan Sistem Tanam Paksa dan pekerjaan sukarela dan *hampir boleh dianggap sebagai tuan tanah*.¹⁰⁹

Golongan elit pribumi memanfaatkan rakyat lewat kekuasaannya. Melalui kekuasaannya, mereka semakin kaya karena menyediakan tenaga kerja untuk pemerintah. Untuk penyediaan tenaga kerja, mereka memperoleh gaji yang didapat dari pemerintah dan *cultureprocenten*.¹¹⁰ Contoh, untuk pendapatan para bupati dari *cultureprocenten* seperti empat bupati di Banten antara tahun 1858 hingga 1860 sebesar f.2500 setiap tahun; sedangkan lima bupati Priangan dalam jangka waktu yang sama menerima f.90.000 setiap tahun. Pada jangka waktu itu juga para bupati di Pekalongan menerima f.38.000 setiap tahun dan keempat bupati di Rembang menerima f.3.600 saja setiap tahun.¹¹¹ *Cultureprocenten* dari Sistem Tanam Paksa, telah membuka peluang lebar bagi perolehan keuntungan pribadi.¹¹² Dengan demikian, Sistem Tanam Paksa telah memberikan kemakmuran tersendiri bagi golongan elit pribumi dan meningkatkan daya beli

¹⁰⁹ Anne Booth dkk, (Peny.), *op.cit.*, hlm 84.

¹¹⁰ *Cultureprocenten* adalah bagian (prosen) dari tanaman yang disetor sebagai bonus, selain pendapatan yang biasa mereka terima

¹¹¹ R.Z Leirissa dkk, *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta, DEPDIKBUD RI, 1996, hlm. 60.

¹¹² Robert Van Niel, *op.cit.*, hlm 120.

konsumsi mereka. Namun, dari padanya terdapat kecenderungan terjadi eksploitasi terhadap tenaga kerja penduduk.

B. Tergesernya Tanaman Pangan oleh Tanaman Ekspor dan Akibatnya

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Jawa, dan ketika Sistem Tanam Paksa mulai diterapkan di Jawa pada tahun 1830, beras merupakan makanan langka. Kelangkaan ini diakibatkan oleh pergeseran tanaman pangan (padi) menjadi tanaman ekspor. Tanaman tersebut adalah kopi, tebu dan nila. Tanaman ekspor seperti nila dan tebu menggunakan lahan pertanian milik rakyat seperti sawah, sedangkan untuk tanaman kopi, ditanam di areal yang belum pernah digarap.

Selama Sistem Tanam Paksa, tanah sawah harus disediakan untuk budidaya ekspor pada masa tertentu. Akibatnya kaum tani yang bersangkutan harus mengurbankan panen padi atau jagung yang kedua kali atau tanaman sayuran, karena tidak tersedia waktu yang cukup untuk mematangkan dan memetik hasil tanam itu sebelum tanahnya digunakan untuk keperluan tanaman ekspor bersangkutan,¹¹³ maka sejak tahun 1830 terjadi penurunan terus-menerus dalam hasil padi per kapita, dan selain itu pada tahun 1843 produksi padi per kapita merosot dari 349 kg menjadi 255 kg pada tahun 1860.¹¹⁴ Penurunan ini pun ditemukan oleh pejabat-pejabat pada waktu itu, yang menganggap bahwa fenomena ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pembudidayaan padi tidak lagi

¹¹³ Anne Booth dkk, (Peny.), *op.cit.*, hlm. 47.

¹¹⁴ *ibid.*, hlm. 182.

diawasi oleh para bupati (tidak lagi bersifat wajib) di satu pihak dan keinginan untuk menanam tanaman yang bernilai lebih tinggi.¹¹⁵

Tabel 2.3: Luas tanaman tebu dalam tahun 1833, 1860 dan 1910 dinyatakan dalam bau (0,71 HA)¹¹⁶

Karesidenan	Tahun		
	1833	1860	1910
Banten	2.254	-	-
Cirebon	1460	4.200	15.000
Pekalongan	777	1.500	3.500
Tegal	560	3.200	10.030
Semarang	543	1.800	3.300
Jepara	5.118	3.700	8.800
Rembang	1.221	-	-
Banyumas	-	300	5.000
Madiun	3.512	800	6.400
Kediri	642	1.900	20.000
Surabaya	4.424	8.000	36.000
Pasuruan	8.361	6.000	13.000
Probolinggo	-	4.700	13.000
Besuki	3.850	2.000	7.000
Banyuwangi	-	-	-
Jumlah Jawa			

Setiap tahun jumlah penanaman tanaman padi mengalami penurunan yang cukup tajam, semua ini disebabkan oleh perluasan tanaman tebu. Di karesidenan Cirebon misalnya, yaitu pada tahun 1833 tanaman tebu yang ditanam di lahan pertanian ada sekitar 1460 bau, sedangkan untuk tahun 1860 ada sekitar 4200 bau, sehingga mengurangi bagian lahan untuk tanaman padi. Untuk daerah Besuki, Pasuruan dan Jepara mengalami kenaikan dan penurunan jumlah penanaman tanaman tebu, akan tetapi berbeda dengan daerah Banyuwangi yang tidak mengalami perluasan tanaman tebu, karena daerah ini tidak melaksanakan

¹¹⁵ Peter Boomgaard, *Anak Jajahan Belanda; Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, Jakarta, Djambatan, 2004, hlm. 179.

¹¹⁶ Prajudi Atmosudirdjo, *ibid.*, hlm. 199-200.

penanaman tanaman tebu (Tabel 2.3). Jadi, sejak dituangkannya Sistem Tanam Paksa, lahan sawah yang digeser oleh tanaman ekspor (khusus tanaman tebu) menjadi semakin luas, maka akan mengurangi bagian lahan untuk penanaman tanaman padi, sehingga merugikan tanaman padi yang akan ditanam di sawah.

Pengalihan tanaman padi menjadi tanaman ekspor menimbulkan berbagai musibah, diantaranya kerusakan lahan, kelaparan, dan kenaikan harga beras. Sejak penerapan Sistem Tanam Paksa, tanah yang terlalu sering digunakan untuk tanaman ekspor menurun kualitasnya (turun kesuburannya). Tanaman yang dimaksud terutama adalah penanaman tanaman nila/indigo. Penanaman nila sangat merusak kesuburan tanah, yang mengakibatkan kegagalan panen apabila tanah itu ditanami tanaman padi (sawah).¹¹⁷ Kegagalan panen disebabkan oleh pengalihan tanaman pangan menjadi tanaman ekspor, sehingga menimbulkan kelaparan.

Bencana kelaparan pernah terjadi di karesidenan Cirebon pada tahun 1843 (Gambar 2.1), karesidenan Demak (1848) dan Grobogan (1849). Karesidenan Cirebon merupakan penghasil padi, tetapi sejak terlaksananya Sistem Tanam Paksa berubah menjadi penghasil kopi, gula, nila, teh dan kayu manis, sehingga ribuan keluarga terpaksa mengungsi, meninggalkan mereka yang lemah untuk mati kelaparan di pinggir jalan. Serangkaian bencana kelaparan antara 1843 dan 1848 begitu parah sehingga di suatu kabupaten penduduk turun dari 336.000 menjadi 120.000 dan di kabupaten lain dari 89.500 menjadi 9.000.¹¹⁸ Setelah tahun 1830 harga beras di pasar naik, ekspor beras turun dari rata-rata f. 4,29 juta

¹¹⁷ W.H.A Wesselink dan K.YFF, *op.cit.*, hlm. 119.

¹¹⁸ J.S Furnivall, *op.cit.*, hlm. 147.

pada tahun 1841-45 menjadi rata-rata f. 3,17 juta pada tahun 1846-50 dan impor meningkat dari f. 233.000 menjadi f. 612.000,¹¹⁹ sebagian disebabkan oleh berkurangnya produksi karena tanah harus digunakan untuk tanaman dagang ekspor.¹²⁰

Gambar 2.1 : Rakyat yang kelaparan dan koruptor dipaksa untuk bekerja selama 75 hari.



Sumber : <http://contekcopas.blogspot.com/2010/06/koruptor-dihukum-mati-enak-saja.html> diakses pada tanggal 13 Juli 2011.

Jadi, sejak Sistem Tanam Paksa, masyarakat Jawa yang semula berada pada pertanian subsistem dipaksa untuk berubah menuju pertanian komersialis. Imperialisme gula telah mengubah komoditas padi menjadi tebu yang tentu berbeda dalam proses pengusahaannya. Dengan demikian, akibat dari imperialisme gula para petani tidak dapat menanam padi selain tanaman ekspor,

¹¹⁹ *idem.*,

¹²⁰ Robert van Niel, *op.cit*, hlm. 27.

terkecuali di areal yang sama yaitu hanya sebagian tanah yang ditanami padi dari tanaman utama ekspor. Namun, jika mereka hendak kembali menanam tanaman padinya, mereka harus menunggu giliran setelah tanaman ekspor dipanen.

C. Pengenalan dan Perkembangan Ekonomi Uang di Masyarakat Jawa

1. Perkembangan Uang Bagi Rakyat Pedesaan

Sejak berlangsungnya Sistem Tanam Paksa pada tahun 1830, para petani mendapat tugas menanam tanaman ekspor di lahan pertaniannya. Tugas para petani adalah kerja wajib yang dilakukan secara paksa. Kerja paksa untuk perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah dirasa tidak sesuai, maka pada tahun 1855 sistem kerja paksa di perkebunan mulai diatur dengan sistem kerja upah yang diberikan kepada petani penanam, penggarap, pemanen, dan pengangkut, sehingga pekerjaan di perkebunan mulai diatur dengan sistem kerja upah bebas. Sejak itu pekerjaan pengangkutan dan pekerjaan pengolahan di pabrik mulai menggunakan tenaga kerja upahan bukan kerja paksa lagi.¹²¹

Pembayaran upah diberikan ketika para petani melakukan pekerjaan menanam tanaman ekspor. Pembayaran ini secara tidak sengaja telah menimbulkan peredaran uang yang masuk melalui sistem pembayaran upah tanaman, misal kepada petani penanam (*plantloon*), pembayaran upah kerja bebas dan dalam perkembangan terakhir pembayaran sewa tanah kepada petani,¹²² maka peredaran uang di kalangan rakyat mendapat kemajuan.¹²³ Untuk contoh

¹²¹ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *op.cit.*, hlm. 68.

¹²² *ibid.*, hlm. 67-68.

¹²³ Prajudi Atmosudirdjo, *loc.cit*, hlm. 204.

pembayaran, tiap bau tanah yang ditanami dengan tebu, bekerja sampai empat orang pekerja-wajib, yang sama menerima sekitar f. 135 upah tanam, jadi tiap orang mendapatkan sekitar f. 34 dalam satu periode (2 tahun)¹²⁴ (untuk daerah-daerah yang menerapkan Sistem Tanam Paksa terdapat dalam Tabel 2.4 & 2.5). Sedangkan untuk tiap pikul hasil produksi kopi, petani dibayar sejumlah f 25 untuk setiap pikul (62 kg) kopi yang diserahkan.¹²⁵

Tabel 2.4 : Upah indigo (nila) tahun 1840 dalam Gulden

Karesidenan	Per bahu (perkiraan)	Per keluarga (perkiraan)
Bagelan	65.13	12.73
Banten	11.20	0.117
Banyumas	75	17
Besuki	59.08	16.20
Cirebon	65.48	15.63
Jepara	26.40	4.75
Kediri	33.40	6.75
Madiun	43.30	8.95
Pekalongan	62.60	15.100
Priangan	16.80	3.45
Tegal	37.50	7.76
Jawa	60.97	12.69

Sumber : Fasseur 1992: 36 dalam R.Z Leirissa dkk, *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta, DEPDIBUD RI, 1996, 58.

Untuk contoh pembayaran upah tanaman nila, misalnya terjadi di karesidenan Cirebon pada tahun 1840, yaitu sekitar f 65.48/bau, sedangkan upah perkeluarga sekitar f 15.63, dan pada tahun 1850 pembayaran upah tanaman tebu di karesidenan Cirebon, yaitu sekitar f 72/bau dan untuk upah perkeluarga sekitar f 23. Jadi, dapat diketahui jika pembayaran upah tanaman tebu lebih tinggi daripada pembayaran upah tanaman nila yang diberikan kepada petani / penggarap (Tabel 2.4 dan 2.5), hal ini disebabkan oleh pengurusan atau perawatan

¹²⁴ *ibid.*, hlm. 204.

¹²⁵ Anne Booth dkk, (Peny.), *loc.cit*, hlm. 44.

untuk tanaman tebu lebih tinggi daripada tanaman nila serta tanaman nila kurang menguntungkan pemerintah.

Tabel 2.5 : Pembayaran upah tanaman tebu pada 1850

Keresidenan	Rata-rata/bau ¹²⁶	Rata-rata/keluarga
Cirebon	f72	f23
Tegal	f77	f18
Pekalongan	f57	f13
Semarang	f84	f27
Jepara	f84	f26
Rembang	f51	f12
Surabaya	f92	f16
Pasuruan	f72	f26
Besuki	f105	f36
Banyumas	f92	f13
Kediri	f23	f5
Madiun	f19	f7

Sumber : C. Fasseur, 1977, *Kultuurstelsel en Kolonial Baten, De Nederlandse Exploitatie van Java, 1840-1860*. Leiden : Universitaire Pers, hlm 224. Dalam Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, Yogyakarta, Aditya Media, 1994, hlm. 65.

Diperkenalkannya upah (dalam mata uang) secara besar-besaran sampai lapisan terbawah masyarakat Jawa dan diperluasnya pembangunan jaringan jalan telah menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi baru bagi orang Jawa dan memungkinkan pergerakan penduduk desa masuk ke dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan uang.¹²⁷ Di kota-kota pelabuhan dan pabrik-pabrik gula mulai timbul kerja upahan yang sebelumnya hampir tidak dikenal. Dengan adanya kewajiban menyerahkan tanah pertanian untuk Sistem Tanam Paksa, maka sewa menyewa tanah di antara penduduk Indonesia bertambah banyak.¹²⁸ Selain itu,

¹²⁶ 1 bau = 0,7096 hektar

¹²⁷ Robert Van Niel, *op.cit.*, hlm. 189.

¹²⁸ D. H Burger *op.cit.*, hlm. 9.

pengaruh uang yang diberikan perusahaan kepada desa mengakibatkan timbulnya kehidupan usaha kecil-kecilan di bidang perniagaan, lalu lintas dan kerajinan. Lalu lintas ini baru dimanfaatkan dengan memperluas penanaman tanaman niaga.¹²⁹ Meskipun lalu lintas ini masih penuh kekurangan mengenai hubungan pembelian dan perkreditan, akan tetapi si petani (pemimpin produksi dari rumah tangga hasil bumi) dapat berkembang menjadi pengusaha kecil (pemimpin produksi dalam rumah tangga uang), sekalipun nama itu belum wajar dipakainya.¹³⁰

Jadi, pelaksanaan Sistem Tanam Paksa besar artinya dalam mengenalkan ekonomi uang ke dalam lingkungan kehidupan pedesaan agraris. Perekonomian pedesaan yang bersifat tradisional berangsur-angsur mulai mengenal uang melalui produksi pertanian dan pasaran kerja. Pembayaran upah melalui uang menciptakan ekonomi pasar bagi masyarakat Jawa, yaitu dengan dikenalkannya alat transaksi pembayaran.

2. Perkembangan Uang Bagi Golongan Elit Pribumi (Bupati)

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa melibatkan para golongan elite pribumi. Mereka dijanjikan oleh pemerintah Hindia Belanda iming-iming bila mereka bekerja dengan sungguh-sungguh serta akan diberikan perangsang berupa *cultureprocenten*. *Cultureprocenten* adalah bagian (prosen) dari tanaman yang disetor sebagai bonus, selain pendapatan yang biasa mereka terima.

Pendapatan para bupati dari *cultureprocenten*, seperti empat bupati di Banten antara tahun 1858 hingga 1860, sebesar f.2500 setiap tahun; sedangkan

¹²⁹ *ibid*, hlm 111-112.

¹³⁰ *idem.*,

lima bupati Priangan dalam jangka waktu yang sama menerima f.90.000 setiap tahun. Pada jangka waktu itu juga para bupati di Pekalongan menerima f.38.000 setiap tahun dan keempat bupati di Rembang menerima f.3.600 saja setiap tahun.¹³¹ Dengan gaji dan *cultureprocenten*, mereka dapat menggunakannya sesuai keperluan dan tak terkecuali untuk meningkatkan derajatnya. Bupati Madiun, misalnya pada tahun 1830-an mempunyai pasukan berkuda yang berpakaian sebagai Huzar Belanda.¹³² Selain itu, mereka dapat membeli perabotan yang berasal dari negeri Belanda yang digunakan oleh para bupati Jawa, misal alat makan Barat dan semua kemewahan Barat dibeli dari Belanda¹³³ serta cara berpakaian ala orang Eropa.

D. Perkembangan Alat Pengangkutan

Sebelum munculnya alat pengangkutan, barang-barang dari perkebunan diangkut oleh para buruh. Mereka dipekerjakan sebagai buruh karena tidak mempunyai lahan pertanian. Para petani (buruh) ini acapkali terpaksa memikul hasil produksi dari lahan di atas bahu, karena buruknya keadaan jalan, dan karena mereka tidak mempunyai hewan dan kendaraan untuk mengangkut hasil panen itu.¹³⁴ Untuk contoh di Tegal mula-mula tebu dipikul oleh orang ke penggilingan-penggilingan karena kekurangan alat-alat pengangkutan.¹³⁵ Ketika, pengangkutan yang dilakukan oleh pekerja tak mencukupi barang yang dipikul sesuai target,

¹³¹ R.Z Leirissa dkk, *loc.cit.*, hlm. 60.

¹³² Ong Hok Ham, *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong ; Refleksi Historis Nusantara*, Jakarta, Buku Kompas 2002, hlm. 16.

¹³³ *idem*.

¹³⁴ Anne Booth dkk, (Peny.), *loc.cit.*, hlm. 44.

¹³⁵ Prajudi Atmosudirdjo, *op.cit*, hlm. 202.

maka dipergunakanlah gerobak-gerobak dan binatang-binatang penarik.¹³⁶ Ini mendorong tumbuhnya pengusaha pengangkutan di kalangan para petani mampu.¹³⁷ Para petani mampu ini menyiapkan alat-alat transportasi berupa gerobak atau cekar yang ditarik dengan hewan ternak (lembu, kerbau dan kuda).

Para petani pengusaha pengangkutan mendapat borongan pengangkutan produksi perkebunan dari lahan ke pabrik-pabrik atau tempat pengolahan, atau ke pusat-pusat penimbunan produksi, yang diperoleh dari pihak pemerintah atau pengusaha pabrik.¹³⁸ Mereka diorganisir oleh pengusaha dalam memenuhi kebutuhan transportasi, misal pengusaha pabrik memberi uang muka kepada desa untuk membeli hewan penarik beban yang digunakan dalam pengangkutan atau mungkin menyuruh mereka membuat gerobak yang dikumpulkan di tempat pengangkutan.¹³⁹ Selain itu, pemerintah memberikan kredit sebesar f 25.000 tanpa bunga kepada pengusaha angkutan pada tahun 1864 di daerah residensi Banyumas dan Bagelen.¹⁴⁰

Semakin meningkatnya hasil bumi dari perkebunan, maka dipergunakanlah jalan-jalan sebagai lalulintas dari ladang ke pabrik dan dari pedalaman ke pantai; satu-satunya jalan yang membuka wilayah pedalaman adalah jalan raya utama yang dibangun Daendels.¹⁴¹ Keadaan jalan yang dibangun oleh Daendels kurang begitu baik, sehingga apabila jalan ini dilewati dengan gerobak-gerobak akan mengakibatkan keterlambatan menuju pabrik. Transportasi ini dirasa kurang

¹³⁶ *idem.*,

¹³⁷ Rikardo Simarmata, *op.cit*, hlm. 73.

¹³⁸ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo *op.cit*, hlm. 69.

¹³⁹ Robert Van Niel, *op.cit*, hlm. 44.

¹⁴⁰ Susanto Zuhdi, Cilacap (1830-1942): *Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2002, hlm. 28.

¹⁴¹ J.S Furnivall, (Terj) *op.cit.*, hlm. 136.

memberikan solusi bagi pengangkutan, karena selain lama, biaya angkutnya pun mahal (gerobak/cikar yang ditarik oleh hewan), seperti satu pikul kopi dari Kedu ke Semarang pada tahun 1833 sekitar f 1,38 naik menjadi f 3,30 pada tahun 1840.¹⁴²

Seiring perkembangan waktu dan kebutuhan semakin meningkat, maka diperlukan suatu sarana transportasi yang murah dan efisien. Oleh sebab itu dibangunlah jalur-jalur kereta api. Jalur kereta api yang dibangun adalah jalan kereta api di desa Kemijen (Semarang), Jumat tanggal 17 Juni 1864, oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh "*Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij*" (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen (Semarang) menuju desa Tanggung (daerah pedalaman di Semarang) (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm (Gambar 2.2),¹⁴³ yang menghubungkan Semarang dengan daerah-daerah kerajaan (*vorstenlanden*) di pedalaman pada tahun 1867.¹⁴⁴ Kemudian, pada tanggal 17 Juni 1867, desa Kemijen (Semarang) sampai Tanggung mulai dilewati oleh kereta api ini dan ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, pada tanggal 10 Agustus 1867 (Gambar 2.3).¹⁴⁵

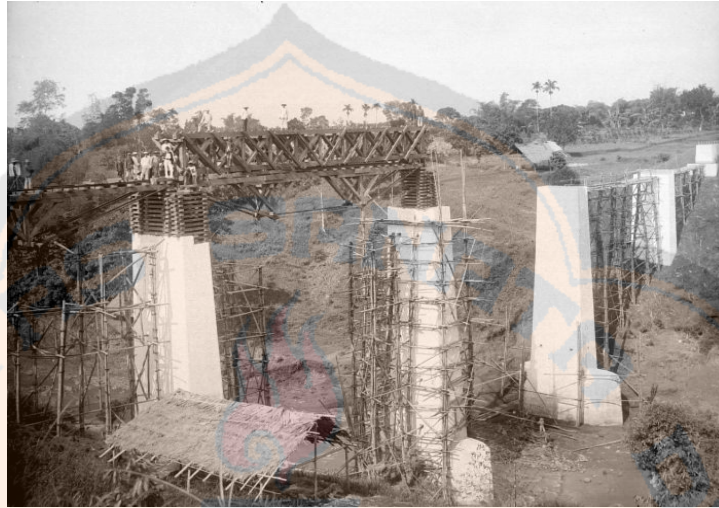
¹⁴² Susanto Zuhdi, *op.cit.*, hlm. 42.

¹⁴³ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perkeretaapian_di_Indonesia di akses pada tanggal 26 Januari 2011

¹⁴⁴ Djoko Suryo, *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada dalam Susanto Zuhdi, *Cilacap (1830-1942): Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa ibid.*, hlm. 43.

¹⁴⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perkeretaapian_di_Indonesia diakses pada tanggal 12 April 2011

Gambar 2.2 : Contoh pembangunan rel kereta api dari pedalaman menuju kota pelabuhan di wilayah Banyuwangi.



Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perkeretaapian_di_Indonesia
 diakses pada tanggal 2 Juni 2011.

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan kereta api antara Semarang-Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang - Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan kereta api di daerah lainnya. Pertumbuhan pembangunan rel kereta api yang begitu besar, sehingga pada tahun 1867 baru 25 km, dan tahun 1870 menjadi 110 km.¹⁴⁶ Dengan perluasan pembangunan rel kereta api diharapkan akan memudahkan penyaluran hasil bumi dari pabrik-pabrik menuju kota-kota pelabuhan dengan tujuan pasaran ekspor, sehingga pekerjaan petani yang awalnya berat, seperti memikul hasil perkebunan dibahu mereka akan menjadi mudah dan ringan karena adanya pembangunan rel kereta api.

¹⁴⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perkeretaapian_di_Indonesia di akses pada tanggal 26 Januari 2011 *ibid*

Gambar 2.3 : Stasiun tugu pertama di Semarang (Jawa Tengah) diperkirakan sekitar tahun 1860-an atau awal 1870-an.



Sumber : <http://www.jimmyzakaria.com/nostalgia/stasiun-samarang-stasiun-kereta-api-tertua-di-nusantara> diakses pada tanggal 2 Juni 2011.

Selain kereta api, muncul juga alat-alat lalu lintas modern, seperti, pos, telegraf, dan telepon. Ini membawa kemungkinan-kemungkinan baru bagi lalu lintas antar desa dan antar daerah. Maka, timbul kesempatan untuk mendirikan organisasi-organisasi yang meliputi daerah yang luas dan terdobrakhlah ciri yang dahulu dipaksakan pada kesatuan-kesatuan sosial setempat, yakni ciri memenuhi kebutuhan sendiri secara tertutup.¹⁴⁷ Dengan meningkatnya pembangunan rel kereta api dan alat-alat lalulintas modern lainnya, diharapkan akan memudahkan penyaluran dari pabrik ke kota-kota pelabuhan, sehingga akan menghemat biaya dan waktu serta meningkatkan keuntungan bagi pemerintah Hindia Belanda.

¹⁴⁷ D. H Burger *op.cit* hlm. 27.

BAB III

DAMPAK SISTEM TANAM PAKSA

BAGI MASYARAKAT JAWA DALAM BIDANG

POLITIK

A. Perubahan Kedudukan (Jabatan) Bupati

Sejak diterapkannya Sistem Tanam Paksa pemerintah kolonial menjalin hubungan dengan golongan elit pribumi. Pemerintah menjalin hubungan dengan mereka mengenai tanah dan tenaga kerja. Melalui hubungan ini, pemerintah Hindia Belanda menawarkan posisi yang menguntungkan, seperti mengistimewakan golongan elit dengan memberikan status turun-temurun lengkap dengan satuan pengawal pribadi,¹⁴⁸ dengan syarat mereka bersedia menjadi pegawai pemerintah. Dengan posisi tersebut secara tidak sengaja pemerintah telah menggeser posisi mereka yang awalnya sebagai penguasa Jawa menjadi pegawai yang digaji.

Selama menjadi pegawai pemerintah yang digaji, mereka kini dijadikan sebagai mandor-mandor perkebunan atau pencatat administrasi selama Sistem Tanam Paksa. Di daerah Pasuruan, misalnya akibat dari sistem sewa tanah, bupati yang dulunya menguasai hak atas tanah dan bebas membagikan kepada pembantu-pembantunya mulai dibatasi oleh pemerintah, sebab pemerintah mengklaim sebagai penguasa atas seluruh tanah desa. Bupati diubah dari

¹⁴⁸ Robert Van Niel, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*, Jakarta, LP3ES, 2003, hlm. 141.

bangsawan pemilik tanah menjadi pegawai yang digaji.¹⁴⁹ Oleh sebab itu, golongan elit ini tidak menghendaki adanya Sistem Tanam Paksa, maka van den Bosch berusaha supaya golongan elit ini mau bekerjasama dalam Sistem Tanam Paksa. Akhirnya, van den Bosch mempergunakan perangsang berupa penghasilan tambahan (*cultureprocenten*) yang sepadan dengan luas areal tanah yang dipergunakan dalam Sistem Tanam Paksa.¹⁵⁰ Perangsang ini menimbulkan hubungan yang semakin jauh dengan rakyat. Sehingga tidak mengherankan bahwa para pejabat mulai merosot di mata rakyat dan pada masa Sistem Tanam Paksa, banyak gerakan protes melawan pemerintah kolonial Belanda dan kaki tangannya¹⁵¹ yang dilakukan oleh para bupati atau penguasa pribumi yang tidak terlibat dalam Sistem Tanam Paksa, mereka mengorganisir masyarakat untuk melakukan pemberontakan, akan tetapi dapat dipadamkan oleh pemerintah.

Di mata rakyat kedudukan golongan elit pribumi boleh menurun, akan tetapi dengan tidak sengaja pemerintah kolonial telah membantu memperbesar kedudukan mereka, serta memperoleh perlindungan dan mendapatkan jaminan dari pemerintah kolonial lewat jabatan dan gaji. Lewat bantuan dan perlindungan pemerintah kolonial, mereka dapat berbuat sesuka hati terhadap rakyat dan mulai kehilangan peran *kawula gusti*.¹⁵² Jadi, sejak Sistem Tanam Paksa posisi golongan elit pribumi menjadi pegawai pemerintah kolonial dan dengan sendirinya menjadi bawahan serta tunduk kepada pemerintah kolonial.

¹⁴⁹ *ibid.*, hlm 41

¹⁵⁰ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983, hlm. 41.

¹⁵¹ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru; 1500-1900, dari Emporium sampai Imperium*, jilid I, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 309.

¹⁵² *Kawula gusti* adalah hubungan antara raja dengan bawahannya.

B. Peran Bupati

Pada tahun 1830 Sistem Tanam Paksa mulai diterapkan di Jawa dan van den Bosch mencoba untuk memulihkan kembali peranan bupati (para penguasa pribumi) yang ada di masyarakat Jawa. Peranan bupati itu adalah mengepalai administrasi (pemerintah) di berbagai kabupaten yang berada di luar kerajaan. Sepanjang berlangsungnya Sistem Tanam Paksa, pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan peranan bupati yang ada di masyarakat untuk mengadakan hubungan kontrak. Kontrak-kontrak ini disesuaikan dengan kebutuhan pada masa Sistem Tanam Paksa.

Untuk memudahkan ikatan kontrak dengan bupati, maka pemerintah Hindia Belanda mulai mengangkat para bupati menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda dengan diberi imbalan uang dan jabatan. Pengangkatan bupati menjadi pegawai negeri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan selama Sistem Tanam Paksa, yaitu mengenai tanah dan tenaga kerja, karena bupati mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Jawa, yaitu pengaruh yang kuat dan sangat dihormati serta dengan sepatah kata saja dan tanpa kekerasan sedikit pun dapat menggerakkan beribu-ribu rakyat atau membendung mereka yang sesuai dengan kehendaknya.¹⁵³

Sejak pelaksanaan Sistem Tanam Paksa kebutuhan akan tanah dan tenaga kerja menjadi semakin besar, oleh sebab itu pemerintah memerintahkan bupati untuk menyediakan tanah dan tenaga kerja untuk perkebunan. Peran bupati dalam

¹⁵³ D. H Burger, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia dalam P. J Suwarno, *Peranan Bupati Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Daerah*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1986, hlm. 27-28.

kehidupan masyarakat dapat berfungsi sesuai kehendak dan rencana dari pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, para bupati tetap menuntut dan menerima pelayanan pribadi serta penyerahan cuma-cuma hasil bumi dari penduduk desa seperti yang telah menjadi kelaziman. Sebagai imbalan atas barang dan jasa yang tidak dibayar itu, bupati mensahkan penghapusan kerja rodi untuk beberapa orang dan sejumlah desa.¹⁵⁴ Penghapusan itu diperluas untuk anggota-anggota keluarga dan kerabat dari mereka yang semula mendapat konsesi, dan dilanjutkan turun-temurun,¹⁵⁵ sehingga, para bupati ini menjadi pegawai yang korup.

Sejak diterapkannya Sistem Tanam Paksa telah terjadi pergeseran-pergeseran peran bupati di kehidupan masyarakat, misalnya di daerah-daerah di mana upah menanam untuk penanaman-wajib gula dalam tahun 1852 dibayarkan langsung oleh pegawai Eropa kepada penanaman masing-masing,¹⁵⁶ sehingga terjadi suatu pengalihan peran bupati menjadi peran pegawai Eropa yang mana dulu merupakan tugas dari bupati sebagai pemimpin mereka.

Mengenai permasalahan tersebut, pemerintah Hindia Belanda mulai mengatur peran bupati dengan peraturan perundang-undangan secara tetap.¹⁵⁷ Peran bupati dapat dilihat pada peraturan bumi putra yang diperbaharui, antara lain melakukan pekerjaan kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman buat bangsa bumi putra dan bangsa timur asing di tanah Jawa dan Madura. Melalui peraturan tersebut, para bupati mempunyai tugas baru atau peran baru dalam Sistem Tanam Paksa selain menjadi mandor perkebunan. Mengenai

¹⁵⁴ Robert Van Niel, *ibid.*, hlm. 52.

¹⁵⁵ *idem.*,

¹⁵⁶ Prajudi Atmosudirdjo, *op.cit.*, hlm. 196.

¹⁵⁷ P. J Suwarno, *loc.cit.* hlm. 25.

tugas bupati yang diatur oleh pemerintah Hindia Belanda dapat dilihat dalam peraturan bumi putra (S.(*Staatsblad*)¹⁵⁸) 1848 – 16 jo.57 diumumkan lagi pada S.(*Staatsblad*). 1926 – 559 dan S. 1941 - 44) pasal 31 sampai 35.

Pasal 31 : a. bupati diwajibkan, dibawah perintah residen, mendjaga kekuasaan kepolisian dalam kabupatennja dan mengawasi kepala-kepala distrik (*wedono/wedana*)¹⁵⁹ serta pegawai dan pedjabat lain-lain jang dibawah perintahnja.

b. oleh sebab itu hendaklah mereka dengan teliti memeriksa adakah polisi dalam kabupatennja bekerdja dengan baik dan apakah pegawai-pegawai dan pedjabat-pedjabat jang dibawah perintahnja mendjalankan kewadajiban dalam sekalian hal.

Pasal 32: a. bupati menerima sekalian surat permohonan dan pengaduan jang dikirimkan kepadanya.

b. sekalian keberatan penduduk mengenai perbuatan-perbuatan kepala polisi jang tidak menurut hukum atau jang dikerdjakan menurut pikirannja sendiri dikirimkan kepada bupati dan diperiksa olehnja.

c. menurut keadaan perkara, bupati segera mengambil tindakan jang perlu atau mengandjurkan usul-usul jang perlu pada residen, kepada siapa bupati harus melaporkan semua sepatunja.

Pasal 33: mereka menerima sekalian laporan dan rentjana dari kepala-kepala distrik (*wedono-wedono*). Ringkasan laporan polisi sesuai dengan petundjuk residen hendaklah dengan tertib dikirimkannja kepada residen itu sedang sekalian laporan ringkasan itu harus dikirmkan kepada asisten residen.

Pasal 34: sekalian daftar jang diterima bupati dari kepala-kepala distrik (*wedono-wedono*) menurut pasal 29 hendaklah dikirimkannja kepada residen, seberapa perlu dengan menjatakan pertimbangannja.

Pasal 35: bupati diwakili oleh patihnja dalam segala pekerdjaan djabatan diseluruh kabupaten, atas nama bupati patih itu wadajib mendjalankan segala pekerdjaan jang dipertanggungkan kepadanya.¹⁶⁰

¹⁵⁸ *Staatsblad* adalah Lembaran Negara

¹⁵⁹ *Wedono/wedana* adalah kepala golongan priyayi; kepala distrik.

¹⁶⁰ W. A. Engelbrecht (penyusun), Kitab Undang-Undang dan Peraturan-peraturan serta Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia dalam P. J Suwarno, *Peranan Bupati*

Dengan peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa bupati merupakan alat yang efisien di tangan pemerintah Hindia Belanda.¹⁶¹ Akan tetapi, kedudukan dan peranan bupati dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda mengandung ambivalensi. Di satu pihak bupati menjadi bawahan Belanda sekaligus sebagai atasannya, di lain pihak menjadi *volkschoofd*¹⁶² yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan sendiri untuk memerintah rakyat. Sebagai *volkschoofd* dia bukan bawahan pejabat Belanda tetapi diawasi oleh pejabat Belanda. Wewenang memerintah sendiri dari bupati itu kemudian diatur oleh Belanda menjadi otonomi daerah, yang pelaksanaannya mengikutsertakan wakil rakyat daerah dalam dewan kabupaten.¹⁶³

Jadi, walaupun pengabdian feodal dipergunakan, tetapi hak itu tidak dikembalikan kepada bentuk yang dahulu, karena organisasi pemerintahan Indonesia sudah terlalu banyak dipergunakan sebagai alat pemerintahan Eropa dan kekuasaan feodal terlalu banyak dipergunakan untuk tujuan-tujuan Barat, terutama untuk produksi ekspor.¹⁶⁴

Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Daerah, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1986, *loc.cit.*, hlm. 27-28.

¹⁶¹ Sewaka, Tjorat-tjaret dari Djaman ke Djaman dalam P. J Suwarno, *Peranan Bupati Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Daerah*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1986, *ibid*, hlm. 28.

¹⁶² *Volkshoofden* adalah pemimpin-pemimpin tradisional, yaitu orang yang kekuasaannya didapat dari statusnya di dalam masyarakat pribumi.

¹⁶³ Prajudi Atmosudirdjo, *ibid*, hlm. 41-42.

¹⁶⁴ *idem.*,

C. Birokrasi Pemerintahan

Kedatangan bangsa Barat khususnya Belanda ke Indonesia telah mendatangkan sistem politik baru, yaitu kolonialisme. Dampak dari gerakan kolonialisme ialah timbulnya sistem kolonial (*colonial system*) dan situasi kolonial (*colonial situation*) di negara jajahan. Sistem kolonial dan situasi kolonial telah menciptakan sistem hubungan kolonial antara pihak penguasa kolonial dan penduduk pribumi yang dikuasai, dan antara pihak negara jajahan dan negara induknya.¹⁶⁵

Kolonialisme tidak akan lepas dari sistem eksploitasi. Pelaksanaan sistem eksploitasi baru ini dilancarkan melalui birokrasi pemerintah, yang berfungsi sebagai pelaksana langsung bagi proses mobilisasi sumber daya perekonomian agraris tanah jajahan yang berupa tanah dan tenaga kerja.¹⁶⁶ Sistem Tanam Paksa menghendaki birokrasi pemerintahan tradisional tetap dipertahankan sebagai penunjang pelaksanaan sistem itu. Terdapat keyakinan umum di kalangan penguasa-penguasa kolonial saat itu bahwa penghormatan rakyat kepada pejabat-pejabat pribumi akan menjamin keselamatan kehadiran Belanda di Jawa, dan ini harus dipertahankan dengan tetap menjaga kelangsungan birokrasi tradisional.¹⁶⁷ Birokrasi tradisional atau ikatan adat masih menjadi alat organisasi yang utama dalam masyarakat pada waktu itu,¹⁶⁸ sehingga ikatan adat ini tidak akan lepas

¹⁶⁵ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, Yogyakarta, Aditya Media, 1994, hlm. 5.

¹⁶⁶ *ibid*, hlm. 11.

¹⁶⁷ Rikardo Simarmata, *ibid*, hlm. 148-149.

¹⁶⁸ Prajudi Atmosudirdjo, *op.cit.*, hlm. 145.

begitu saja dari masyarakat Jawa. Jabatan yang ada pada birokrasi pemerintahan tradisional adalah para bupati sampai kepala desa.

Kedudukan bupati semasa Sistem Tanam Paksa sebagai pemimpin rakyat di daerahnya dikukuhkan dalam *Regerings Reglement* tahun 1854 (RR. 1854). Pasal 67 dan 69 RR. 1854 menegaskan bahwa sejauh keadaan mengizinkan penduduk pribumi hendaklah dibiarkan berada di bawah pengawasan pemimpin mereka sendiri, baik yang diangkat maupun yang diakui oleh pemerintah, yang tunduk pada semacam supervisi yang lebih tinggi yang akan ditetapkan dengan peraturan umum atau khusus dari gubernur jenderal.¹⁶⁹

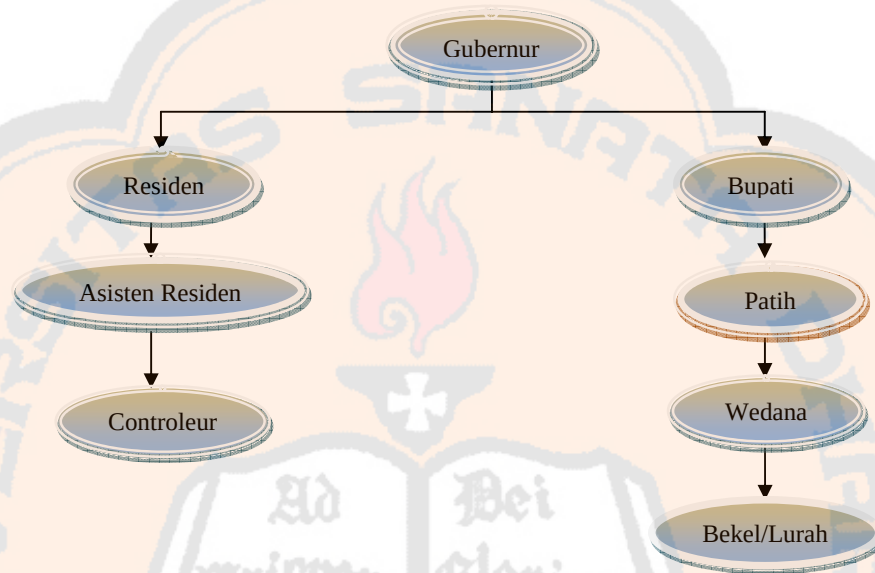
Dalam pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, van den Bosch ingin melibatkan unsur pokok pribumi, yaitu lewat wewenang dan kekuasaan para penguasa pribumi/ bupati (lihat *Regerings Reglement* tahun 1854). Untuk pengaruh bupati, van den Bosch ingin memperbesar dan memperkuat kekuasaan dan wewenang mereka dengan mengangkat mereka menjadi pegawai negeri yang digaji.

Pengangkatan para penguasa pribumi telah menimbulkan campur tangan pemerintah dalam birokrasi pemerintahan tradisional, karena pemerintah kolonial telah membuat peraturan mengenai jabatan para penguasa pribumi (bupati) yang akan diangkat secara turun-temurun. Campur tangan ini telah membuat mereka diawasi dan dikontrol oleh kontroleur yang langsung berada di bawah perintah Gubernur Jenderal (Skema 3.1).

¹⁶⁹ H. Sutherland, 1983 dalam P. J Suwarno, *Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1989, hlm. 32.

Skema 3.1

Struktur birokrasi lokal pada masa Sistem Tanam Paksa



Keterangan:

Diolah dari berbagai sumber, yakni: Harsono, hlm 53., Cornelis Fasseur, *The Politics of Colonial Exploitation Java, The Dutch, and The Cultivation System*, Ithaca, New York, Southeast Asia Program Cornell University, 1992, hlm 21-22 dan Sutherland, hlm 41-42 dalam Rikardo, Simarmata, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*, Yogyakarta, Insist, 2002, hlm. 183.

Seperti sejak di bawah Sistem Tanam Paksa para bekel¹⁷⁰ menjadi tulang punggung birokrasi. Kepala desa atau bekel dijadikan organisator-organisator kecil. Untuk menguatkan otoritas kepala desa, pemerintahan van den Bosch memperbesar kekuasaan kepala desa,¹⁷¹ sehingga posisi mereka tidak lagi selaras dengan model hubungan *kawula gusti*¹⁷² yang seharusnya dikembangkan oleh

¹⁷⁰ Bekel adalah orang yang mengurus apanage; penebas pajak; kepala desa.

¹⁷¹ Rikardo, Simarmata, *op.cit*, hlm. 23.

¹⁷² *Kawula gusti* adalah hubungan antara raja dengan bawahannya.

pemimpin Jawa.¹⁷³ Oleh karena itu, pada masa Sistem Tanam Paksa telah terjadi penetrasi pengaruh dan campur tangan administrasi Eropa yang kuat sekali dalam urusan rumah tangga bangsa Jawa, di samping pihak pejabat-pejabat Indonesia sendiri.¹⁷⁴ Contoh, pada saat pelaksanaan Sistem Tanam Paksa pada dasarnya dilakukan oleh para asisten residen dan kontrolir yang bekerja memakai perhitungan dan kedisiplinan. Semakin bertambah besarnya pengaruh mereka, maka akan merugikan kekuasaan para bupati yang merasa dikendalikan dan didisiplinkan.¹⁷⁵ Pengendalian dan disiplin yang diberikan pemerintah Hindia Belanda kepada bupati (penguasa pribumi) telah mengakibatkan kebebasan dalam pemerintahan tradisionalnya semakin terbatas, sedangkan pengaruh pemerintah Hindia Belanda senantiasa bertambah besar. Oleh sebab itu, mereka hanya mengurus daerahnya untuk pemerintah Hindia Belanda, dan mereka tidak mempunyai tanggung jawab dalam pemerintahan secara tunggal atau bahkan tidak lagi mempunyai wibawa terhadap para bawahannya.¹⁷⁶

Campur tangan pemerintah telah menyebabkan terjadinya pembaharuan dalam sistem administrasi pemerintahan kabupaten dan pemerintahan desa. Sesuai dengan kepentingan Sistem Tanam Paksa, pejabat desa dan bupati mengalami pemantapan tugas dan kewajibannya di bidang administrasi pemerintahan. Misalnya, selain mendapat penambahan tugas dalam mengurus penanaman tanaman pemerintah, pejabat desa (lurah) ditugaskan untuk melakukan pencatatan

¹⁷³ P.M Laksono, *Tradisi Dalam Struktur Masyarakat Jawa: Kerajaan Dan Pedesaan*, Yogyakarta, UGM, 1985, hlm. 81.

¹⁷⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *op.cit* hlm. 196.

¹⁷⁵ *ibid*, hlm 195

¹⁷⁶ Savitri Prastiti Scherer, *Keselarasan dan Kejanggalan; Pemikiran-pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*, Jakarta, Sinar Harapan, 1985. hlm. 34.

dan pelaporan secara tertulis mengenai penduduk, tanaman, ternak, tanah, dan pembuatan laporan tentang kegiatan desa.¹⁷⁷ Maka terdapat perubahan kedudukan pejabat desa yang semula menguasai pemerintahan tradisional kini menjadi mandor perkebunan dan mengurus administrasi selama Sistem Tanam Paksa. Walaupun terdapat pembaharuan dalam bidang pemerintahan, akan tetapi kedudukan bupati dan pejabat desa sebagai pemimpin pangreh praja pribumi menjadi mantap. Meskipun dalam perkembangan selanjutnya, kebesarannya semakin dibatasi baik oleh peraturan pemerintah Hindia Belanda, maupun oleh keadaan perekonomian bupati dan pejabat desa sendiri. Namun, untuk sistem magang dan pewarisan jabatan bupati tetap memancarkan sifat feodalnya.¹⁷⁸

Untuk pengangkatan lurah/bekel, terdapat perubahan yang sangat mencolok. Pengangkatan bupati digantikan dari raja ke pemerintahan Hindia Belanda.¹⁷⁹ Para bupati dan pejabat di bawahnya dipilih dan diberhentikan oleh pejabat Eropa, sehingga mengenai hubungan pencabutan hak-hak memiliki tanah jabatan, pencabutan hubungan strategis yang dimiliki oleh bupati antara bekel/lurah dengan penduduk pribumi serta pejabat yang berada di bawahnya tidak berjalan semestinya.¹⁸⁰ Burger menyebutnya para bupati mengalami “atomisasi”¹⁸¹ “.¹⁸² Sementara itu, Sistem Tanam Paksa telah menghidupkan pemerintahan desa menjadi struktur pemerintahan efektif yang mengontrol

¹⁷⁷ J.S Furnivall. *ibid.*, hlm. 67-69.

¹⁷⁸ P. J Suwarno, *loc.cit*, hlm. 32.

¹⁷⁹ Rikardo, Simarmata, *ibid*, hlm. 204.

¹⁸⁰ *Idem.*,

¹⁸¹ Atomisasi adalah perombakan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

¹⁸² D. H Burger, *op.cit.*, hlm. 99.

administrasi kewilayahan dan penduduk. Sistem ini juga menjadikan kepemimpinan di wilayah Jawa menjadi sangat otoriter.¹⁸³

Pada tahun 1855 Belanda mengeluarkan *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch-Indie* (RR.) (S. No. 2 Tahun 1855), yang dapat dianggap sebagai UUD Hindia Belanda. Dengan RR. Tahun 1855 ini Belanda berusaha mengatur birokrasi pemerintahan daerah secara rasional, yakni menyusun suatu hirarki pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah dengan asas dekonsentrasi.¹⁸⁴ Wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi wilayah-wilayah administratif: *Gewesten, Afdelingen, Onderafdelingen, District dan Onderdistrict*¹⁸⁵ (untuk para jabatannya dapat dilihat di skema 3.1). Untuk jabatan pribumi dapat dilihat dari skema I dan terdapat penambahan yaitu, bupati di setiap kabupaten membawahi wedana, wedana membawahi camat dan camat membawahi kepala desa.¹⁸⁶

Sepanjang berlakunya Sistem Tanam Paksa, bupati harus bertanggungjawab kepada Gubernur Jenderal, karena Gubernur Jenderal adalah penguasa tertinggi di Hindia Belanda, sedangkan bupati harus membagi pekerjaan dengan residen. Residen adalah pejabat di bawah Gubernur Jenderal (skema 3.1). Untuk pekerjaan sepanjang Sistem Tanam Paksa, kedudukan bupati telah mengalami penentuan kembali sebagai pejabat tertinggi di daerahnya, dan pada

¹⁸³ Rikardo, Simarmata, *op.cit*, hlm. 193.

¹⁸⁴ Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah. Dengan kata lain, dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

¹⁸⁵ P. J Suwarno, *op.cit*, hlm. 33.

¹⁸⁶ *idem.*,

prakteknya bupati harus membagi wewenangnya kepada patihnya dan juga kepada asisten residen Belanda.

Untuk pejabat Hindia Belanda, pemerintahan yang paling tinggi dipegang oleh Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal merupakan perwakilan pemerintahan dari kerajaan Belanda yang mengurus pemerintahan di Hindia Belanda. Dalam urusan pemerintahan, Gubernur Jenderal dibantu oleh residen. Residen membawahi asisten residen dan asisten residen membawahi kontroleur. Residen adalah perwakilan Gubernur Jenderal di karesidenan, yang bertugas memberikan laporan ke Gubernur Jenderal. Kontroleur bertugas mengawasi mandor-mandor yang bekerja di perkebunan. Untuk pejabat desa seperti lurah, mereka harus bertanggungjawab kepada atasannya, yaitu wedana, sedangkan wedana bertanggungjawab kepada patih dan patih bertanggungjawab kepada bupati (skema 3.1).

Sepanjang Sistem Tanam Paksa terdapat pertanggungjawaban dari penguasa pribumi kepada pemerintah Hindia Belanda yang bertujuan untuk memudahkan pengontrolan atas penguasa pribumi, sehingga mereka dapat tunduk terhadap pemerintah Hindia Belanda. Dengan kontrol tersebut, pemerintah Hindia Belanda dapat mempergunakan penguasa pribumi untuk tujuan-tujuan tertentu, misal dalam hal penyediaan tenaga kerja dan tanah.

Dengan pertanggungjawaban tersebut, para penguasa pribumi seperti bupati tidak lagi sebagai seorang yang berkedudukan tinggi dalam pemerintahannya dan hanya sebagai seorang pejabat yang semata-mata memperoleh gaji, yang tak ada

bedanya dengan pejabat di bawahnya.¹⁸⁷ Kedudukannya adalah kedudukan yang digaji dengan wewenang yang tidak lebih daripada wewenang penguasa di bawahnya, seperti wedana dan lurah. Akan tetapi keluasan kekuasaan yang dimiliki oleh bupati, patih, wedana, dan kepala desa relatif mudah untuk memobilisir penduduk untuk Sistem Tanam Paksa.¹⁸⁸

Jadi, birokrasi pemerintahan modern yang dibangun oleh Belanda tetap memberi akomodasi kepada sisa-sisa birokrasi pemerintahan tradisional terutama pada tingkat kabupaten ke bawah yang tidak luput dari pengaruh birokrasi pemerintahan tradisional.¹⁸⁹ Penetrasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam pemodernan birokrasi pemerintahan tradisional telah mencapai puncaknya dan berhasil, sehingga birokrasi tradisional telah berubah menjadi birokrasi modern. Proses birokratisasi ini telah membawa dampak perubahan pemerintahan desa yang semula bersifat semi otonom menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda (Skema 3.1).¹⁹⁰ Dengan demikian, pemerintah Hindia Belanda mulai mengatur birokrasi pemerintahan daerah dengan prinsip-prinsip birokrasi modern, meskipun tidak menyeluruh.¹⁹¹

¹⁸⁷ Savitri Prastiti Scherer, *op.cit.*, hlm. 37.

¹⁸⁸ Rikardo, Simarmata, *op.cit.*, hlm. 189.

¹⁸⁹ P.J Suwarno, *Tatanegara Indonesia; dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2003, hlm. 72.

¹⁹⁰ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *loc.cit.*, hlm. 11.

¹⁹¹ P.J Suwarno, *Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1989, hlm. 33.

BAB IV
DAMPAK SISTEM TANAM PAKSA
BAGI MASYARAKAT JAWA DALAM BIDANG SOSIAL
-BUDAYA

A. Pengalihan Tanah

1. Tanah Rakyat Dijadikan Lahan Tanaman Ekspor

Sejak awal Sistem Tanam Paksa, van den Bosch memandang tanah-tanah di Jawa memiliki kesuburan yang berbeda dari tanah-tanah lainnya. Tanah-tanah itu belum dikelola dengan baik, maka ia ingin menggunakan tanah-tanah itu untuk dikelola menjadi sarana penanaman tanaman ekspor. Kemudian, pemerintah kolonial menyatakan semua tanah adalah tanah milik desa, bukan milik pribadi.¹⁹² Maka, Sistem Tanam Paksa ini mulai mencampuri sistem penggunaan tanah penduduk, dan petani diharuskan menyerahkan tanah sekitar satu perlima dari luas tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor. Tanaman tersebut adalah kopi, tebu dan nila.

Pemerintah mengambil tanah persawahan untuk tanaman tebu (Gambar 4.1) dan nila (Gambar 4.3), karena tanaman ini memerlukan air. Sedangkan untuk tanaman kopi ditanam di lahan yang belum pernah digarap (daerah perbukitan) (Gambar 4.2). Tanaman nila dan tebu mulai menggeser tanaman pangan (padi)

¹⁹² Rikardo, Simarmata, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*, Yogyakarta, Insist, 2002, hlm. 188.

yang ada di lahan pertanian rakyat (sawah), sehingga rakyat diharuskan menanam tanaman tersebut tanpa terkecuali.

Tabel 4.1: Luas tanaman tebu dalam tahun 1833, 1860 dan 1910 dinyatakan dalam bau (0,71 HA).¹⁹³

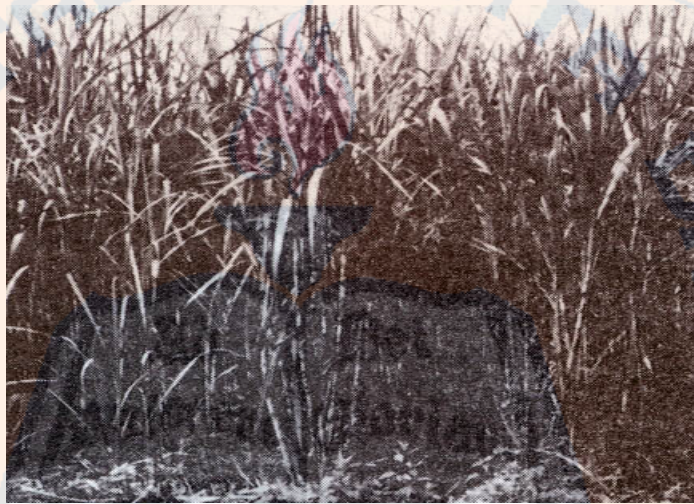
Karesidenan	Tahun		
	1833	1860	1910
Banten	2.254	-	-
Cirebon	1460	4.200	15.000
Pekalongan	777	1.500	3.500
Tegal	560	3.200	10.030
Semarang	543	1.800	3.300
Jepara	5.118	3.700	8.800
Rembang	1.221	-	-
Banyumas	-	300	5.000
Madiun	3.512	800	6.400
Kediri	642	1.900	20.000
Surabaya	4.424	8.000	36.000
Pasuruan	8.361	6.000	13.000
Probolinggo	-	4.700	13.000
Besuki	3.850	2.000	7.000
Banyuwangi	-	-	-
Jumlah Jawa			

Pengalihan lahan dari penanaman tanaman padi ke lahan penanaman tanaman ekspor sangat merugikan tanaman padi yang ditanam di lahan pertanian (sawah), sebab petani tidak dapat memenuhi kebutuhan padinya serta semakin tidak subur nya lahan ketika lahan ditanami dengan tanaman ekspor, sehingga padi mengalami kegagalan panen. Pengalihan ini bertujuan untuk meningkatkan penanaman tanaman ekspor, misal tanaman tebu (Tabel 4.1). Untuk contoh, para petani dipaksa untuk menyerahkan sepertiga sampai separuh luas sawah masing-

¹⁹³ Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomi Indonesia dari segi Sosiologi; sampai akhir abad ke XIX*, Jakarta, P.T Pradnya Paramita, 1957, hlm. 199-200.

masing guna ditanami nila dan tebu¹⁹⁴ dan bahkan sering melebihi luas tanah yang telah ditentukan. Sedangkan bagi petani yang hendak menanam kembali tanaman padinya, mereka harus menunggu giliran (selang-seling) setelah tanaman ekspor ini dipanen, misalnya ketika tanaman tebu mulai dipanen, maka tanaman padi mulai ditanam kembali.

Gambar 4.1 : Letak Penanaman Tanaman Tebu



Sumber : http://www.iptek.net.id/ind/pd_tanobat/gambar/tebu.jpg
diakses pada tanggal 2 Juni 2011.

Setiap tahun penanaman tanaman tebu semakin meningkat, sebab tanaman ini merupakan tanaman yang paling menguntungkan selain daripada tanaman ekspor lainnya, seperti nila dan kopi. Contoh, pada tahun 1833 terjadi di karesidenan Pekalongan, yaitu jumlah tanaman tebu sekitar 777 bau, sedangkan pada tahun 1860 luas tanaman tebu sekitar 1.500 bau, sehingga jumlah luasan untuk penanaman tanaman tebu semakin luas, dan secara tidak sengaja telah menggeser tanaman padi di lahan persawahan milik rakyat (petani). Untuk

¹⁹⁴Jan Breman, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*, Jakarta, LP3ES, 1986, hlm. 28.

mengganti kerugian petani atas tanahnya ini, maka penduduk desa mendapatkan tanah yang letaknya di luar lingkaran pabrik dan di luar tanah perkebunan¹⁹⁵ dan seringkali letaknya jauh dari tempat tinggalnya.

Pembukaan lahan baru di daerah lain merupakan kerugian yang harus diderita oleh petani atas tanahnya. Lahan baru ini diharapkan akan digunakan sebagai pengganti lahan penanaman tanaman padi, akan tetapi lahan baru ini tidak dipergunakan dengan semestinya, karena mereka diharuskan mengurus dan mengolah tanaman ekspor di lahan lama serta tanah yang baru dibuka untuk penanaman ekspor, mungkin kurang subur dibandingkan dengan tanah sawah yang sedang ditanami,¹⁹⁶ sehingga lahan yang baru ini menjadi terbengkalai atau terlantar.

Gambar 4.2 : Letak Penanaman Tanaman Kopi



Sumber: <http://pkab.files.wordpress.com/2008/08/javacoffeeplantati on.jpg?w=500&h=356> diakses pada tanggal 2 Juni 2011.

¹⁹⁵ Prajudi Atmosudirdjo, *op.cit.*, hlm. 207.

¹⁹⁶ Robert Van Niel, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*, Jakarta, LP3ES, 2003, hlm. 190.

Gambar 4.3 : Proses Penanaman Tanaman Nila



Sumber : <http://www.g-excess.com/wp-content/uploads/2010/06/Cultuurstelsel-atau-Sistem-Tanam-Paksa.jpg> diakses pada tanggal 2 Juni 2011

Pada tahun 1861 dari tanah rakyat yang dipergunakan sejak Sistem Tanam Paksa ada sekitar 53.159 *bau*,¹⁹⁷ diantaranya 38.827 *bau* khusus untuk tebu (Tabel 4.1). Kalau pada tahun 1833 luas tanah rakyat kurang lebih 964.326 *bau*, maka secara kasar dapat ditaksir bahwa sekitar 1/18 areal sawah dipergunakan untuk Sistem Tanam Paksa.¹⁹⁸ Sedangkan di luar daerah-daerah untuk tanaman kopi (yang tumbuh di atas tanah yang tidak dapat ditanami padi), maka untuk daerah Bagelen dan Pekalongan, di mana 15% dari tanahnya diperuntukkan bagi tanaman untuk pemerintah pada tahun 1840.¹⁹⁹ Jadi, selama pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, jumlah lahan yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor dapat

¹⁹⁷ Bau (7096 m²) adalah ukuran luas tanah; pajak tanah

¹⁹⁸ D. H. Burger, *De Ontsluiting van Java's Binnenland voor het Wereldverkeer*, (Wageningen, 1939), hlm. 16,17 dalam Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru; 1500-1900, dari Emporium sampai Imperium*, jilid I, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 313.

¹⁹⁹ Ricklefs, M. C, *Sejarah Indonesia Modern 1200- 2004*, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2005, hlm. 262-263.

dikatakan cukup tinggi, seperti untuk penanaman tanaman tebu yang menggeser beberapa bau tanah milik rakyat (sawah) yang menggantikan tanaman padi.

2. Pola Kepemilikan Tanah

Selama pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, van den Bosch menghendaki tanah-tanah garapan dimiliki bersama, untuk memudahkan rotasi tanaman secara periodik.²⁰⁰ Penguasaan atas tanah menjadi milik bersama memunculkan dampak negatif terhadap rakyat pribumi, seperti penanaman tebu. Tanaman ini telah mengakibatkan semakin terjadinya “kepemilikan “ tanah secara komunal dan hilangnya “ kepemilikan” tanah secara individual²⁰¹. Seperti contoh yang terjadi di hampir semua desa di karesidenan Cirebon yang berada di Jawa Barat, daerah ini memiliki tanah komunal lebih besar daripada tanah-tanah dengan “ hak perorangan turun-temurun “, sedangkan untuk karesidenan lainnya yang ada di Jawa Barat, hampir keseluruhan karesidenan memiliki tanah komunal kecuali Banten, Krawang dan kabupaten Priangan (daerah ini sawah merupakan milik perorangan), dan untuk karesidenan yang ada di Jawa Timur, dan Jawa Tengah, hampir keseluruhan karesidenan memiliki tanah komunal kecuali Besuki dan Banyuwangi (di Jawa Timur) (Tabel 4.2). Dengan melihat beberapa contoh di karesidenan-karesidenan tersebut, dapat diketahui jika tanah komunal merupakan lahan yang paling banyak digunakan selama Sistem Tanam Paksa.

²⁰⁰ Peter Boomgaard, *Anak Jajahan Belanda; Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, Jakarta, Djambatan, 2004, hlm. 87.

²⁰¹ Wasino, *Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, Yogyakarta, LKIS, 2008, hlm. 3.

Tabel 4.2 : Bentuk-bentuk pemilikan tanah sawah pada tahun 1868²⁰²

Karesidenan	Jumlah keseluruhan desa yang disurvei	Jumlah desa yang mempunyai sawah berdasarkan milik perorangan turun-temurun	Jumlah desa yang mempunyai sawah milik komunal	Jumlah desa yang mempunyai kedua corak sawah tersebut
Jawa Barat				
Banten	56	55	-	-
Krawang	10	9	-	-
Kabupaten-kabupaten Priangan	105	101	-	-
Cirebon	53	18	49	14
Jawa Tengah				
Tegal	32	19	27	16
Banyumas	40	14	24	4
Pekalongan	26	7	22	4
Bagelen	50	31	37	23
Semarang	50	5	45	4
Jepara	34	23	29	19
Jawa Timur				
Rembang	54	42	45	37
Madiun	63	21	58	19
Kediri	59	8	56	6
Surabaya	56	22	39	15
Pasuruan	44	9	38	6
Probolinggo	26	23	10	10
Besuki	36	32	-	-
Banyuwangi	6	6	-	-
Madura	6	7	1	1
Jumlah	808	452	480	178

Penyebab hal tersebut ialah karena migrasi penduduk ke daerah lain, baik secara diam-diam sebagai cara untuk menghindarkan diri dari tugas berat dari

²⁰² Soediono M. P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (peny), *Dua Abad Penguasaan Tanah; Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta, Yayasan Obor, 2008, hlm. 51.

pemerintah atau karena alasan keamanan peperangan (Perang Dipenogoro 1825-1830), maupun karena pencabutan hak milik yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada mereka yang tidak dapat memenuhi kewajiban pemerintah²⁰³ sehingga tanah-tanah pertanian mereka dirampas. Contohnya terjadi di daerah Tegal, di mana hampir semua sawah di desa-desa tertentu ditanami dengan tebu dan rakyat hampir tak mempunyai pertanian lagi, karena pemerintah distrik ikut campur tangan.

Kepemilikan tanah secara komunal memiliki kesulitan, yaitu orang tersebut tidak diberi hak untuk menjualnya ataupun memindahtangankan tanah tersebut dan pemanfaatannya biasanya secara berkala.²⁰⁴ Selain itu, kepemilikan tanah secara komunal memunculkan pertentangan di pemikir Barat, yang antara lain menyebutkan komunalisasi tanah yang semakin meningkat dianggap merusak tatanan sosial desa dan menghadirkan kesulitan tersendiri bagi perorangan yang hendak membuat perjanjian kontrak sewa tanah. Peraturan komunalisasi tanah kerap kali tidak mencakup hak penuh atas tanah, hanya hak pakai dan hak atas hasilnya.²⁰⁵ Hak inilah yang mempersulit untuk mengalihkan kepemilikan tanah.

Pengkomunalisasian hak atas tanah perlu dipertimbangkan kembali, sebab banyak memunculkan kerugian bagi rakyat pribumi. Maka, para golongan liberal mengusulkan ide mengenai masalah tanah untuk diatur dalam suatu undang-undang pertanahan. Ide-ide tersebut terealisasi pada tahun 1870 mengenai *Agrarische Wet* dalam Ind.Stb.tahun 1870 NO.55, tanggal 5 April 1870.

²⁰³ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, Yogyakarta, Aditya Media, 1994, hlm. 67.

²⁰⁴ Soediono M. P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (peny), *op.cit*, hlm .57

²⁰⁵ Robert Van Niel, *op.cit*, hlm. 286.

Wet (UU) tersebut sebagai tambahan ayat-ayat baru pada pasal 62 RR 1854. Pasal 62 RR 1854 hanya terdiri dari 3 ayat, kemudian menjadi 8 ayat. Lima ayat tambahan dari *Agrarische Wet* ditempatkan sebagai ayat 4 sampai 8 pasal 62 RR 1854. Ayat-ayatnya sebagai berikut :

1. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah
2. Dalam larangan di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha.
3. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi. Tidak termasuk yang boleh disewakan adalah tanah-tanah kepunyaan orang-orang pribumi asal pembukaan hutan, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat penggembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa.
4. Menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi, diberikan tanah dengan *hak erfpacht*²⁰⁶ selama waktu tidak lebih dari tujuh puluh lima tahun.
5. Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak pribumi
6. Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang digunakan untuk keperluan sendiri, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat penggembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan, semuanya dengan pemberian ganti rugi yang layak.
7. Tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun-temurun atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikan kepadanya dengan *hak eigendom*²⁰⁷ dengan pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan ordonansi dan

²⁰⁶ *Hak erfpacht* adalah hak kebendaan yang memberi kewenangan paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain.

²⁰⁷ *Hak eigendom* adalah hak berkuasa untuk memperlakukan tanah itu sebagai miliknya akan tetapi tidak diperbolehkan berbuat yang mendatangkan kerusakan yang mengakibatkan kemerosotan harga tanah.

dicantumkan dalam surat *eigendomnya*, yaitu yang mengenai kewajibannya terhadap negara dan desa yang bersangkutan, demikian juga mengenai wewenangnya untuk menjual kepada orang non pribumi.

8. Persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi dan non pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur dengan ordonansi²⁰⁸.

Jadi, melalui undang-undang pertanahan ini rakyat dapat memperoleh kembali hak kepemilikan tanahnya dan ketika pemilik tanah hendak menyewakan tanahnya kepada pihak swasta, mereka mendapatkan jaminan melalui UU pertanahan ini (lihat *Agrarische Wet* ayat 4 sampai 8 pasal 62 RR 1854).

B. Pengerahan Tenaga Kerja

Sejak Sistem Tanam Paksa, tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting, untuk itu tenaga kerja rakyat diperlukan untuk penanaman, penggarapan, pemanenan, pengangkutan dan pengolahan di pusat-pusat pengolahan atau pabrik-pabrik.²⁰⁹ Proses pengerahan tenaga kerja mendorong pemerintah kolonial untuk menjalin hubungan dengan para pejabat pribumi lewat ikatan tradisionalnya. Melalui ikatan tradisional pribumi, pemerintah memperoleh tenaga kerja yang diperlukan. Maka, para pejabat pribumi mulai melibatkan keluarga-keluarga petani untuk dijadikan sebagai tenaga kerja (Tabel 4.3 dan Tabel 4.4). Oleh karena itu, Sistem Tanam Paksa menyentuh unsur tenaga kerja dari kehidupan masyarakat agraris pedesaan Jawa.²¹⁰

²⁰⁸ Rikardo, *op.cit*, hlm. 125-128.

²⁰⁹ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *loc.cit*, Hlm 67

²¹⁰ Ong Hok Ham, *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong ; Refleksi Historis Nusantara*, Jakarta, Buku Kompas, 2002, hlm. 64.

Tabel 4.3: Keterlibatan keluarga dalam Sistem Tanam Paksa

Wilayah Sistem Tanam Paksa	Permulaan	Pertengahan	Akhir
Seluruh Jawa	1,13	1,14	1,14
Bagelen	0,9	1,0	2,0
Semarang	1,5	1,6	2,8
Surabaya	1,7	1,5	1,4
Cirebon	1,0	1,5	2,0

Sumber : Robert Van Niel, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*, Jakarta, LP3ES, hlm. 94

Untuk kasus tertentu yaitu sekitar tahun 1840-an dikerahkan 400-500 ribu keluarga sebagai tenaga kerja untuk penanaman dan perawatan tanaman kopi sekitar 200 juta pohon di Jawa²¹¹ dan pemerintah pada tahun 1858 memerlukan tenaga kerja untuk menanam tanaman ekspor, seperti penanaman kopi, tebu dan nila dibutuhkan berturut-turut 450.000, 300.000 dan 110.000 orang pekerja.²¹² Sedangkan untuk karesidenan yang menerapkan Sistem Tanam Paksa, banyak terjadi kenaikan dan penurunan persentase keterlibatan penduduk dalam pelaksanaan Sistem Tanam Paksa (khusus semua tanaman ekspor). Keadaan ini dapat dijelaskan oleh keadaan daerah masing-masing, yaitu seberapa besar jumlah penanaman tanaman ekspor di daerahnya serta perbedaan kondisi setempat terhadap kecocokan penanaman jenis tanaman yang ditentukan (Tabel 4.4). Jika daerah yang bersangkutan memiliki lahan yang luas, maka akan dibutuhkan tenaga kerja yang sangat besar untuk mengurus dan mengolah tanaman itu. Misal, terjadi di karesidenan Banten pada tahun 1837, kebutuhan tenaga kerja penduduk sekitar 76%, sedangkan pada tahun 1840, kebutuhan tenaga kerja sekitar 92%, dan pada tahun 1845, sekitar 48%. Ini dapat diketahui, kalau Sistem Tanam Paksa

²¹¹ Robert Van Niel, *op.cit.*, hlm. 91-92.

²¹² Prajudi Atmosudirdjo, *op.cit.*, hlm. 199.

membutuhkan tenaga kerja selalu mengalami peningkatan dan penurunan yang disebabkan oleh jumlah penanaman tanaman ekspor serta kecocokan penanaman jenis tanaman yang ditentukan (Tabel 4.4).

Pengeralahan tenaga kerja rakyat ini terbagi atas tiga macam pelayanan yaitu “ kerja wajib umum “ (*heerendiensten*), “ kerja wajib pancen “ (*pancen diesten*), dan “ kerja wajib garap penanaman “ (*cultuurdiensten*)²¹³. Kerja wajib umum, mencakup pelayanan kerja untuk umum, seperti pembuatan atau perbaikan jalan (jalan-jalan untuk distribusi hasil perkebunan, misal memperbaiki jalan yang dibuat Daendels sekaligus sebagai sarana penyaluran hasil produksi dari lahan perkebunan ke pabrik-pabrik), pembuatan bangunan gedung perkantoran dan penjagaan tawanan. Kerja wajib *pancen* (layanan pribadi), menyangkut tugas pelayanan kerja pertanian di tanah milik para kepala-kepala pribumi. Kerja wajib garap penanaman, menyangkut pengeralahan tenaga kerja untuk mengerjakan pembuatan lahan perkebunan (membuka lahan), pembuatan dan perbaikan irigasi untuk perkebunan, kegiatan penanaman, pengangkutan hasil panen ke tempat penimbunan (kopi, nila) atau ke pabrik pengolahan (tebu) dan kerja lain di perkebunan pemerintah.²¹⁴

²¹³ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo *loc.cit.* hlm. 59.

²¹⁴ *idem.*

Tabel 4.4 : Keterlibatan penduduk pedesaan dalam pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa periode 1837-1845²¹⁵ :

Karesidenan	Persentase keterlibatan penduduk dalam :						Persentase penggunaan tanah untuk penanaman kecuali kopi		
	Seluruh tanaman pemerintah			Seluruh tanaman pemerintah kecuali kopi					
	1837	1840	1845	1837	1840	1845	1837	1840	1845
Banten	76	92	48	2	20	25	2	4	7
Priangan	86	65	67	2	9	9	3	2	2
Krawang	25	42	37	25	42	37	-	-	-
Cirebon	73	69	54	55	49	36	11	11	8
Tegal	51	44	36	35	28	23	7	6	10
Pekalongan	57	59	55	37	46	40	13	15	12
Semarang	35	30	25	5	5	10	6	1	2
Jepara	37	35	35	16	24	25	3	5	6
Rembang	35	31	25	5	14	21	0,5	1	2
Surabaya	29	32	33	28	31	31	3	3	4
Pasuruan	77	59	64	54	31	33	13	11	12
Besuki	40	47	54	12	19	24	4	6	7
Pacitan	60	72	63	22	-	-	-	-	-
Kedu	86	79	97	6	1	6	5	2	1
Bagelan	35	81	62	23	54	43	6	15	11
Banyumas	77	68	74	35	33	36	12	12	9
Kediri	59	61	61	24	23	19	7	6	4
Madiun	60	59	51	26	23	23	4	5	4
Seluruh Jawa	54	57	53	20	25	25	4	6	6

Pengerahan tenaga kerja itu dilakukan dengan kontrak²¹⁶ (“walaupun pada kenyataannya dilakukan tekanan-tekanan yang halus oleh keompok elite supradesa atau secara paksa”). Kontrak-kontrak ini dibebankan di atas pundak penduduk. Pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk di lahan dan di pabrik ternyata lebih besar ketimbang yang dapat ditangani oleh tenaga kerja yang

²¹⁵ Djoko Suryo, 1989, Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900, Yogyakarta : Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, hlm 23 dalam Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, Yogyakarta : Aditya Media, 1994, hlm. 58.

²¹⁶ Kontrak dilakukan sekitar 1 periode tanam (2 tahun) kepada para petani

tersedia, sehingga waktu kerja setiap individu dilipatgandakan.²¹⁷ Dengan waktu yang berlipat ganda, maka keluarga-keluarga Jawa dipaksa untuk mempunyai lebih banyak anak. Tambahan anak memungkinkan tersedianya tenaga kerja untuk mengolah tanah dan penyambung nafkah hidup, sementara tenaga lainnya dapat menjalankan kerja paksa yang diharuskan oleh Sistem Tanam Paksa.²¹⁸ Selain itu, pembukaan lahan untuk perkebunan serta pertumbuhan produksi, mendorong munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan-kegiatan non-pertanian yang berkaitan dengan perkebunan dan perpabrikaan dan daerah pedalaman.²¹⁹

Menurut van den Bosch pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran dapat berjalan dan penanaman hasil untuk ekspor pemerintah terjamin. Lagi pula rakyat memperoleh hasil lebih banyak dengan mengeluarkan tenaga kurang dari sistem lama.²²⁰ Namun, maksud van den Bosch dalam mengerahkan tenaga kerja tidak jarang melampaui batas-batasnya, seperti rakyat disuruh pergi jauh dari desanya untuk mengerjakan penanaman indigo selama berbulan-bulan, juga untuk menanam kopi di daerah yang baru dibuka.²²¹ Untuk tanaman kopi sering kali terjadi kesewenang-wenangan dalam hal meningkatkan jumlah tanaman kopi, sehingga setiap rumah tangga harus menangani sekitar 250 menjadi 1.000 tanaman.²²²

²¹⁷ Robert Van Niel, *op.cit.*, hlm. 60.

²¹⁸ Benjamin White, "Demand For Labor and Population Growth in Colonial Java", "Huma Ecology Vol. 1,3 (1973) : 217 lihat juga Daniel Chirot, *Social Change in The Modern Era*, (New York, Chicago : Harcourt Brace Jovanivick, Publishers, 1986), h. 174. Dalam Erman Rajagukguk, *Indonesia : Hukum Tanah di Zaman Penjajahan* tidak diterbitkan.

²¹⁹ Ricklefs, M. C, *op.cit.*, hlm. 265.

²²⁰ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 306.

²²¹ *ibid*, hlm. 312.

²²² D. H Burger *op.cit.*, hlm. 148.

Jadi, proporsi jumlah kaum tani yang dilibatkan dalam pelayanan kerja paksa sangat besar dilihat dari jumlah seluruh penduduk (Tabel 4.4); perbandingan yang luar biasa besar mengingat tanah desa yang digunakan oleh Sistem Tanam Paksa amat terbatas akan tetapi 65-75 persen dari rumah tangga tani di Jawa terlibat dalam penanaman pemerintah.²²³

C. Pertumbuhan dan Penurunan Jumlah Penduduk Jawa

1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Jawa

Dengan dibutuhkannya tenaga kerja untuk perkebunan, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan semakin besar. Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja maka keluarga petani dilibatkan. Dengan tidak sengaja kebutuhan tenaga kerja mendorong pertumbuhan penduduk. Contohnya terjadi kenaikan pertumbuhan penduduk di tiga karesidenan yaitu Semarang meningkat 185%, Cirebon 200% dan Bagelen 220 %, akan tetapi berbeda dengan Surabaya yang berlawanan arah. Hal ini terkait dengan arus pergerakan penduduk yang meninggalkan tanah pertanian dengan penambahan tanah yang baru dibuka, sehingga ada kenaikan pada jumlah tanah garapan per keluarga.²²⁴

Pertumbuhan penduduk ini bukan saja karena perluasan tanah yang harus ditangani oleh rakyat, tetapi pertumbuhan ini diakibatkan oleh para petani yang berpikir untuk lebih banyak mempunyai anak agar pekerjaan dapat dibagi dengan anak-anaknya, dan anak di samping sebagai beban juga memiliki nilai ekonomi

²²³ Robert Van Niel, *op.cit*, hlm .142.

²²⁴ *ibid*.,hlm. 98.

positif.²²⁵ Selain itu, dinikahkannya anak-anak mereka di usia dini karena orang tua perempuan secepat mungkin ingin mempunyai menantu untuk dijadikan tenaga kerja di ladang atau sawahnya (Tabel 4.5).²²⁶

Tabel 4.5: Tingkat perkawinan (per seribu) dalam tahun-tahun selektif di Jawa Tengah (1840-1870)²²⁷.

Daerah mengenal yang	1840	1857	1870
Bagian tetap	15	19	14,5
Pembagian kembali secara periodik	22	21	14,5

Jumlah pernikahan yang setiap tahun terus meningkat baik yang melakukan pernikahan di usia dini ataupun yang bukan (Tabel 4.6), maka secara tidak sengaja meningkatkan jumlah kelahiran anak (Tabel 4.7) serta meningkatkan jumlah pertumbuhan penduduk di daerah yang melaksanakan Sistem Tanam Paksa. Pada tahun 1820-1850 jumlah kelahiran anak menunjukkan angka sekitar 57 per seribu dari pada tahun 1850-1880 yang hanya 54 per seribu dan jumlah ini tidak diikuti dengan jumlah kematian yang dinilai sangat rendah (Tabel 4.7). Dari data tersebut dapat dibayangkan sejak diterapkannya Sistem Tanam Paksa lonjakan kelahiran anak di Jawa begitu besar.

²²⁵ Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*, Jakarta, Sinar Harapan, 1987, hlm. 27.

²²⁶ Peter Boomgaard, *op.cit.*, hlm . 240.

²²⁷ *ibid.*, hlm . 249.

Tabel 4.6 : Tingkat perkawinan, rasio jenis kelamin, persentase anak dan ukuran keluarga 1820-1880²²⁸

Periode	Angka perkawinan	Rasio jenis kelamin	% anak	Ukuran keluarga
1821-1830	-	-	42,5	-
1831-1840	1,2	96,4	42,4	4,6
1841-1850	1,4	-	44,8	4,7
1851-1860	1,7	92,4	46,2	4,9
1861-1870	1,3	93,5	46,1	4,9
1871-1880	-	94,7	-	4,7

Tabel 4.7 : Tingkat kelahiran dan kematian kasar dan persentase peningkatan alamiah, 1820-1850 dan 1850-1880, yang didasarkan pada model “ barat ‘ tingkat mortalitas usia 3 dan 5 tahun²²⁹ .

Periode	Tingkat kelahiran kasar (per seribu)	Tingkat kematian kasar (per seribu)	Kenaikkan alamiah
1820-1850	57	44,5	1,25
1850-1880	54	36,5	1,75

Diterapkannya Sistem Tanam Paksa telah meningkatkan konsumsi beras. Peningkatan konsumsi akan beras sejak Sistem Tanam Paksa diakibatkan oleh kelahiran anak pribumi dan migrasi orang-orang asing yang datang ke Hindia Belanda (Tabel 4.8). Migrasi orang-orang asing ke Hindia Belanda berdampak pada pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk ini diakibatkan oleh rangsangan ekonomi dari Sistem Tanam Paksa karena masuknya dengan pesat pendatang-pendatang baru (orang asing) dan menambah padat penduduk daerah itu dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya²³⁰ yang tidak menerapkan Sistem Tanam Paksa.

²²⁸ *ibid.*, hlm . 299.

²²⁹ *ibid.*, hlm . 302.

²³⁰ Robert Van Niel, *op.cit.*, hlm. 275.

Tabel 4.8 : Pertumbuhan penduduk asing di Hindia Belanda, tahun 1860-1930²³¹.

Jumlah pada tahun	Eropa	Cina	Arab
1860	43,876	221,438	8,909
1880	59,903	343,793	16,025
1900	91,142	537,316	27,399
1905	94,518	563,449	29,588
1920	168,114	809,039	44,902
1930	240,417	1,233,214	71,335
Rata-rata pertumbuhan tiap tahun dalam persen			
1860-1880	1,6 %	2,2 %	3 %
1880-1900	2,1 %	2,3 %	2,7 %
1900-1920	3,1 %	2,1 %	2,5 %
1920-1930	3,6 %	4,3 %	4,7 %

Seperti contoh yang terjadi di karesidenan Priangan yang mengalami kenaikan pertumbuhan penduduk pada tahun 1833, yaitu sekitar 10 persen. Pertumbuhan ini terjadi karena migrasi pada tahun 1830-1831 yang disebabkan dimulainya penanaman tanaman nila, sedangkan pada tahun 1834, kenaikan sensus penduduk lebih baik, yaitu sekitar 13 persen. Untuk karesidenan Tegal, kenaikan pertumbuhan penduduk dimulai pada tahun 1839, yaitu ketika adanya keresahan yang disebabkan karena tebu mulai ditanam sekitar tahun 1833-1835, yaitu sebesar 8 persen. Sedangkan pada tahun 1845 naik menjadi 9 persen, yang disebabkan karena migrasi pada tahun 1844.²³² Untuk seluruh penduduk karesidenan Cirebon pada tahun 1844, ada sekitar 145.000 orang bukan 105.000 orang seperti yang sering dilaporkan; berarti hanya 72 persen dari jumlah sebenarnya. Dengan demikian selama dilaksanakannya Sistem Tanam Paksa,

²³¹ Creutzberg, Pieter & Van Laanen, J. T. M. (Terj), *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1987, hlm. 32.

²³² Robert Van Niel, *op.cit.*, hlm. 196.

faktor penanaman tanaman ekspor sangat mempengaruhi jumlah pertumbuhan penduduk.

Jadi, menurut Breman jumlah pertumbuhan penduduk di Jawa pada tahun 1850, ada sekitar 12,5 juta, sementara Paper menyebut angka pertumbuhan penduduk mendekati 13,1 juta orang. Sedangkan hasil laporan *Kolonial Verslag* pada tahun 1850, jumlah pertumbuhan penduduk sebanyak 9,5 juta orang.²³³ Berdasarkan data tentang jumlah kelahiran anak dan migrasi penduduk asing yang datang ke Hindia Belanda pada tahun 1850-1860, maka kemungkinan besar jumlah penduduk Jawa dapat ditaksir sekitar 15,6 juta orang. Jadi, dengan pertumbuhan penduduk di suatu daerah, menandakan semakin puasny orang terhadap Sistem Tanam Paksa.

2. Penurunan Jumlah Penduduk Jawa

a. Migrasi atau Penghindaran Kerja Wajib

Sejak Sistem Tanam Paksa, penurunan jumlah penduduk di suatu daerah merupakan masalah serius. Penurunan jumlah penduduk dapat disebabkan oleh keresahan dalam perekonomian masyarakat Jawa. Keresahan ini diakibatkan karena kerja wajib yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap rakyat. Kaum tani kecil (rakyat) yang tersebar luas mulai resah dan menyusullah migrasi besar-besaran (menghindar kerja wajib).

Penurunan jumlah penduduk di daerah Sistem Tanam Paksa, berdampak pula terhadap penyediaan tenaga kerja bagi perkebunan-perkebunan milik pemerintah, maka penghindaran kerja wajib (daerah yang menerapkan Sistem

²³³ *ibid.*, hlm. 105-106.

Tanam Paksa penduduknya mulai menurun) yang mengakibatkan pengiriman tenaga kerja dari luar daerah yang tidak menerapkan Sistem Tanam Paksa ke daerah yang menerapkan Sistem Tanam Paksa. Sehingga daerah yang kekurangan penduduk dapat terpenuhi kembali dan penurunan jumlah penduduk dapat diatasi dengan kedatangan penduduk baru dari daerah lain (desa lain) .

b. Kegagalan Panen

Pada awal tahun 1830-an banyak karesidenan mengalami kegagalan panen dan kekurangan makanan.²³⁴ Kegagalan panen dan kekurangan makanan mengakibatkan terjadinya bencana kelaparan seperti yang terjadi di karesidenan Cirebon yaitu antara tahun 1843 dan 1848 begitu parah, sehingga di satu kabupaten penduduk turun dari 336.000 menjadi 120.000 dan di kabupaten lain dari 89.500 menjadi 9.000.²³⁵

Kegagalan panen berdampak buruk terhadap konsumsi makanan penduduk yang terjadi di daerah Sistem Tanam Paksa. Konsumsi makanan yang tidak bergizi serta kelahiran anak yang tidak didukung dengan gizi yang baik mengakibatkan peningkatan angka kematian. Faktanya sekitar tahun 1845 konsumsi per kapita sangat rendah dengan tingkat konsumsi itu dan tingkat kematian jauh lebih tinggi selama periode 1820-1850 daripada sebelumnya atau sesudahnya (Tabel 4.9).²³⁶ Kejadian ini terjadi di daerah yang menerapkan Sistem Tanam Paksa dan bukan terjadi di daerah yang tidak menerapkan Sistem Tanam Paksa.

²³⁴ Peter Boomgaard, *op.cit.*, hlm . 331.

²³⁵ J.S Furnivall, (Terj), *Hindia Belanda studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta, Freedom Institute, 2009, hlm. 147.

²³⁶ Peter Boomgaard, *op.cit.*, hlm. 331.

c. Wabah Penyakit

Semenjak Sistem Tanam Paksa, selain kegagalan panen, sistem ini pun menimbulkan berbagai penyakit, misal penyakit cacar dan kolera menyebar pada tahun 1846, 1847 dan 1849,²³⁷ penyakit tersebut merupakan penyakit menular. Penyakit kolera kembali menyerang Jawa pada tahun 1834, 1851, 1864 dan 1874, tetapi dengan hasil yang kurang mengerikan karena pada waktu itu penduduk Jawa telah mendapat imunisasi tingkat tertentu.²³⁸ Sebelum adanya imunisasi, penyakit kolera adalah penyakit yang menyumbangkan kematian paling tinggi selain demam tipus pada tahun 1800-1820, akan tetapi pada tahun 1820-1850, penyakit ini mengalami peningkatan kematian, dan tidak setinggi tahun 1800-1820 (Tabel 4.9).

Dengan imunisasi diharapkan akan mengurangi jumlah kematian penduduk dan menurunkan jumlah penduduk. Selain itu, setelah tahun 1850 penyakit malaria semakin meningkat. Namun, bersamaan dengan itu pil kina sebagai obatnya semakin banyak tersedia sehingga dapat mengimbangi serangan epidemik malaria.²³⁹ Sedangkan untuk penyakit lainnya seperti demam tipus menjadi penyakit epidemik yang menyerang semua karesidenan di Jawa Tengah tetapi penyakit ini hanya mencapai epidemik sekali saja yaitu pada tahun 1846 dan 1850.²⁴⁰

²³⁷ Creutzberg, Pieter & Van Laanen, J. T. M. (Terj), *op.cit*, hlm. 31.

²³⁸ Peter Boomgaard, *op.cit.*, hlm . 328.

²³⁹ *idem*,

²⁴⁰ *ibid.*,

Tabel 4.9: Arah dari pengaruh sejumlah faktor pada tingkat kematian, menurut periode²⁴¹.

Faktor	1800-1820	1820-1850	1850-1880
a. vaksinasi	-	- -	
Kolera	+ +	+	
Demam tipus	+		
b . komunikasi	+	-	- -
Tingkat gizi	-	+	-
Sistem Tanam Paksa		+	
“ De-urbanisasi		-	-
c . perang		+	

Ket :

- (-) : pengaruh (kuat) yang menurunkan tingkat kematian
- + (+) : pengaruh (kuat) yang menaikkan tingkat kematian
- / + + : berarti lebih kuat daripada -/+ hanya dalam satu variabel dalam dua periode ; bukan diantara variabel-variabel.

Sejak perluasan Sistem Tanam Paksa, penyakit demam tipus ini diakibatkan oleh kurangnya makanan dan gizi, serta tingkat penyebarannya yang tinggi. Untuk mencegah penyakit ini, pemerintah mengadakan sosialisasi vaksinasi kepada rakyat. Vaksinasi diharapkan dapat menurunkan penyebaran penyakit menular dan mencegah meningkatnya angka kematian (Tabel 4.9). Dengan demikian, antara tahun 1850 dampak vaksinasi umumnya dapat mencegah penyebaran kolera dan demam tipus. Setelah tahun 1850 tingkat kematian jauh lebih rendah karena hilangnya cacar air, hampir menghilangnya demam tipus dan menurunnya kolera yang berbahaya itu.²⁴²

Jadi, pertumbuhan dan penurunan jumlah penduduk yang disebabkan oleh Sistem Tanam Paksa akan menjadi pergerakan baru bagi populasi penduduk Jawa. Akan tetapi dengan adanya pergerakan populasi kependudukan, memberikan

²⁴¹ *ibid.*, hlm. 327.

²⁴² *idem.*,

keuntungan terhadap Sistem Tanam Paksa khususnya bagi daerah yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi dan dengan tidak sengaja telah menciptakan pemukiman baru yang padat penduduk, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja untuk perkebunan semakin terpenuhi serta tidak perlu mencari tenaga kerja ke daerah lain. Dengan demikian Sistem Tanam Paksa dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk perkebunan mereka (pemerintah).

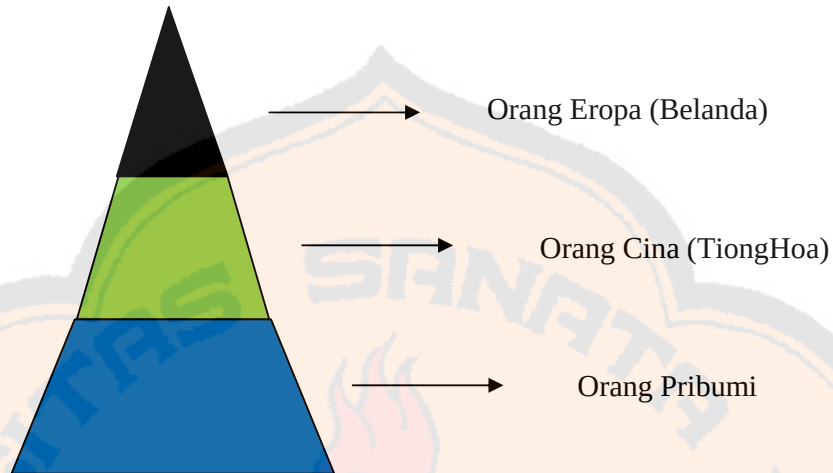
D. Perubahan Sosial di Jawa

Sistem Tanam Paksa banyak menimbulkan perubahan di dalam kehidupan masyarakat Jawa, salah satunya pada kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi desa sangat terpengaruh dengan beredarnya uang di masyarakat. Lalulintas uang yang baru itu merusak struktur sosial lama, khususnya dengan hubungan-hubungan perorangan, feodal dan komunal.²⁴³ Lalulintas uang telah merubah ekonomi sosial masyarakat Jawa menjadi ekonomi uang dan masyarakat Jawa dikenalkan dengan sistem pasar.

Perubahan yang kedua diakibatkan oleh migrasi orang-orang Eropa ke Indonesia (Jawa). Migrasi ini menimbulkan struktur masyarakat Indonesia yang baru, pembagian ini berdasarkan konteks kolonial, yaitu golongan Eropa, Tionghoa (Cina) dan golongan pribumi (lihat Skema 4.1). Pembagian kedudukan dibedakan pada aspek keturunan, pekerjaan, dan pendidikan. Pembagian kelas tersebut sebenarnya untuk menunjukkan pada kaum pribumi bahwa bangsa kulit putih kedudukannya jauh lebih tinggi dari kulit berwarna.

²⁴³ D. H Burger, *Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta, Bhratara Karya Aksara, 1983, hlm. 112.

Skema 4.1 : Piramid kehidupan masyarakat Jawa sejak Sistem Tanam Paksa.



Golongan pribumi berada di bawah dan tidak dapat melakukan mobilitas secara vertikal. Sebenarnya pembagian ini tidak lebih dari kontak bidang ekonomi dan usaha lainnya.²⁴⁴ Dari unsur kebudayaan baru ini- kehidupan ekonomi-puncaknya yang berharga bukan Indonesia. Oleh karena itu, tercerainya kehidupan ekonomi dari keseluruhan kebudayaan menyebabkan hancurnya keutuhan dan hilangnya keselarasan lama.²⁴⁵

Selanjutnya Sistem Tanam Paksa juga telah melahirkan pengistilahan baru dalam lapisan-lapisan di masyarakat petani. Istilah-istilah kuli kenceng (kewajiban penuh kerja bakti atau kerja yang tanpa berhenti), kuli setengah kenceng (tidak bertanggung jawab penuh atau kerja setengah tanpa henti) telah menggantikan istilah sikep (pemilik tanah) dan numpang (orang yang tidak punya lahan). Sebab, semua pemilik tanah wajib menjalankan kerja bakti di tanah-tanah *cultuurstelsel*.

²⁴⁴ *ibid.*, hlm. 104.

²⁴⁵ *ibid.*, hlm. 105.

E. Munculnya Model Pendidikan Barat

Sejak diterapkannya Sistem Tanam Paksa di Jawa, kebutuhan akan tenaga kerja semakin berlimpah. Tenaga-tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga-tenaga yang “ ahli “ maka mulai terasa kebutuhan akan sekolah yang menghasilkan pegawai. Kemudian pada tahun 1848 kebutuhan akan pegawai murahan dapat terpenuhi ketika Gubernur Jenderal diberi kuasa untuk mempergunakan uang dari anggaran belanja negara sejumlah f 25.000 per tahun dengan tujuan untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi penduduk Jawa, terutama untuk mendidik calon-calon pegawai,²⁴⁶ namun ini hanya memberikan hasil yang sedikit. Pada tahun 1849-1852 telah didirikan 20 buah sekolah untuk anak-anak Indonesia di setiap ibukota karesidenan dan ketika itu sudah ada 30 buah sekolah untuk anak-anak Belanda.²⁴⁷

Pada tahun 1851 pemerintah membuka sekolah pendidikan Guru (*Kweekschool*) dan sekolah Dokter Jawa yang merupakan pendidikan pemerintah bagi kaum pribumi di atas tingkat yang paling dasar.²⁴⁸ Sekolah guru tersebut bertujuan untuk menciptakan pembentukan golongan guru-guru Indonesia yang mendapatkan pendidikan baik.

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda ditujukan kepada para pemimpin pribumi (terbatas pada anak-anak bangsawan saja) atau orang yang memiliki material berlimpah, sedangkan rakyat jelata tidak diperkenankan,

²⁴⁶ I. Djumhur dan H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, Bandung, CV Ilmu, 1976, hlm.122.

²⁴⁷ *idem.*,

²⁴⁸ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983, hlm. 52.

tujuannya adalah para pemimpin ini dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya dan bukan untuk mendidik rakyat, bukan pula untuk mempertinggi taraf kehidupan rakyat melainkan untuk keperluan kaum penjajah yaitu untuk menutupi kebutuhan akan pegawai-pegawai murahan.²⁴⁹

Materi pelajaran di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan semasa Sistem Tanam Paksa, mata pelajaran yang diberikan adalah mengukur tanah, karena disesuaikan dengan menetapkan luas sawah yang harus ditanami tanaman pemerintah. Selain itu pelajaran pun disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan di kantor-kantor pemerintah, seperti menggambar: anak-anak banyak diberi latihan menggambar peta lapangan, berhitung: soal-soal yang berhubungan dengan pemungutan pajak tanah, administrasi gudang-gudang garam dan kopi, membuat macam-macam daftar, tata buku yang sederhana dll, serta ilmu pengetahuan: tujuannya tentu bukan untuk memajukan pertanian rakyat akan tetapi untuk menambah pengetahuan yang sekiranya dapat berguna bagi calon pegawai.²⁵⁰ Di sekolah pun dipelajari mengenai bahasa Belanda dan bahasa Melayu, karena bahasa tersebut dipelajari sebagai bahasa pengantar antara pemerintah dengan calon pegawai.

Sekolah yang didirikan pemerintah telah membuat penduduk pribumi tidak tertarik, karena mereka memandangnya sebagai hal yang tidak perlu dan kemungkinan besar justru membahayakan, karena pendidikan membawa resiko menjadi terasing dari kebudayaan sendiri dan kemungkinan terseret menjadi Kristen. Akan tetapi, pernyataan itu tidak membuat sebagian rakyat pribumi

²⁴⁹ I. Djumhur dan H. Danasuparta, *op.cit.*, hlm. 123.

²⁵⁰ *ibid.*, hlm. 124.

masuk sekolah (khususnya anak-anak priyayi) dan pada tahun 1846 orang pribumi diizinkan memasuki sekolah dasar (ELS).²⁵¹

F. Perubahan Kebudayaan Masyarakat Jawa Karena Sistem Tanam Paksa

Sekolah yang didirikan oleh pemerintah sejak Sistem Tanam Paksa telah mendorong para pemimpin Jawa mengalami westernisasi (pembaratan). Westernisasi ini memicu para pemimpin Jawa menggunakan budaya Barat, misal dalam tata cara makan, penggunaan barang-barang mewah seperti pakaian, dan penggunaan bahasa asing (bahasa Belanda).

Pemakaian pakaian model Barat menimbulkan gaya pakaian yang bercorak Barat (kiblat orang Eropa) dan meninggalkan gaya pakaian tradisional menjadi pakaian yang bercelana. Selain itu, para bupati mulai mempergunakan perabotan yang berasal dari negeri Belanda, misal alat makan Barat (menggunakan sendok dan garpu), dan semua kemewahan Barat dibeli dari Belanda.²⁵²

Westernisasi telah menyebabkan adanya suatu perkembangan dari suasana quasi-Eropa di dalam perjamuan-perjamuan dan gaya hidup para golongan elit pribumi. Pejabat-pejabat pribumi minum whisky-soda, berdansa dan bermain kartu cara Eropa; semua ini hanya sebagai kesenangan.²⁵³ Masuknya budaya Barat ke Indonesia menyebabkan hilangnya jati diri yang dimiliki oleh orang Jawa, karena adanya pengaruh pendidikan dan penggunaan barang-barang dari Eropa.

²⁵¹ Heather Sutherland, *op.cit*, hlm. 99.

²⁵² Ong Hok Ham, *op.cit.*, hlm. 16.

²⁵³ Heather Sutherland, *op.cit*, hlm. 93.

Sedangkan untuk kehidupan rakyat jelata tidak mengalami perubahan budaya sedikit pun, karena mereka dijadikan sebagai buruh perkebunan.



BAB V

KESIMPULAN

Sejak awal pelaksanaannya, Sistem Tanam Paksa menimbulkan dampak bagi masyarakat Jawa, baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak-dampak tersebut dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat Jawa, di antaranya kehidupan ekonomi, politik dan sosial-budaya. Untuk dampak dalam kehidupan ekonomi dan sosial-budaya, dapat dilihat sejak dituangkannya Sistem Tanam Paksa. Sejak dicanangkan pada tahun 1830, Sistem Tanam Paksa memberlakukan sewa tanah dan pajak bumi kepada rakyat dan desa-desa. Sewa tanah dan pajak bumi merupakan beban dan penderitaan yang harus ditanggung oleh rakyat dan desa. Selain mereka tetap dipungut sewa tanah dan pajak bumi, mereka pun diharuskan kerja paksa di perkebunan-perkebunan milik pemerintah.

Selama dituangkannya Sistem Tanam Paksa, sistem ini memberikan penderitaan dan kemiskinan, akan tetapi memberikan juga kesejahteraan dan kemakmuran bagi sebagian penduduk Jawa. Misalnya di daerah Pasuruan, Cirebon, Besuki dan Pekalongan. Selain itu, kemakmuran Sistem Tanam Paksa berdampak terhadap para penguasa pribumi, seperti bupati. Mereka semakin kaya karena sejak pelaksanaan sistem ini, mereka mendapatkan *cultureprocenten* dan gaji dari jabatan sebagai pegawai pemerintah. Sistem Tanam Paksa menimbulkan pengalihan lahan pertanian menjadi lahan tanaman ekspor. Pengalihan ini sangat merugikan petani padi yang menanam padinya di lahan persawahan, sebab mereka harus mengalah dengan tanaman ekspor, karena tanaman ini ditanam di

lahan persawahan, seperti tanaman nila dan tebu (kecuali kopi ditanam di lahan perbukitan/lahan yang belum pernah digarap) dan ketika petani hendak menanam kembali padinya, mereka harus menunggu giliran setelah tanaman ekspor ini dipanen, sehingga menjadikan lahan persawahan menjadi tidak subur, serta menurunnya hasil produksi padi dan secara tidak sengaja menimbulkan bencana kelaparan seperti di karesidenan Cirebon pada tahun 1843, karesidenan Demak (1848) dan Grobogan (1849).

Tanah-tanah rakyat dikuasai oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai tanah komunal. Dengan penguasaan tanah secara komunal, pemerintah beralih lebih mudah untuk mengawasi tanah komunal daripada dengan tanah hak milik perorangan, sedangkan bagi rakyat tanah komunal memiliki kesulitan dan tidak dapat dijual ataupun dipindahtangankan. Kebutuhan akan tenaga kerja di perkebunan semakin meningkat, sehingga keluarga-keluarga petani dilibatkan dan kadang-kadang mereka dipaksa untuk bekerja di perkebunan-perkebunan milik pemerintah, mereka dipekerjakan untuk menanam, merawat dan mengangkut hasil panen ke pabrik. Selama penerapan Sistem Tanam Paksa, sistem ini membutuhkan buruh murah, sehingga dibangunlah sekolah-sekolah yang ditujukan khusus bagi anak-anak bupati bukan untuk rakyat jelata seperti petani. Maka pada tahun 1846 orang pribumi diizinkan memasuki sekolah dasar (ELS) dan pada tahun 1851 pemerintah membuka sekolah pendidikan Guru (*Kweekschool*) dan sekolah Dokter Jawa.

Selama rakyat dijadikan sebagai tenaga kerja perkebunan, mereka mulai diperkenalkan dengan sistem kerja upah. Misalnya untuk upah pekerjaan

menanam, mengurus dan mengangkut hasil produksi dari perkebunan ke pabrik-pabrik, maka mereka memanfaatkannya untuk usaha kecil-kecilan di bidang perniagaan, lalu lintas dan kerajinan. Selain rakyat kecil (petani), uang pun mengalami perkembangan bagi para bupati. Bupati mengenal uang ketika mereka diberikan *cultureprocenten* oleh pemerintah selain dari gaji sebagai pegawai serta dapat meningkatkan derajat sosialnya. Ketika para petani bekerja di perkebunan, tak jarang mereka harus mengangkut hasil panen dengan cara dipikul, seiring dengan kebutuhan semakin meningkat, maka dipergunakanlah alat pengangkutan secara tradisional, akan tetapi tidak memberikan solusi bagi pengangkutan sehingga dibangunlah jalur rel kereta api yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan tersebut.

Sejak pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, sistem ini banyak menimbulkan pertumbuhan dan penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh semakin dibutuhkannya tenaga kerja untuk penanaman pemeliharaan, dan pengangkutan hasil perkebunan; pembukaan lahan baru untuk penanaman tanaman ekspor, lonjakkan pernikahan penduduk Jawa di usia dini yang disertai dengan lonjakkan kelahiran anak, serta banyaknya migrasi orang asing dikarenakan rangsangan ekonomi dari Sistem Tanam Paksa. Penurunan penduduk disebabkan oleh migrasi petani yang menghindari kerja paksa, kegagalan panen (pengalihan lahan pertanian) serta tumbuhnya berbagai penyakit menular, seperti malaria, kolera, dan demam tipus. Perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat Jawa, disebabkan oleh perkembangan uang. Struktur masyarakat Jawa dibagi berdasarkan konteks kolonial, yang mana masyarakat

pribumi berada di bawah karena sebagai budak atau buruh, sedangkan orang asing seperti orang Belanda berada pada tingkatan yang paling atas dan orang asing lainnya, seperti orang Arab dan Cina berada pada posisi kedua, karena mereka sebagai pengusaha. Perubahan sosial, justru menimbulkan perubahan kebudayaan di masyarakat Jawa, di antaranya terhadap para bupati atau para penguasa pribumi misal dalam tata cara makan (menggunakan sendok garpu), tata cara berpakaian, penggunaan barang-barang mewah, penggunaan bahasa Belanda, serta perjamuan-perjamuan dan gaya hidup bupati atau para penguasa pribumi.

Selama Sistem Tanam Paksa, kedudukan bupati sebagai penguasa tertinggi di daerahnya mulai diganti menjadi pegawai yang digaji, peran bupati digunakan untuk menyediakan tenaga kerja dan tanah. Selain itu, pemerintah mulai mengatur birokrasi dan mengubah pemerintahan tradisional menjadi birokrasi pemerintahan yang secara modern, seperti para bupati diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda dan bukan lagi oleh raja, sehingga mereka mulai kehilangan peran *kawula gusti* yang sejak lama sudah ada dalam diri bupati. Selain itu, pertanggungjawaban bupati beralih kepada pemerintah Hindia Belanda atau Gubernur Jenderal, serta tugas-tugasnya harus dibagi dengan pegawai pemerintah kolonial lainnya seperti residen dan asisten residen. Walaupun Sistem Tanam Paksa merupakan kewajiban tradisional yang harus ditaati, akan tetapi mereka berhak untuk memperjuangkan kembali hak kebebasannya dari kerja paksa oleh pemerintah Hindia Belanda dan para penguasa pribumi (bupati). Contohnya yang dilakukan oleh Eduard Douwes Dekker, ia menulis buku dengan judul *Max Havelaar* (1860). Isi buku itu menceritakan ketidakadilan terhadap rakyat Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abu Ahmadi, H. 1992. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Alatas, S.H. 1988. *Mitos Pribumi Malas ; Citra Orang Jawa Melayu dan Filipina Dalam Kapitalisme Kolonial*. Jakarta : LP3ES.
- Anshoriy Ch, HM. Nasruddin. 2008. *Bangsa Gagal : Mencari Identitas Kebangsaan*. Yogyakarta: LKiS.
- _____. 2008. *Bangsa Inlander ; Potret Kolonialisme di Bumi Nusantara*. Yogyakarta : LKiS.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839-1848*. Jakarta: Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No.5.
- Bambang Sulistyono. 1995. *Pemogokan Buruh Sebuah Kajian Sejarah*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.
- Berkhofer, R. F. 1969. *A Behavioural Approach to Historical Analysis*. New York: A Free Press Paperback.
- Boomgaard, Peter. 2004. *Anak Jajahan Belanda ; Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. Jakarta : KITLV.
- Booth dkk, Anne. (Peny.). 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Breman, Jan. 1986. *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja ; Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta : LP3ES.
- _____. (Terj). 1971. *Djawa Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Demografi*. Djakarta : Bhratara Karya Aksara.
- Burger, D.H. (Terj). 1983. *Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta : Bhratara Karya Aksara.
- Caporaso, James A. & P. Levine, David. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Carey, P.B.R. 1985. *Asal Usul Perang Jawa*. Jakarta: Pustaka Azet.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Creutzberg, Pieter & van Laanen, J. T. M. (Terj). 1987. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Djumhur, I dan Danasuparta, H. 1976. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu.
- Endang Suhendar dan Ihdhal Rasim. 1966. *Tanah Sebagai Komoditas, Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Furnivall, J.S. 2009. (Terj) *Hindia Belanda Studi Tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute.
- Gottchalk, Louis. 1969. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : UI Press.
- Irchami Sulaiman, dkk. 1988. *Perdagangan/Pengusaha Cina, Perilaku Pasar*. Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita.
- Juliantono, Ferry. J. 2000. *Tanah Untuk Rakyat*. Jakarta: Pustaka Zaman.
- kompas Laporan Jurnalistik. 2008. *Ekspedisi Anjer-Panarukan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Bentang Budaya.
- . 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*; Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Laksono, P.M. 1985. *Tradisi Dalam Struktur Masyarakat Jawa ; Kerajaan dan pedesaan*. Yogyakarta : UGM.
- Leirissa, R.Z. dkk. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Martin, Roderick. 1990. *Sosiologi Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali.
- Miriam Budiardjo. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mohammad Hatta. 1954. *Kumpulan Karangan*. Djakarta : Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- Mohammad Natsir. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mubyarto, dkk. 1993. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan : Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.

- _____. 1987. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Murniati, A Nunuk P. 2004. *Perempuan Indonesia dalam Perspektif agama, Budaya, dan Keluarga*, cet 1. Magelang: Yayasan Indonesia Tera.
- Niel, Robert van. 2003. *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. Jakarta: LP3ES.
- Nugroho Notosusanto. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta : Yayasan Idayu.
- Ong Hok Ham. 2002. *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong ; Refleksi Historis Nusantara*. Jakarta: Buku Kompas.
- Pelzer, Karl J. 1985. *Toen Keboen dan Petani Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Philpott, Simon. (Terj). 2000. *Meruntuhkan Indonesia : Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*. Yogyakarta: LkiS.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1957. *Sejarah Ekonomi Indonesia, dari segi Sosiologi sampai Akhir Abad ke XIX*. Jakarta: P.T Pradnya Paramita.
- Rajagukguk, Erman. *Indonesia : Hukum Tanah di Zaman Penjajahan* tidak diterbitkan.
- Ricklefs, M. C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200- 2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ropke, Jochen. 1988. *Kebebasan Yang Terhambat, Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia.
- Sartono Kartodirdjo. 1984. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.
- _____. 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900, Dari Emporium sampai Imperium*. Jilid I. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo. 1994. *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sartono Kartodirdjo dkk. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Scherer, Savitri Prastiti. 1985. *Keselarasan dan Kejanggalan; Pemikiran-pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Silverio R.L Aji Sampurno. (Ed.). 2003. *Indonesia Alternatif : Rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Simarmata, Rikardo. 2002. *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*. Yogyakarta : Insist Press.
- Simbolon, Parakitri T. 2006. *Menjadi Indonesia*. cet ke 2. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Soediono. M.P Tjondronegoro & Gunawam Wiradi. (Peny). 2008. *Dua Abad Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soetrisno P. H. 1992. *Kapita Selekt Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sri-Edi Swasono. (Ed). 1985. *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suhartono W. Pranoto. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- _____. 2010. *Jawa Bandit-Bandit Pedesaan ; Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Susanto Zuhdi. 2002. *Cilacap (1830-1942) : Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sutjipto Wiryosuparto, 1956, *Dari Lima Pendjadjahan menudju Zaman Kemerdekaan, Indira*.
- Suwarno, P. J. 1986. *Peranan Bupati Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Daerah*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- _____. 1989. *Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta.

———. 2003. *Tatanegara Indonesia; dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Vlekke, Bernard H.M. (Terj). 1967. *Nusantara (Sejarah Indonesia)*. Kuala Lumpur : Tien Wah. Press (M).

Vleming Jr, J.L, Liem Twan Djie, & Duyvendak, J.J.L. *Sedjarah Perkembangan Pedagang-pedagang Tionghoa di Indonesia* (Terj), Penyusun Alva Study Club.

Wasino. 2008. *Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*. Yogyakarta: LKIS.

Wesselink, W.H.A dan K.Y FF. 1956. *Sejarah Ekonomi*. Djakarta : Noordhoff-Kolff N.V.

Winardi. 1986. *Kapitalisme versus Sosialisme; Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*. Bandung: Remadja Karya CV Bandung.

INTERNET:

<http://ppijkt.wordpress.com/2007/12/16/pola-penguasaan-tanah-era-tanam-paksa/>
diakses pada tanggal 23 Febuari 2010.

<http://www.mail-archive.com/e-ketawa@yahoogroups.com/msg46282.html>
diakses tanggal 22 september 2010 pada pukul 02.25 pm.

http://www.e-dukasi.net/mapok/mp_full.php?id=157&fname=pengertian.html
diakses pada tanggal 30 Oktober 2010

<http://thinkquantum.wordpress.com/2009/12/08/pengertian-sistem-ekonomi/>
diakses pada tanggal 30 Oktober 2010

<http://www.membuatblog.web.id/2010/08/sistem-ekonomi-tradisional.html>
diakses pada tanggal 30 Oktober 2010

http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/31001-5-7-0-5-6-3-9-0-38228.pdf diakses pada tanggal 30 Oktober 2010

<http://yanoear46.wordpress.com/2010/06/02/pengertian-sistem-ekonomi/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2010

http://www.smecca.com/kajian/files/hslkajian/Kajian_Inovatif/1_Model/4_BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 1 November 2010

<http://www.kaskus.us/showthread.php?t=6672383> diakses pada tanggal 21 Februari 2011

<http://shedhuwkul.blogspot.com/2011/04/sistem-pemerintahan-hindia-belanda.html> diakses pada tanggal 2 April 2011.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perkeretaapian_di_Indonesia diakses pada tanggal 26 Januari 2011 dan tanggal 12 April 2011

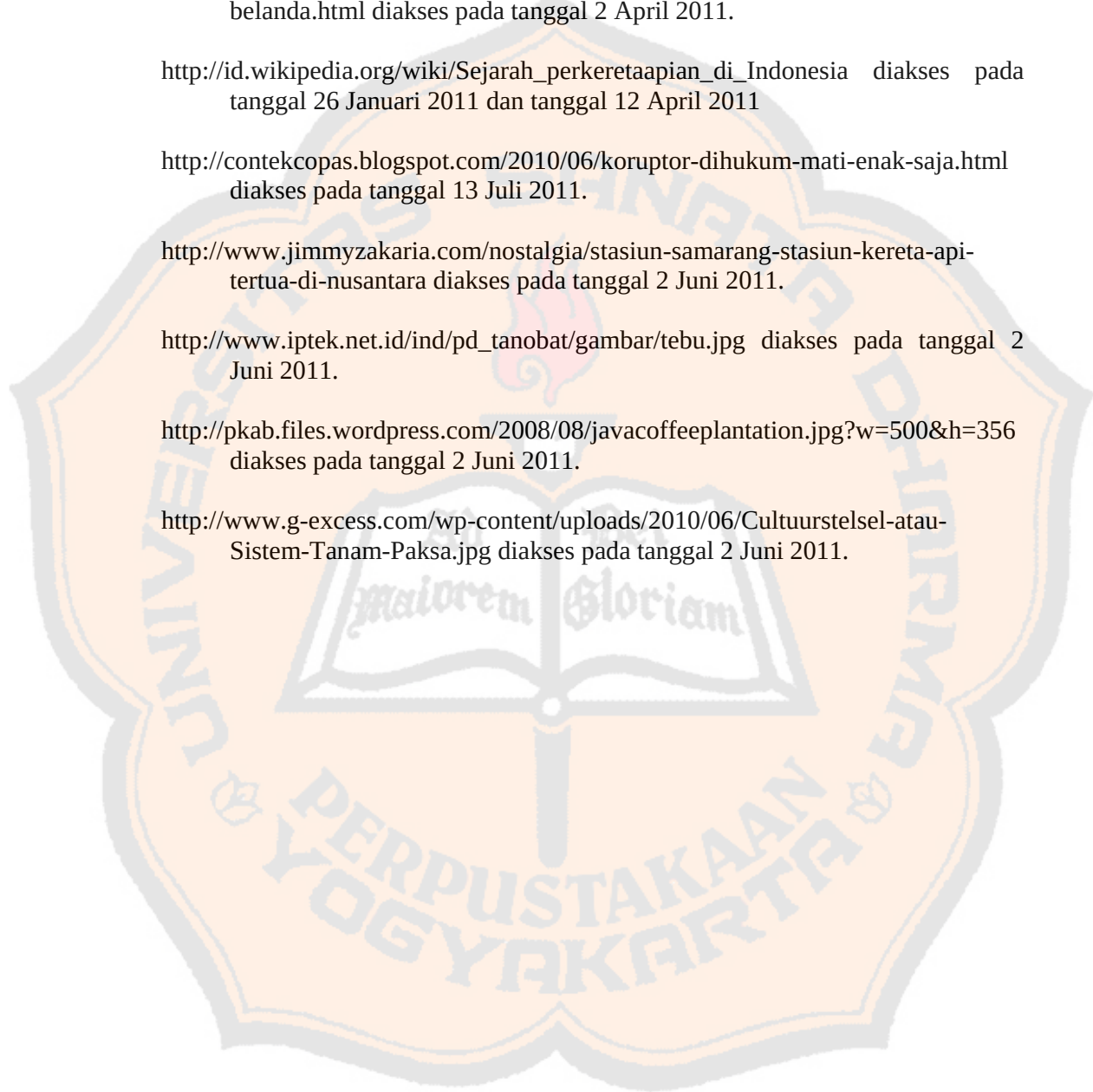
<http://contekcopas.blogspot.com/2010/06/koruptor-dihukum-mati-enak-saja.html> diakses pada tanggal 13 Juli 2011.

<http://www.jimmyzakaria.com/nostalgia/stasiun-samarang-stasiun-kereta-api-tertua-di-nusantara> diakses pada tanggal 2 Juni 2011.

http://www.iptek.net.id/ind/pd_tanobat/gambar/tebu.jpg diakses pada tanggal 2 Juni 2011.

<http://pkab.files.wordpress.com/2008/08/javacoffeeplantation.jpg?w=500&h=356> diakses pada tanggal 2 Juni 2011.

<http://www.g-excess.com/wp-content/uploads/2010/06/Cultuurstelsel-atau-Sistem-Tanam-Paksa.jpg> diakses pada tanggal 2 Juni 2011.



SUPLEMEN



SILABUS

Nama Sekolah : SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas : XI/ IPS

Semester : II

Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Indikator	Penilaian			Waktu	Sumber / Alat/ Bahan
				Jenis Tagihan	Bentuk Instrumen	Contoh Instrumen		
2.1 Menganalisis perkembangan pengaruh Barat dan perubahan ekonomi, demografi dan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia pada masa kolonial.	Perkembangan pengaruh Barat dan perubahan ekonomi, demografi dan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Uraian materi : Dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.	- Melalui diskusi kelompok, siswa membahas dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang ekonomi. - Melalui diskusi kelompok, siswa membahas dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang politik. - Melalui diskusi kelompok, siswa membahas dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang sosial-budaya.	Diharapkan siswa dapat: - Mengidentifikasi dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang ekonomi. - Mengidentifikasi dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang politik. - Mengidentifikasi dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang sosial-budaya. - Menganalisis dampak positif - negatif Sistem Tanam Paksa dalam bidang	a. Tugas individu b. Tugas kelompok c. Presentasi d. Ulangan harian e. UTS dan UAS f. Portofolio	a. Laporan diskusi b. LKS c. Tes tertulis (uraian dan pilihan ganda)	Jelaskan dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang ekonomi tahun 1830-1870 ?	3 jp	a. Sumber : - Anne Booth dkk. (Peny.). <i>Sejarah Ekonomi Indonesia</i>. Jakarta : LP3ES. 1988. - Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo. <i>Sejarah Perkebunan di Indonesia</i>. Yogyakarta: Aditya Media. 1994. - J.S. Furnivall (Terj). <i>Hindia Belanda studi tentang</i>

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

116

			ekonomi, politik dan sosial-budaya bagi masyarakat Jawa.					<i>Ekonomi Majemuk.</i> Jakarta: Freedom Institute. 2009. ▪ Rober van Niel, t. <i>Sistem Tanam Paksa Di Jawa.</i> Jakarta: LP3ES. 2003. b. Alat : Papan tulis, laptop OHP dan LCD. c. Bahan : Transparan.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Yogyakarta, 06 Oktober 2011

Guru Bidang Studi,



(Silvester Desna Ria Ambara)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

SMA	: SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA
Mata Pelajaran	: Sejarah
Kelas/Semester	: XI IPS/II
Alokasi Waktu	: 3 x 45 menit.
Standar Kompetensi	: Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang.
Kompetensi Dasar	: Menganalisis perkembangan pengaruh Barat dan perubahan ekonomi, demografi dan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia pada masa kolonial.
Indikator	: • Mengidentifikasi dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang ekonomi. • Mengidentifikasi dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang politik. • Mengidentifikasi dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang sosial-budaya. • Menganalisis dampak positif - negatif Sistem Tanam Paksa dalam bidang ekonomi, politik dan sosial-budaya bagi masyarakat Jawa.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah proses belajar mengajar terlaksana, diharapkan siswa dapat :

- Mengidentifikasi dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang ekonomi.
- Mengidentifikasi dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang politik.
- Mengidentifikasi dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang sosial-budaya.

- Menganalisis dampak positif - negatif Sistem Tanam Paksa dalam bidang ekonomi, politik dan sosial-budaya bagi masyarakat Jawa.

B. Materi Pembelajaran

- Dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang ekonomi.
- Dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang politik.
- Dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang sosial-budaya.

C. Metode Pembelajaran

Diskusi dan Tanya jawab.

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

a. Pendahuluan

- Salam pembuka dan presensi.
- Orientasi : siswa diajak tanya jawab tentang Sistem Tanam Paksa. Contohnya bagaimana latar belakang diterapkannya Sistem Tanam Paksa di Jawa? Siswa diharapkan membawa sumber pendukung pembelajaran sejarah serta telah diberi tugas untuk membaca dan berkunjung ke perpustakaan sekolah.
- Pemberian acuan : peserta didik diberi informasi tentang tujuan pembelajaran.
- Motivasi: Siswa diberikan tayangan mengenai gambar rakyat yang menderita kelaparan sejak Sistem Tanam Paksa pada tahun 1830-1870, dan diberikan tayangan peta salah satu dari karesidenan, yaitu karesidenan Pasuruan dan karesidenan Cirebon untuk membangkitkan semangat siswa dalam mempelajari sejarah.

b. Kegiatan Inti

- Guru membagi siswa dalam 3 kelompok.
- Satu kelompok terdiri dari 5-6 orang yang mendapat materi berbeda
 - Kelompok1 : mendiskusikan dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang ekonomi.

- Kelompok 2 : mendiskusikan dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang politik.
 - Kelompok 3 : mendiskusikan dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang sosial-budaya.
 - Siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama teman sekelompoknya.
 - Setiap perwakilan kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.
 - Siswa yang lain mendengarkan serta memberi tanggapan.
 - Guru memberi penguatan terhadap hasil presentasi siswa.
- c. Penutup
- Guru dan siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah diberikan kepada siswa dengan melakukan tanya jawab.
 - Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini.
 - Guru menyampaikan tugas yang harus dipersiapkan untuk pembelajaran selanjutnya.

E. Sumber , Alat, Bahan dan Media Belajar

- a. Buku sumber :
- Niel, Robert van. *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*. Jakarta: LP3ES. 2003.
 - Booth dkk. (Peny.), Anne *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES. 1988.
 - Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media. 1994.
 - Furnivall, J.S. (Terj) *Hindia Belanda studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute. 2009.
 - Buku-buku pelajaran pegangan siswa dari berbagai penerbit.
 - <http://id.wikipedia.org>.
- b. Alat :
- Papan Tulis

- LCD
 - OHP
 - Laptop
- c. Bahan :
- Transparan
- d. Media
- Gambar rakyat yang menderita kelaparan sejak Sistem Tanam Paksa pada tahun 1830-1870.
 - Peta setiap karesidenan di Jawa, misal karesidenan Pasuruan dan karesidenan Cirebon tahun 1830-1870.

F. Penilaian

- a. Jenis penilaian: tertulis, *performance*, observasi.
- b. Bentuk penilaian: Tes, presentasi, portofolio, pengamatan.

1. Penilaian Produk

Jenis tagihan : tugas

1. Tes : Essay (50%) , pilihan ganda (30%) dan jawaban singkat (20%)
2. LKS : Essay (50%) dan pilihan ganda (50%)
3. Portofolio

Skor Penilaian Produk : Tes (50%) + Portofolio (30%)+LKS (20%)

Nilai Akhir : Skor Penilaian Produk (60%) + Skor Penilaian Proses (40%)

Penilaian dengan tugas

Contoh tes :

1. Jelaskan dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang ekonomi!
2. Jelaskan dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang politik!
3. Jelaskan dampak Sistem Tanam Paksa dalam bidang sosial-budaya!

2. Penilaian Proses

a. Performance (presentasi)

Nama	Keaktifan	Keantusiasan	Kerjasama	Penampilan	Jumlah

$$\text{Skor} = \frac{\text{Skor Total}}{20} \times 100 \%$$

Keterangan :

Penilaian menggunakan Skala Likert 1-5, dengan kriteria :

Skor 1 : Tidak antusias, pasif, kurang kooperatif dan tidak serius

Skor 2 : Tidak antusias, pasif, kurang kooperatif tetapi serius

Skor 3 : Tidak antusias, pasif tetapi kooperatif dan serius

Skor 4 : Antusias, kooperatif , serius tetapi pasif

Skor 5 : Sangat Antusias, kooperatif, serius dan aktif

c. Pengamatan

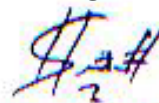
Jenis tagihan : observasi

Skor Penilaian Proses : Pengamatan (60%) + Performance (40%)

G. Tindak Lanjut

- Siswa dinyatakan berhasil apabila memenuhi standar kelulusan minimal sebesar 70%.
- Siswa diberikan program remidi apabila tidak memenuhi standar kelulusan minimal sebesar 70%.
- Siswa diberikan program pengayaan apabila memenuhi standar kelulusan minimal sebesar 70%.

Yogyakarta, 06 Oktober 2011
Guru Bidang Studi,



Silvester Desna Ria Ambara